

# Populasi

Volume 26 Nomor 1

Juni 2018

---

## Artikel

- Ketidaktercapaian Bonus Demografi: Pembelajaran dari Sumatera Barat 1  
*Dian Sri Andriani, Agus Joko Pitoyo, dan Evita Hanie Pangaribowo*
- Komunikasi Interpersonal antara Orang Tua dan Anak Remaja serta Identitas Diri Remaja: Studi di Bina Keluarga Remaja Parupuk Tabing, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat 16  
*Agus Irianto, Hasdi Aimon, Herman Nirwana, dan Agung Tri Prasetya*
- Representasi Perempuan Pekerja Migran menurut Laki-laki di Kota Palembang 26  
*Armansyah dan Mirna Taufik*
- Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan 39  
*Sukmaniar, Wahyu Saputra, dan Dani Saputra*
- Kualitas Perparkiran Kota Yogyakarta dari Multiperspektif 51  
*Eddy Kiswanto dan Triyastuti Setianingrum*
- Resensi Buku** 75  
Sinergi untuk Inovasi  
*Muhadjir Darwin*

## KATA PENGANTAR

Indonesia telah memasuki fase bonus demografi sejak tahun 2012 ketika beban ketergantungan penduduk berada di bawah 50 per 100 penduduk produktif. Namun, tidak semua provinsi di Indonesia akan meraih bonus demografi, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat, seperti artikel yang ditulis oleh Dian Sri Andriani, dkk. Mereka menyatakan bahwa ketidaktercapaian bonus demografi ini disebabkan oleh tingkat fertilitas yang masih tinggi yang menjadi penyumbang bertambahnya beban ketergantungan penduduk muda. Kondisi itu juga diperparah dengan angka migrasi neto yang konsisten minus di setiap periode sehingga proporsi penduduk umur produktif tidak mengalami penambahan yang signifikan.

Selanjutnya, masih dari Sumatera Barat, Agus Irianto, dkk. menyoroti tentang komunikasi interpersonal yang terjalin antara orang tua dan anak remajanya, serta ketercapaian identitas remaja guna pembinaan program Bina Keluarga Remaja oleh petugas dan konselor. Dinyatakan bahwa identitas diri remaja masih belum memperoleh ketercapaian yang tinggi, demikian pula dengan komunikasi orang tua dengan anak remajanya yang masih sangat tidak baik. Sementara itu, tingkat keterpakaian materi modul komunikasi interpersonal orang tua dan anak, serta identitas diri berada pada kategori sangat layak. Untuk itu, kedua komponen ini memerlukan modul yang memuat pembinaan seluruh komponen identitas diri remaja dan komunikasi antara orang tua dan anak remajanya.

Sementara itu, Armansyah dan Mirna Taufik mencoba menjelaskan tentang representasi perempuan pekerja migran menurut laki-laki di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Budaya perempuan bermigrasi dan bekerja dianggap hal yang biasa dan baik pada era modern sekarang ini. Sebagian besar laki-laki mendukung pasangannya bekerja dan bermigrasi, serta bentuk dukungan yang diberikan, seperti membantu pekerjaan rumah, mencuci, menyapu, dan mengurus anak. Namun, perempuan dianggap lebih baik jika bekerja dekat dengan lingkungan keluarga dan jika harus bermigrasi, disarankan keluarga (suami dan anak) hendaknya ikut serta.

Di sisi lain, artikel dari Sumatera Selatan yang ditulis oleh Sukmaniar, dkk. menyoroti tentang upaya peningkatan peserta KB aktif dalam rangka pencapaian target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas. Menurut penulis, upaya peningkatan jumlah peserta KB aktif dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan dana, pelatihan, manajemen sosialisasi, dan pelatihan alat KB pada PUS, kerja sama dengan pemangku kepentingan, pendekatan tokoh masyarakat, bantuan alat dan pemasangan kontrasepsi secara gratis, pemberian apresiasi kepada pengguna KB, melakukan *monitoring* dan evaluasi serta umpan balik, tinjauan kembali dari hasil *monitoring* dan evaluasi agar dapat diperbaiki pada program KB berikutnya demi tercapainya target Renstra BKKBN 2015-2019.

Tulisan terakhir dari Yogyakarta yang ditulis oleh Eddy Kiswanto dan Triyastuti Setianingrum meneliti tentang kualitas perparkiran dilihat dari multiperspektif. Mereka menilai tingkat kepuasan masyarakat dari perspektif pengguna parkir, juru parkir (jukir), dan masyarakat di sekitar lokasi parkir. Aktivitas parkir dinilai mengganggu aktivitas lalu lintas, masyarakat, dan menimbulkan kebisingan. Namun, masyarakat sekitar tidak keberatan dengan aktivitas perparkiran. Keberadaan jukir dinilai membantu mengurangi aktivitas parkir yang mengganggu aktivitas lalu lintas tersebut. Secara umum, indeks multiperspektif menunjukkan nilai kurang baik. Penilaian nilai indeks menunjukkan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik pelayanan publik demikian pula sebaliknya.

**Muhadjir Darwin**

**Ketidaktercapaian Bonus Demografi:  
Pembelajaran dari Sumatera Barat**

Dian Sri Andriani<sup>1</sup>, Agus Joko Pitoyo<sup>2</sup>, dan Evita Hanie Pangaribowo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kependudukan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, <sup>2</sup>Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Dian Sri Andriani (e-mail: diansriandriani.25@gmail.com)

**Abstrak**

Indonesia telah memasuki fase bonus demografi sejak tahun 2012 ketika beban ketergantungan penduduk berada di bawah 50 per 100 penduduk produktif. Namun, berdasarkan proyeksi beban ketergantungan penduduk tahun 2010-2035 tidak semua provinsi di Indonesia akan meraih bonus demografi, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Besarnya beban ketergantungan penduduk Sumatera Barat tercermin dari pergeseran struktur umur penduduk yang dipengaruhi oleh dinamika demografi yang berlangsung dari beberapa dekade sebelumnya. Tulisan ini akan menguraikan secara *time series* berlangsungnya ketiga komponen demografi di Sumatera Barat. Tren mortalitas bayi dan anak mengalami penurunan, bahkan pada 2012 telah mengindikasikan berada di akhir masa transisi demografi. Namun, penurunan mortalitas tersebut tidak diiringi dengan penurunan fertilitas yang signifikan. Tingkat fertilitas yang masih tinggi menjadi penyumbang bertambahnya beban ketergantungan penduduk muda. Kondisi tersebut diperparah dengan angka migrasi neto yang konsisten minus di setiap periode sehingga proporsi penduduk umur produktif tidak mengalami penambahan yang signifikan.

**Kata kunci:** bonus demografi, beban ketergantungan, mortalitas, fertilitas, migrasi

**Bonus Demography Not Achieved:  
Learning from West Sumatera**

**Abstract**

Indonesia has entered a demographic dividend in 2012 since the dependency ratio of population was below 50 per 100 of productive population. However, based on the projection of dependency ratio in 2010-2035, not all provinces in Indonesia will reach the demographic dividend, one of them is West Sumatera Province. The high dependency ratio of West Sumatera is reflected in a shift of population age structure influenced by the demographic dynamics that lasted from the previous few decades. This paper will describe the time series on three demographic components in West Sumatera. Infant and child mortality trends have decreased and in 2012 it was indicated to be at the end of the demographic transition period. However, the decrease in mortality is not accompanied by a significant decline in fertility. The high fertility rate contributes to the rising of dependency ratio to young population. The condition is worsened by net migration rate which is consistently minus in each period, thus the proportion of the productive population does not increase significantly.

**Keywords:** demographic dividend, dependency ratio, mortality, fertility, migration

## Pendahuluan

Indonesia tahun 2017, menurut CIA World Factbook, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak urutan keempat di dunia, yaitu 260.580.739 jiwa atau 3,51 persen dari total penduduk dunia. Besarnya jumlah penduduk ini akan memengaruhi struktur umur penduduk, baik distribusi maupun komposisi penduduk. Dinamika struktur umur penduduk disebabkan oleh berlangsungnya proses demografi, meliputi fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk yang saling berpengaruh satu sama lain.

Transisi demografi sebagai proses awal telah menggambarkan terjadinya dinamika struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya mortalitas dan fertilitas. Bloom, et.al. (2011) mendeskripsikan transisi demografi sebagai transisi menurunnya angka mortalitas dan fertilitas, dengan penurunan mortalitas mendahului penurunan fertilitas sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan. Struktur umur penduduk Indonesia juga telah mengalami proses transisi demografi.

Ananta (1997) menguraikan bahwa transisi demografi telah terjadi tahun 1950-an saat penurunan mortalitas yang cepat sehingga turut memengaruhi perubahan jumlah, komposisi, dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat pula. Pada 1997-an terjadi penurunan fertilitas sehingga angka pertumbuhan penduduk periode 1980 sampai 1990-an juga menurun dengan cepat.

Transisi demografi tersebut telah mengantarkan Indonesia pada proses demografi selanjutnya yang dikenal dengan bonus demografi. Berbagai literatur studi kependudukan menggunakan istilah bonus demografi untuk menggambarkan keuntungan ekonomis yang diterima oleh

suatu daerah atau negara akibat menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu besarnya jumlah penduduk umur produktif (15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Suatu daerah dianggap dapat menikmati bonus demografi apabila *dependency ratio* berada di bawah angka 50.

Bonus demografi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2012, yaitu ketika *dependency ratio* Indonesia berada di bawah angka 50 dan akan mencapai titik terendah tahun 2028-2031 (Kominfo, 2014). Hal itu berarti bahwa penduduk umur produktif berjumlah dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk yang bukan umur produktif. Namun, proses transisi demografi di Indonesia tidak serta-merta menunjukkan adanya perjalanan yang sama untuk setiap provinsi. Akibatnya, tidak semua provinsi akan menerima bonus demografi. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035, terdapat beberapa provinsi yang belum akan menerima bonus demografi hingga tahun 2035, salah satunya adalah Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh *dependency ratio* Sumatera Barat yang masih tinggi.

*Dependency ratio* Sumatera Barat tahun 2010 adalah 57,7 per 100 penduduk produktif, sedangkan Indonesia telah menempati angka 50,5 tahun yang sama. *Dependency ratio* Sumatera Barat pun diproyeksikan belum akan menyentuh angka 50 hingga tahun 2035, padahal suatu daerah dikatakan dapat menikmati bonus demografi apabila *dependency ratio* berada di bawah angka 50. Kominfo (2014) berasumsi bahwa penyebab Provinsi Sumatera Barat tidak dapat memasuki fase bonus demografi karena adanya tradisi merantau (migrasi keluar) oleh masyarakat setempat, terutama bagi penduduk usia produktif. Namun, dinamika

pertumbuhan penduduk di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh migrasi, tetapi juga oleh fertilitas dan mortalitas sebagai kesatuan komponen yang memengaruhi berlangsungnya proses demografi. Pencapaian *dependency ratio* saat ini merupakan hasil dari perjalanan proses demografi beberapa dekade sebelumnya.

Secara demografis, apabila mortalitas mengalami penurunan, maka pengaruh yang diberikan dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bayi hidup yang sekaligus akan menambah jumlah penduduk usia produktif di masa mendatang. Sementara itu, fertilitas memberikan dampak positif apabila mengalami penurunan karena dapat mengurangi proporsi penduduk muda dan *dependency ratio* penduduk muda (0-14 tahun). Dewasa ini proses transisi demografi juga sangat dipengaruhi oleh migrasi penduduk sebagai variabel penambah atau pengurang jumlah penduduk di suatu daerah.

Fenomena migrasi di Sumatera Barat diwarnai oleh tradisi merantau dan dapat disaksikan bahwa saat ini banyak orang Minangkabau tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Naim (2013) mengemukakan bahwa karakteristik migran keluar (perantau) pada umumnya adalah penduduk usia produktif, yaitu rentang usia 15 sampai 64 tahun. Asumsinya adalah banyaknya penduduk produktif yang bermigrasi keluar daerah menyebabkan proporsi penduduk produktif berkurang dan nantinya berdampak pada tingginya *dependency ratio*.

Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan berlangsungnya ketiga komponen demografi di Sumatera Barat secara *time series* guna mengetahui pengaruh yang diberikan terhadap perubahan struktur umur penduduk yang mengakibatkan Sumatera Barat tidak dapat meraih bonus demografi.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif berbasis analisis data sekunder secara runtut waktu (*time series*). Adapun langkah yang perlu dilakukan dalam proses penelitian menggunakan analisis data sekunder adalah merumuskan masalah, menentukan unit analisis, memeriksa kembali ketersediaan data, melakukan studi pustaka, mengumpulkan data, mengolah data sekunder, menyajikan data serta memberikan interpretasi, dan menyusun laporan hasil penelitian (Martono, 2010). Penelitian ini menggunakan data publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi Sensus Penduduk tahun 1971-2010, SDKI tahun 1994-2012, dan SUPAS tahun 1985-2015.

Adapun data yang akan dianalisis adalah 1) mortalitas berupa mortalitas bayi (Infant Mortality Rate/IMR) dan mortalitas anak (Child Mortality Rate/CMR); 2) fertilitas berupa Total Fertility Rate (TFR); serta 3) migrasi penduduk berupa migrasi neto risen. Analisis antarvariabel dilakukan dengan pendekatan secara historis (*historical perspective*). Informasi hasil analisis data disajikan dalam bentuk tulisan atau uraian, tabel, dan diagram. Hasil analisis juga diperkuat dengan studi literatur, seperti temuan sebelumnya berupa jurnal yang telah dipublikasi dan laporan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

## **Pembahasan**

Bonus demografi merupakan fase lanjutan dari berlangsungnya transisi demografi. Suatu daerah berpotensi atau tidak berpotensi meraih bonus demografi dapat dilihat dari struktur umur penduduk yang memengaruhi tinggi rendahnya *dependency*

**Tabel 1. Dependency Ratio Provinsi Sumatera Barat Tahun 1971-2015**

Kelompok Umur	Tahun					
	1971	1980	1990	2000	2010	2015
0-14 tahun	1.260.390	1.445.473	1.570.291	1.429.321	1.547.051	1.585.231
15-64 tahun	1.401.535	1.767.858	2.220.290	2.561.056	3.025.126	3.330.651
65 tahun ke atas	113.171	143.777	164.779	204.521	274.732	274.695
<i>Youth Dependency Ratio</i>	89,93	81,76	70,72	55,81	51,14	47,60
<i>Aged Dependency Ratio</i>	8,07	8,13	7,42	7,99	9,08	8,25
<b><i>Total Dependency Ratio</i></b>	<b>98,00</b>	<b>89,90</b>	<b>78,15</b>	<b>63,80</b>	<b>60,22</b>	<b>55,84</b>

Sumber: Diolah berdasarkan data Sensus Penduduk (1971, 1980, 1990, 2000, 2010) dan SUPAS (2015)

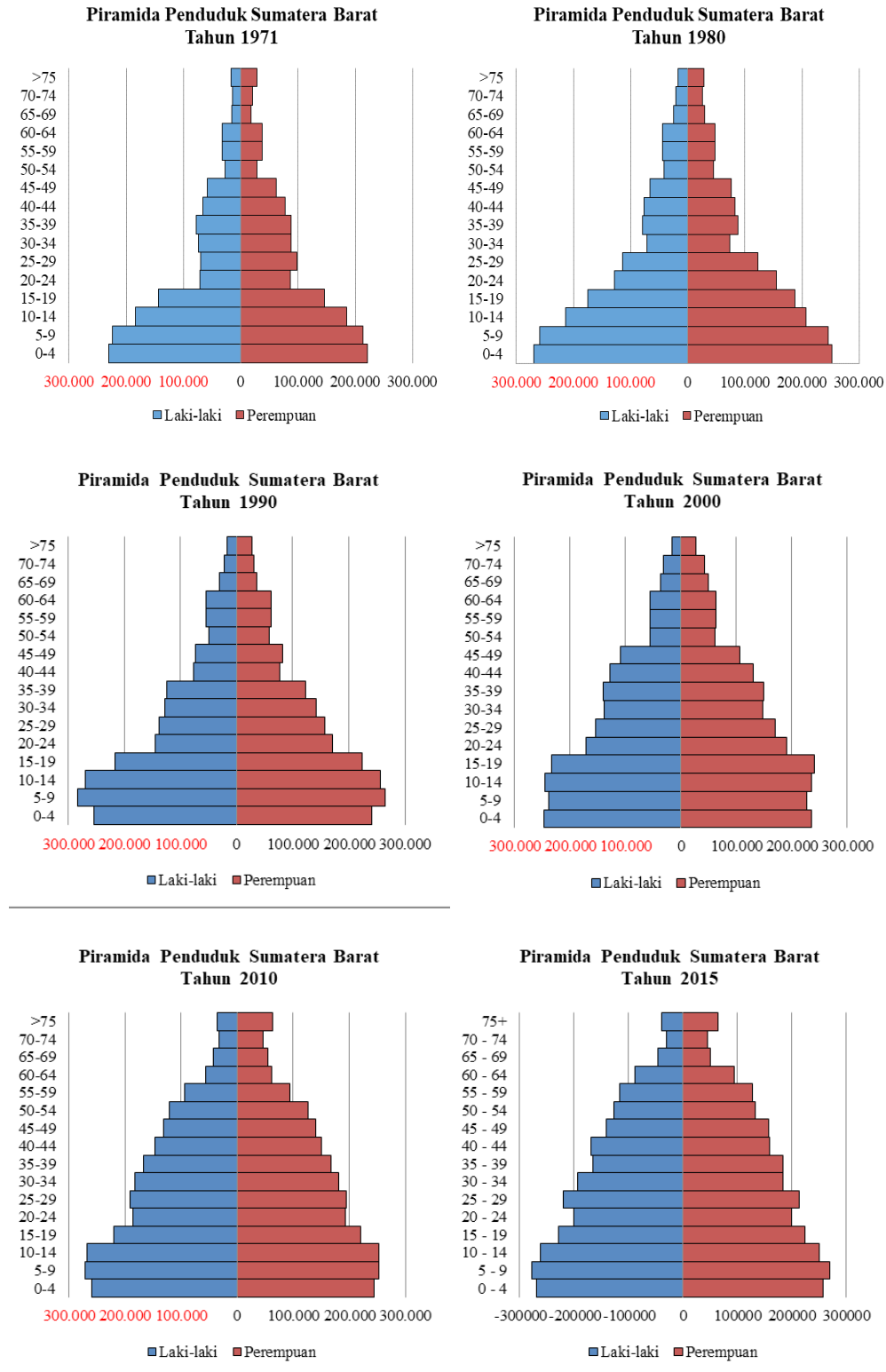
*ratio* sebagai parameter memasuki fase bonus demografi. Adapun *dependency ratio* penduduk Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tahun 1971 sampai tahun 2015, *dependency ratio* penduduk Sumatera Barat telah mengalami penurunan, tetapi masih berada di atas angka 50 yang mengindikasikan bahwa hingga tahun 2015 Sumatera Barat dikategorikan tidak akan memasuki fase bonus demografi. Besarnya *dependency ratio* masih disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk muda yang menjadi tanggungan. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa struktur umur penduduk Sumatera Barat masih tergolong muda. Dinamika struktur umur penduduk lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk piramida penduduk. Secara *time series*, berikut ini akan disajikan piramida penduduk Sumatera Barat dari tahun 1971 hingga tahun 2015.

Piramida penduduk pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa dari tahun 1971

hingga tahun 2000, struktur umur penduduk Sumatera Barat telah mengalami perubahan yang cukup signifikan meskipun piramida penduduknya masih bertipe ekspansif atau dikategorikan muda. Tren dinamika demografi sebagaimana yang terlihat pada piramida penduduk telah menunjukkan adanya penurunan proporsi penduduk muda (0-14 tahun). Piramida penduduk tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa Sumatera Barat dapat dikatakan meninggalkan struktur umur penduduk muda. Kondisi tersebut dapat dikategorikan masuk pada tahap *intermediate*, yaitu kondisi struktur umur penduduk yang masih mempunyai ciri agak ekspansif dan telah menunjukkan kecenderungan ke tahap konstruktif (Asmanedi dan Wiyono, 2007). Hal ini ditandai dengan masih melebarnya bagian dasar piramida penduduk (penduduk muda), mulai bertambahnya bagian tengah piramida (penduduk produktif), dan mulai melebarnya bagian atas piramida (bertambahnya penduduk usia lanjut). Perubahan struktur umur penduduk Sumatera Barat tersebut

## Ketidaktercapaian Bonus Demografi: Pembelajaran dari Sumatera Barat



Sumber: Diolah berdasarkan data Sensus Penduduk (1971, 1980, 1990, 2000, 2010) dan SUPAS (2015)

**Gambar 1** Piramida Penduduk Sumatera Barat Tahun 1971-2015

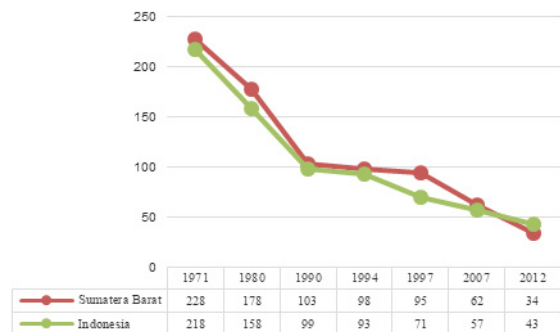
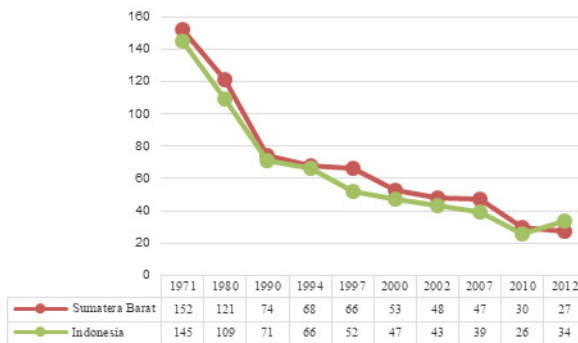
merupakan akibat berlangsungnya proses demografi dari beberapa waktu silam, meliputi mortalitas, fertilitas, dan migrasi penduduk. Berikut adalah detail ketiga hal tersebut.

### Mortalitas

Parameter mortalitas yang digunakan untuk melihat dinamika proporsi penduduk muda adalah IMR dan CMR. Hal ini berkenaan dengan struktur umur penduduk muda yang masih tergolong relatif muda sehingga untuk kajian bonus demografi ini, penurunan *dependency ratio* lebih disumbangkan oleh banyaknya penurunan penduduk muda (*youth dependency ratio*) dibandingkan dengan penduduk tua (*elderly dependency ratio*).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi tinggi dalam IMR dan CMR. BPS (2010) menggolongkan Sumatera Barat sebagai satu dari deretan provinsi lainnya (Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku) di Indonesia yang memiliki IMR di atas rata-rata nasional kurun waktu 1971-2010. Tren IMR dan CMR Sumatera Barat secara grafis dapat diamati pada Gambar 2 dan 3.

Grafik pada Gambar 2 dan 3 memperlihatkan bahwa IMR dan CMR di Sumatera Barat tahun 1971 sangat tinggi. Kondisi tersebut juga terjadi secara nasional karena diketahui bahwa IMR dan CMR Indonesia berturut-turut sebesar 145 per 1.000 kelahiran hidup dan 218 per 1.000 kelahiran hidup. Mantra (2013) menjelaskan bahwa tingginya IMR saat itu disebabkan oleh kondisi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan, mengingat Indonesia pasca kemerdekaan baru mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang. Tidak stabilnya produksi pangan dan susu turut menyumbang mortalitas bayi dan anak pada saat itu. Produksi pangan tahun 1960-an tidak dapat mengimbangi tingkat pertambahan penduduk dan tidak terdistribusi secara merata. Pada tahun 1966, produksi susu turun drastis karena berakhirnya program sumbangan susu dari UNICEF. Dampaknya, penyakit anak menjadi penyebab kematian yang penting pada saat itu. Selain itu, terjadi pula kenaikan harga pangan sehingga konsumsi pangan dan nutrisi menurun. Di samping fluktuasi masalah persediaan pangan, kemajuan di bidang kesehatan pun tidak menentu, terlebih



Sumber: Diolah berdasarkan data Sensus Penduduk (1971, 1980, 1990) dan SDKI (1994, 1997, 2007, 2012)

**Gambar 2** Tren IMR Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 1971-2012

**Gambar 3** Tren CMR Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 1971-2012



saat laju inflasi semakin meningkat. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai berperan penting sebagai kontributor kenaikan IMR (Bloom dan Canning, 2011).

Parameter IMR dan CMR ini merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang kesehatan (Siswono, 2015) sehingga seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju serta peningkatan pelayanan kesehatan, IMR terus mengalami penurunan. Hal ini juga dialami di Sumatera Barat. Data menunjukkan bahwa IMR menurun secara signifikan sesuai dengan gambaran indikasi awal terjadinya transisi demografi. Penurunan terbesar terjadi dalam dua dekade, yaitu tahun 1971 dari 152 menurun ke angka 121 tahun 1980 dan turun menjadi 74 tahun 1990. Selama dua dekade tersebut, Sumatera Barat telah mampu menurunkan IMR sebesar 48,68 persen. Begitu juga dengan CMR Sumatera Barat yang turut mengalami penurunan secara drastis sebesar 45,17 persen dalam kurun waktu 1971 hingga 1990. Kondisi penurunan IMR dan CMR yang drastis selama dua dekade di Sumatera Barat sama halnya dengan yang terjadi di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh telah dimulainya rencana pembangunan lima tahun (Repelita) pertama dan berkurangnya inflasi sesudah tahun 1968 sehingga terjadi perbaikan-perbaikan di bidang kesehatan masyarakat. Puskesmas mulai didirikan di kota-kota kecamatan serta tenaga dokter, perawat, dan bidan mulai dimobilisasi di pusat-pusat kesehatan sehingga mulai tampak penurunan tingkat kematian di Indonesia (Mantra, 2013).

Kondisi pemerintahan yang sentralistik tersebut telah memengaruhi penurunan mortalitas bayi dan anak di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Kemajuan penurunan IMR, baik skala

nasional maupun tingkat provinsi hingga tahun 1990, dinilai sebagai akibat dari peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan IMR dan CMR di Sumatera Barat terus berlangsung hingga tahun 2010, bahkan lebih dari setengah kematian bayi dan anak tahun 1990 dapat ditekan dalam waktu 10 tahun. Angka mortalitas bayi dan anak di Sumatera Barat konsisten mengalami penurunan dari tahun 2010. Namun, penurunan tersebut relatif masih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya dan rata-rata nasional. Tingginya IMR dan CMR disebabkan oleh belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi (Alfana, et.al., 2015; UNICEF, 2012).

Pada tahun 2012 penurunan IMR Sumatera Barat telah berhasil melampaui IMR nasional, yaitu menjadi 27 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan Indonesia masih berada di angka 34 per 1.000 kelahiran hidup. Begitu juga dengan CMR Sumatera Barat tahun 2012 menurun ke angka 34 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan Indonesia masih berkisar 43 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian penurunan IMR dan CMR tersebut berkaitan dengan kinerja pemerintah yang fokus di bidang kesehatan neonatal, bayi, dan penanggulangan penyakit pada anak yang telah berkontribusi positif terhadap penurunan mortalitas bayi di Sumatera Barat (Dinkes Sumbar, 2014). Sebagaimana yang diketahui bahwa indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan yang turut didukung oleh semakin majunya ilmu kedokteran (Wongboonsin dan Phiromswad, 2016). Hal ini dibuktikan dengan grafik yang selalu bergerak turun di setiap periodenya.

Hasil SDKI tahun 2012 menunjukkan bahwa IMR dan CMR Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia telah memperlihatkan penurunan yang cukup signifikan. Data profil kesehatan Sumatera Barat mencatat telah terjadinya keberhasilan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilihat dari IMR dan CMR, khususnya sebagai parameter yang berkontribusi dalam dinamika struktur umur penduduk muda. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang dinilai memiliki inovasi dalam kebijakan pembangunan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang mampu secara signifikan menurunkan angka mortalitas bayi dan anak (Nurriszka dan Saputra, 2013).

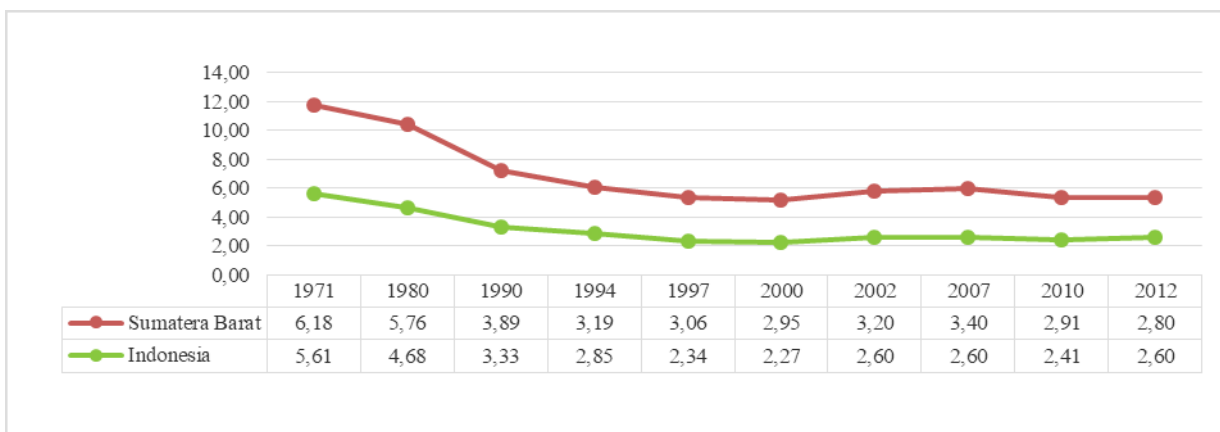
Keberhasilan Sumatera Barat dalam menurunkan IMR hingga ke angka 27 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2012 dan disertai dengan penurunan CMR yang turun hingga ke angka 34 per 1.000 kelahiran hidup telah mengantarkan provinsi ini mengakhiri masa transisi demografinya. Sebagaimana Ananta dan Arifin (2008) mengemukakan bahwa akhir transisi demografi di suatu daerah ditandai dengan IMR yang kurang dari 30 per 1.000 kelahiran hidup. Dampak yang diberikan oleh

penurunan drastis IMR dan CMR adalah bertambahnya jumlah bayi yang akan tetap hidup sampai usia dewasa (Adioetomo dan Samosir, 2010).

### Fertilitas

Awal transisi demografi diindikasikan dengan terjadinya penurunan mortalitas bayi dan anak secara drastis dan selanjutnya diikuti dengan penurunan fertilitas. Pada Gambar 4 dapat dilihat tren fertilitas Sumatera Barat dari tahun 1971 sampai tahun 2012.

Angka fertilitas Sumatera Barat tahun 1971 sebesar 6,18, sedangkan nasional berada di angka 5,61. Fertilitas yang sangat tinggi tahun itu dapat dikaitkan dengan fenomena *baby boom* pasca kemerdekaan RI. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan fenomena *baby boom* belum memberikan pengaruh yang besar pada penambahan jumlah penduduk karena wilayah Indonesia yang masih sangat luas untuk dapat menampung penduduk saat itu. Namun, kondisi kelahiran yang tinggi ini terus berlangsung sehingga ledakan jumlah penduduk dari tahun ke tahun pun tidak dapat dielakkan. Efek dari fenomena



Sumber: Diolah berdasarkan data Sensus Penduduk (1971, 1980, 1990, 2000, 2010) dan SDKI (1991, 1994, 1997, 2002, 2007, 2012)

**Gambar 4** Tren TFR Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 1971-2012

*baby boom* di awal kemerdekaan RI masih berlanjut hingga beberapa dekade berikutnya sehingga TFR tahun 1971 masih tinggi. Pada tahun 1971 TFR Sumatera Barat sebesar 6,18 yang dapat diartikan bahwa rata-rata perempuan usia subur di Sumatera Barat mempunyai anak sebanyak 6 orang. Angka ini melebihi TFR nasional untuk tahun yang sama, yaitu sejumlah 5,61. Namun, berkat adanya program KB di Indonesia yang mulai dicanangkan sejak tahun 1970-an, TFR mulai mengalami penurunan.

Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan TFR dengan cepat di masa lalu berkaitan erat dengan berbagai faktor dan kebijakan, terutama kampanye program KB yang gencar mendidik masyarakat terkait pengaturan kelahiran (Hatmadji, et.al., 2010). Pelaksanaan program KB yang sentralistik telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan TFR hingga tingkat provinsi. Efek program KB juga terlihat dari penurunan TFR yang signifikan di Sumatera Barat, terutama tahun 1971 hingga tahun 1990. Kondisi TFR pada dua dekade ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan Program KB dengan pelaksanaan yang otoriter di masa pemerintahan presiden kedua RI, yaitu Soeharto, dengan kebijakan kependudukan yang berubah dari pronatalis menjadi antinatalis (Salim, et.al., 2015; Mantra, 2013; Hatmadji, et.al., 2010). Ketatnya pelaksanaan KB hingga ke daerah-daerah merupakan upaya serius pemerintah merespons tingginya jumlah kelahiran agar dapat menurunkan sekaligus menekan angka kelahiran.

Pada tahun 1971 TFR Sumatera Barat sebesar 6,18 turun menjadi 5,61 tahun 1980. Penurunan drastis terjadi tahun 1990 ke angka 3,89 meskipun masih berada di atas TFR nasional yang telah menyentuh angka 3,33. Studi fertilitas yang dilakukan oleh Latif (1985) memperlihatkan bahwa penurunan

TFR hingga tahun 1980 yang masih tergolong tinggi di Sumatera Barat karena adanya situasi fertilitas alami (*natural fertility*) di awal kampanye program KB. Fertilitas perempuan usia subur di Sumatera Barat bersifat alami karena perencanaan program KB belum populer di masyarakat. Namun, penurunan yang signifikan di dua dekade tersebut mengindikasikan bahwa dilihat dari komponen fertilitasnya, Sumatera Barat telah mengalami masa transisi demografi yang sebelumnya pun telah diawali dengan penurunan mortalitas.

Pakar demografi menyatakan bahwa setelah mengalami penurunan TFR yang signifikan sebagai indikasi terjadinya transisi demografi, penurunan TFR selanjutnya akan cenderung melambat hingga menyentuh angka 2,1 untuk setiap perempuan usia subur di daerah tersebut. Hal ini juga terjadi di Sumatera Barat, setelah mengalami penurunan TFR yang cepat selama dua dekade, TFR di tahun-tahun berikutnya cenderung melambat. TFR Sumatera Barat tahun 1994 sebesar 3,19 per perempuan usia subur kemudian terus mengalami penurunan secara lambat ke angka 3,06 tahun 1997 dan 2,95 tahun 2000. Perubahan rezim tahun 1998 membuat dukungan kelembagaan untuk program KB melemah (Salim, et.al., 2015). Perubahan kebijakan BKKBN yang desentralisasi memperlihatkan adanya kecenderungan terjadi lagi peningkatan TFR di Indonesia (Noveria, 2011). Dampak dari desentralisasi BKKBN tersebut turut menyebabkan meningkatnya TFR di Sumatera Barat, yaitu tahun 2002 hingga tahun 2007 TFR meningkat dari 3,20 ke 3,40 per perempuan usia subur. Kenaikan juga terjadi di tingkat nasional menjadi 2,60 yang bahkan stagnan hingga tahun 2012.

Pada 2010 TFR Indonesia dan Sumatera Barat bersama-sama mengalami penurunan. TFR Indonesia turun ke angka 2,41 dan

Sumatera Barat turun menjadi 2,91. TFR yang kembali mengalami penurunan merupakan suatu prestasi yang telah diraih oleh Sumatera Barat dan termasuk dalam lima besar provinsi di Indonesia yang mampu menurunkan TFR menjadi 2,80 per perempuan usia subur tahun 2012. Namun, apabila dibandingkan dengan TFR nasional, TFR Sumatera Barat masih tergolong tinggi. TFR Indonesia tahun 2012 telah mencapai angka 2,60 meskipun Indonesia dan Sumatera Barat sama-sama belum mampu mencapai target TFR sebesar 2,1 dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk stabil.

Studi fertilitas yang dilakukan oleh Iskarni (2012) di Sumatera Barat tahun 2010 memperlihatkan bahwa tingginya TFR disebabkan oleh meningkatnya penduduk usia subur sebesar 11 persen dari periode sensus penduduk sebelumnya, yaitu tahun 2000. Peningkatan tersebut memengaruhi jumlah pasangan usia subur yang mengalami peningkatan dan nantinya turut memengaruhi kenaikan jumlah pasangan yang bukan akseptor KB (*unmet need*) serta umur kawin pertama yang masih rendah. Angka fertilitas tertinggi banyak terdapat di daerah dengan kondisi geografis yang terpencil, tertinggal, perbatasan, pantai, dan kepulauan (*gaciltas*). Kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan pelaksanaan program KB tidak efektif. Adanya faktor-faktor yang memengaruhi tingginya fertilitas di tingkat kabupaten/kota akan berkontribusi pada rata-rata TFR provinsi.

Tren fertilitas Sumatera Barat menurun dari tahun 1971 sampai tahun 2012 meskipun masih tergolong tinggi dibandingkan dengan TFR nasional. Hal ini telah memengaruhi struktur umur penduduk Sumatera Barat yang dapat dilihat dari semakin berkurangnya bagian dasar piramida penduduk (lihat Gambar 1). Adapun jumlah penduduk 0-14 tahun (lihat

Tabel 1) yang terus bertambah merupakan kontribusi banyaknya perempuan usia subur kohor *baby boom* yang melahirkan anak. Proporsi penduduk muda di Sumatera Barat tahun 2015 sebesar 47,60 persen. UNDP (2013) menggambarkan kondisi demografi di suatu daerah yang akan mengalami periode bonus demografi apabila proporsi penduduk muda kurang dari 30 persen sehingga dilihat dari komponen fertilitas, Sumatera Barat tidak dapat memasuki fase bonus demografi.

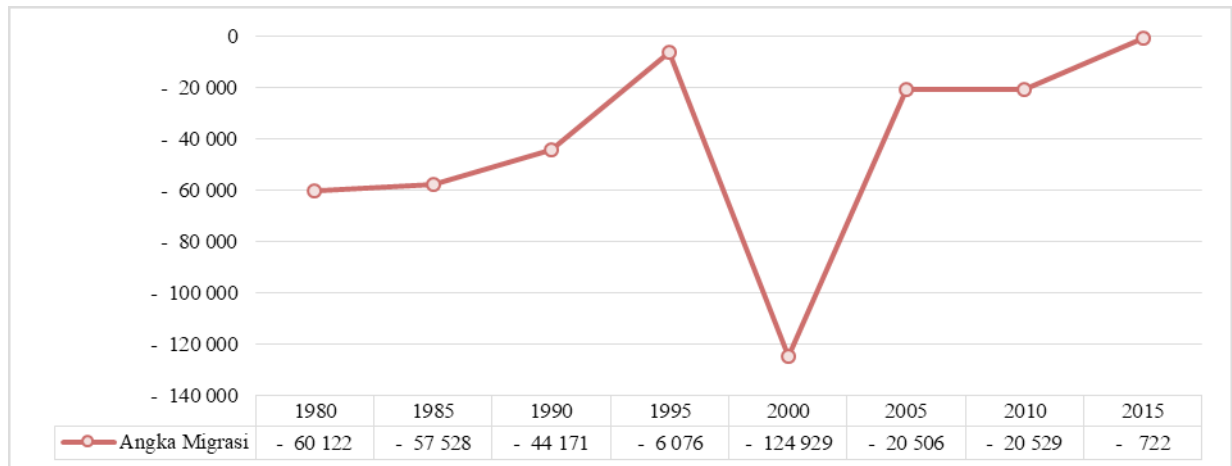
Tingginya tingkat fertilitas di Sumatera Barat yang mengakibatkan semakin bertambah banyaknya jumlah penduduk muda diperparah dengan penduduk umur produktif yang melakukan migrasi keluar daerah sehingga *dependency ratio* total penduduk masih berada di atas 50 per 100 penduduk produktif.

#### *Migrasi Penduduk*

Migrasi penduduk merupakan komponen demografi yang memberikan pengaruh lebih cepat pada proses dinamika penduduk dibandingkan dengan mortalitas dan fertilitas. Parameter migrasi yang digunakan adalah migrasi risen karena mencerminkan pergerakan spasial penduduk yang lebih dinamis dan terbaru. Pada Gambar 5 dapat dilihat tren migrasi neto risen penduduk Sumatera Barat.

Gambar 5 memperlihatkan data migrasi penduduk Sumatera Barat berada pada angka minus (-) di setiap periodenya. Angka minus ini dapat diartikan bahwa penduduk yang keluar provinsi lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat. Gambar 5 menunjukkan tren migrasi penduduk Sumatera Barat dari tahun 1980 hingga tahun 2015 berfluktuasi. Pada periode 1980 hingga 1995 grafik mengalami penurunan secara terus menerus dari 60.122

*Ketidaktercapaian Bonus Demografi:  
Pembelajaran dari Sumatera Barat*



Sumber: Diolah berdasarkan data Sensus Penduduk (1980, 1990, 2000, 2010) dan SUPAS (1985, 1995, 2005, 2015)

**Gambar 5** Tren Migrasi Neto Risen Penduduk Sumatera Barat Tahun 1980-2015

pada tahun 1980 menurun ke angka 57.528 tahun 1985 lalu turun ke angka 44.741 tahun 1990, dan penurunan drastis terjadi tahun 1995, yaitu menjadi 6.076 per 1.000 penduduk.

Migrasi neto risen tahun 1995 mengalami penurunan karena besarnya jumlah migran masuk ke Sumatera Barat hampir berimbang dengan penduduk yang bermigrasi keluar provinsi Sumatera Barat. Diketahui pada tahun 1995 jumlah migran risen yang masuk ke Sumatera Barat sebesar 138.531, sedangkan penduduk yang bermigrasi keluar Sumatera Barat berjumlah 144.607. Jumlah migran yang masuk ke Sumatera Barat tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,35 persen dari jumlah migran masuk tahun 1995. Meningkatnya jumlah migran yang masuk merupakan hal yang wajar karena Sumatera merupakan pulau kedua sebagai daerah tujuan para migran internal di Indonesia setelah Pulau Jawa.

Studi yang dilakukan oleh Leni (2016) mengungkapkan bahwa arus migrasi risen masih menunjukkan pola yang relatif sama,

yaitu terkonsentrasi di wilayah barat dan tengah Indonesia periode 1971 hingga 2010. Nugroho dan Pitoyo (2017) juga menambahkan bahwa meningkatnya migran yang masuk disebabkan oleh adanya daya tarik tersendiri bagi migran yang berasal dari daerah lain, terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pada tahun 2000 terjadi peningkatan tajam, yaitu migrasi neto yang sebelumnya berada di angka 6.076 bertambah menjadi 124.929. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak dari krisis moneter pada akhir orde Baru, yaitu tahun 1998. Pitoyo (1999) menuturkan bahwa saat itu terjadi kenaikan harga barang sehingga masyarakat cenderung berpikir pragmatis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sektor informal, seperti pedagang kaki lima, menjadi alternatif utama agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup. Masyarakat memilih sektor informal, seperti pedagang kaki lima, mengingat toko-toko besar dan supermarket menawarkan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat di

daerah-daerah memanfaatkan momentum tersebut untuk beralih ke mata pencaharian yang bergerak di sektor informal dan pindah menuju kota-kota besar.

Selain itu, penyebab peningkatan migrasi keluar tahun 2000 adalah meningkatnya pengangguran karena PHK sehingga sektor informal menjadi peluang satu-satunya yang dapat menyelamatkan kelangsungan hidup masyarakat. Sektor informal pada masa itu berperan sangat strategis sebagai katup pengaman pengangguran (Winarso dan Budi, 2013), bahkan mampu menyerap tenaga kerja selama masa pemulihan ekonomi di Indonesia periode 1998-2002 (Firnandy, 2008).

Pada tahun 2005 angka migrasi neto risen mengalami penurunan drastis menjadi 20.506. Penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2015, bahkan mencapai angka yang sangat rendah dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, yaitu 722 per 1.000 penduduk. Angka migrasi neto risen yang mengalami penurunan dapat menjadi indikasi bahwa Sumatera Barat telah menjadi salah satu tujuan migran yang berasal dari provinsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur ekonomi dan pendidikan yang selama ini menjadi faktor pendorong penduduk untuk migrasi keluar provinsi telah mengalami banyak perbaikan (BPS, 2015). Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan data provinsi dengan tren migrasi risen neto negatif tertinggi di Indonesia. Posisi Sumatera Barat mengalami penurunan dari urutan kelima tahun 1980 menjadi urutan ketujuh tahun 2010 (Nugroho dan Pitoyo, 2017).

Analisis yang dilakukan terhadap migrasi penduduk Sumatera Barat memberikan suatu kesimpulan bahwa secara keseluruhan, Sumatera Barat termasuk ke dalam provinsi yang konsisten sebagai pengirim migran, baik itu migran seumur hidup maupun migran risen. Oleh karena itu, pengaruh migrasi

terhadap jumlah penduduk di Sumatera Barat adalah tidak bertambahnya secara signifikannya proporsi penduduk usia produktif. Sebagaimana yang dijelaskan Mantra (2013), banyak penduduk Sumatera Barat melakukan migrasi ke luar provinsi sehingga memengaruhi piramida penduduk di sekitar kelompok umur dewasa (penduduk umur produktif). Kondisi ini dilatarbelakangi secara kuat oleh adanya tradisi merantau masyarakat Sumatera Barat yang berasal dari suku Minangkabau.

Merantau pada mulanya merupakan dampak dari struktur sosial yang fungsional dalam adat Minangkabau (Naim, 2013). Adapun tujuan merantau disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- a. Faktor budaya, yaitu tradisi orang Minangkabau akibat dari kedudukan dan struktur sosial laki-laki dalam masyarakat. Laki-laki Minangkabau mengalami dilema karena di rumah istri hanya dianggap sebagai tamu (*sumando*) yang dihormati, tetapi tanpa hak dan kekuasaan. Sementara itu, di rumah ibu (orang tua laki-laki), suami tersebut didudukkan sebagai *mamak* dan pengawal keluarga tanpa hak untuk menikmati hasil sawah ladang yang dapat dibawa ke rumah istrinya. Anak laki-laki juga didorong untuk meninggalkan rumah sejak muda. Di rumah, anak laki-laki tidak diperlakukan sama seperti anak perempuan. Anak laki-laki tidur di surau dan belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang sukar di kemudian hari. Dorongan merantau dipersiapkan secara berangsur-angsur sejak muda. Adanya tuntutan adat sebagaimana dalam pepatah adat *Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampuang paguno alun*. Pepatah tersebut dimaknai bahwa remaja laki-laki di Minangkabau,

terutama yang belum menikah, tidak mempunyai peranan apapun dalam adat karena dianggap belum berpengalaman sehingga dianjurkan untuk merantau terlebih dulu agar dapat bermanfaat di masyarakat nantinya.

- b. Faktor geografi, yaitu kondisi alam Minangkabau dengan tanah yang subur karena terletak di sepanjang Bukit Barisan cocok digunakan untuk lahan pertanian dan hampir seluruh masyarakat menyibukkan diri dengan kegiatan pertanian. Hanya di Kota Padang dan beberapa kota lainnya di Sumatera Barat yang penduduknya bekerja di sektor nonpertanian, seperti berdagang dan beberapa perkantoran. Orang-orang pedalaman Minangkabau (perdesaan Sumatera Barat) membawa hasil pertanian ke kota-kota di Sumatera Barat, bahkan ke luar provinsi. Keadaan ini yang menciptakan situasi bahwa dunia luar tidak mendatangi Minangkabau, tetapi orang Minangkabaulah yang harus pergi ke dunia luar.
- c. Faktor ekonomi, yaitu faktor yang dianggap sebagai muara dari faktor budaya dan geografis tadinya. Hal ini disebabkan oleh budaya yang melatarbelakangi seseorang untuk merantau serta didukung oleh faktor alam dan langgengnya penghargaan yang diberikan orang sekitar terhadap perantau yang bekerja sebagai pedagang, terlebih lagi apabila orang tersebut sukses di rantau.
- d. Faktor pendidikan, yaitu anak laki-laki dianjurkan keluar dari rumah dan tidur di mesjid untuk menuntut ilmu agama pada zaman dulunya. Kemudian hal itu berkembang tidak hanya untuk ilmu agama saja, tetapi berbagai ilmu pengetahuan. Namun, hanya terbatas pada anak-anak pembesar setempat, pegawai negeri yang terhormat, ataupun pedagang kaya yang ingin meningkatkan pendidikan anaknya

ke tingkat yang lebih tinggi. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pendidikan telah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian konsep asal dari merantau itu adalah mencari ilmu dan pengalaman untuk mempersiapkan diri agar dapat hidup berguna di kampung sesudah kembali dari rantau. Tempat menimba itu dalam bahasa Sansekerta dilafazkan sebagai 'rantau'.

Menurut Taher (2005), penduduk Sumatera Barat yang berada di rantau (daerah tujuan migrasi) mencapai 70 persen. Hal ini mengingatkan bahwa penduduk yang bermigrasi tersebut tidak kembali, bahkan banyak dari para migran yang memanggil kerabat lainnya untuk merantau. Namun, perkembangan merantau saat ini cenderung dilatarbelakangi oleh tuntutan kehidupan yang tidak lagi dapat terpenuhi jika hanya berada di kampung halaman. Berbeda dari tujuan dasar merantau pada zaman dulunya yang merupakan *ritme de passage*, yaitu sebagai sebuah ritual kehidupan (Naim, 2015). Hal ini tergambar dari kondisi merantau yang ditujukan untuk anak laki-laki sejak muda, berangsur-angsur dari surau, ke kota terdekat, dan daerah yang lebih jauh lagi dengan potensi kehidupan yang lebih menguntungkan. Saat ini nilai merantau kian memudar karena tidak hanya laki-laki, penduduk perempuan pun juga banyak yang merantau. Kondisi tersebut dapat dilihat dari proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di piramida penduduk Sumatera Barat pada Gambar 1 yang menunjukkan tidak terlalu besar perbedaan di antara kedua jenis kelamin tersebut. Pada awalnya kelompok perantau perempuan dilatarbelakangi oleh alasan ikut suami atau orang tua, tetapi saat ini telah berkembang dengan adanya dorongan untuk meningkatkan pendidikan dan kehidupan (Noveria, 2011).

Di sisi lain, migrasi penduduk Sumatera Barat yang selalu menunjukkan angka minus telah menyebabkan adanya pengurangan penduduk usia produktif di setiap periodenya. Piramida penduduk dari tahun 1971 sampai tahun 2015 memang menunjukkan adanya pembengkakan pada kelompok penduduk usia produktif, tetapi pertambahan tersebut tidak signifikan (lihat Gambar 1). Sebagai contoh, proporsi penduduk umur 10-14 tahun 1990 mengalami pengurangan tahun 2000 (dapat dilihat di kelompok 20-24 tahun 2000) dan pengurangan ini juga terjadi pada dekade berikutnya.

Berdasarkan proyeksi *dependency ratio* tahun 2010-2035 oleh BPS dan asumsi dari Kominfo (2014), Sumatera Barat tidak akan meraih bonus demografi karena fenomena migrasi keluar yang dilatarbelakangi oleh tradisi merantau. Data migrasi neto menunjukkan bahwa jumlah migran keluar selalu melebihi migran masuk sehingga menghasilkan angka migrasi neto yang konsisten minus di setiap periode. Banyaknya penduduk produktif yang bermigrasi keluar daerah menyebabkan proporsi penduduk produktif tidak mengalami penambahan yang signifikan.

Deskripsinya adalah banyaknya penduduk muda/belum produktif (0-14 tahun) yang harus ditanggung tidak diimbangi dengan peningkatan penduduk produktif (15-64 tahun). Akibatnya, *dependency ratio* Sumatera Barat masih tinggi (>50 per 100 penduduk produktif). Kondisi kependudukan yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan Sumatera Barat tidak dapat meraih bonus demografi.

## Kesimpulan

Proses demografi yang berlangsung telah menyebabkan Sumatera Barat tidak dapat meraih bonus demografi. Tingkat fertilitas

yang masih tinggi, bahkan masih berada di atas TFR nasional serta banyaknya jumlah perempuan usia subur dari kohor *baby boom* turut berkontribusi menambah jumlah penduduk usia muda. Sementara itu, tren migrasi penduduk selalu menunjukkan angka minus di setiap periode sehingga penduduk usia produktif di Sumatera Barat tidak mengalami penambahan yang signifikan. Kedua komponen tersebut menyebabkan *dependency ratio* penduduk Sumatera Barat masih berada di atas angka 50 sehingga tidak dapat mencapai fase bonus demografi kurun waktu 2010-2035.

## Daftar Pustaka

- Alfana, M. A. F., Hanif, W. A. N. P., dan Iffani, M. 2015. "Mortalitas di Indonesia: Sejarah Masa Lalu dan Proyeksi ke Depan". Naskah pada *Seminar Nasional dan PIT IGI XVIII*, Jakarta.
- Ananta, A. 1997. "Peran Analisis Demografi dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Indonesia", dalam *Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan, dan Pelaksanaan*, diedit oleh Anwar, M. A. Jakarta: FE UI.
- Asmanedi dan Wiyono, N. H. 2007. "Struktur dan Persebaran Penduduk". *Bahan Presentasi Training Dasar-dasar Demografi Angkatan I*. Jakarta.
- Bloom, D. E., Canning, D., dan Rosenberg, L. 2011. "Demographic Change and Economic Growth in South Asia", *PGDA Working Paper*, (67), Hlm. 1-21.
- Bloom, D. E. dan Canning, D. 2011. "Demographic and Development Policy", *PGDA Working Paper*, (66), hlm. 1-6.
- Dinas Kesehatan Sumatera Barat. 2014. *Profil Kesehatan 2014 Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Sumatera Barat.



- Firmandy. 2008. "Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan". <https://www.bappenas.go.id/>. Diakses pada 25 Februari 2018.
- Hatmadji, S. H., Adioetomo, S. M., Toersilaningsih, R., Wisana, ID. G. K. 2010. "Fertilitas" dalam *Dasar-dasar Demografi Edisi 2*, diedit oleh Adioetomo, S. M. dan Samosir, O. B. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskarni, P. 2012. "Fertilitas Provinsi Sumatera Barat: Analisis Data Sensus Tahun 2012", *Laporan Penelitian*, Padang: PSKLH dan BKKBN.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2014. *Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Latif, A. 1985. "Pengaruh Pendidikan Wanita terhadap Fertilitas di Perdesaan Sumatera Barat". *Tesis*. UGM.
- Leni, H. 2016. "Analisis Mobilitas Penduduk Indonesia berdasarkan Data Sensus Penduduk 1971-2010". *Tesis*. UGM.
- Mantra, I. B. 2013. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martono, N. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif. Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Naim, M. 2015. "Budaya Merantau Orang Minang". *Seminar Merantau*. Singapore: Singapore-Minangkabau Association.
- . 2013. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noveria, M. 2011. *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*. Jakarta: LIPI Press.
- Nugroho, S. dan Pitoyo, A. J. 2017. "Arus Migrasi Risen di Indonesia Tahun 1980-2010", *Bumi Indonesia*, 6 (4), hlm. 1-9.
- Nurritzka, R. H. dan Saputra, W. 2013. "Arah dan Strategi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia", *Prakarsa Working Papers*, 2013 (01), hlm. 1-19.
- Pitoyo, A. J. 1999. "Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis", *Populasi*, 10 (2), hlm. 73-97.
- Salim, E., Adioetomo, S. M., Nizam., Arifin, A. N., dan Pratama, A. 2015. *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: UNFPA.
- Siswono, E. 2015. *Demografi*. Yogyakarta: Ombak (IKAPI).
- Taher, E. P. 2005. "Rumah Gadang Riwayatmu Kini", dalam *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, diedit oleh Noveria, M.. Jakarta: LIPI Press.
- United Nations Children's Fund. 2012. *Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: UNFPA.
- United Nations Population Division. 2013. *World Population Prospects: The 2003 Revision*. New York: United Nations.
- Winarso, H. dan Budi, G. 2013. "Sektor Informal yang Terorganisasi: Menata Kota untuk Sektor Informal". <http://tataruang.bpn.go.id/bulletin/>. Diakses pada 25 Februari 2018.
- Wongboonsin, K. dan Phiromswad, P. 2016. "Demographic Dividend, Human Capital, and Poverty Reduction". <http://www.un.org/esa/> Diakses pada 8 Januari 2017.

**Komunikasi Interpersonal antara Orang Tua dan Anak Remaja serta Identitas Diri Remaja: Studi di Bina Keluarga Remaja Parupuk Tabing, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat**

Agus Irianto, Hasdi Aimon, Herman Nirwana, dan Agung Tri Prasetya

Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, Sumatera Barat

Korespondensi: Agus Irianto (*e-mail*: prof.agus.irianto@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan komunikasi interpersonal antara orang tua dengan anak remajanya serta ketercapaian identitas remaja guna pembinaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh petugas dan konselor. Metode yang digunakan merupakan bagian dari pengembangan model ADDIE. Penyusunan tes melibatkan tiga ahli serta pelaksanaannya dibantu oleh Pembina BKR dan konselor. Instrumen yang digunakan berbentuk pertanyaan dan pengukuran kepribadian yang menggunakan Skala Likert. Analisis data dilakukan dengan deskripsi dan hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat komunikasi antara orang tua dan anak remajanya masih sedang dan cenderung rendah. Tingkat kelayakan materi berada pada kategori sangat layak. Untuk itu, perlu dikembangkan modul yang dapat digunakan oleh orang tua dan anak remajanya yang dapat membentuk komunikasi interpersonal efektif antara orang tua dan anak remajanya.

**Kata kunci:** komunikasi interpersonal, ketercapaian identitas, Bina Keluarga Remaja

**Interpersonal Communication between Parents and Adolescents and Identity of Yourself: Study at Development Cadres Family Teen of Parupuk Tabing, Koto Tangah, Padang, West Sumatera**

**Abstract**

This research aims to describe interpersonal communication between parent and child for adolescence identity achievement to be used by Community Development Cadres Family Teen (BKR) or counselor. The method used was part of ADDIE model development. The properness test was done by three experts and the practicality test done by Community Development Cadres Family Teen (BKR) or counselor. The instruments used Likert Scale and questionnaire. The data gathered in this research was analyzed by using descriptive statistic analysis. Based on these result, there is a low level of communication between parent and child for adolescence identity achievement. The feasibility level of the component is in a very viable category. The conclusion was that the module developed was appropriate and could be used to help parent and child to improved their effective interpersonal communication for adolescence identity achievement.

**Keywords:** interpersonal communication, identity achievement, Community Development Cadres Family Teen

## **Pendahuluan**

Masa remaja merupakan suatu masa atau periode penentu untuk periode dewasa. Dalam periode ini tampak perubahan demi perubahan yang begitu mencolok dan pesat, baik dari segi fisik maupun psikis, sehingga individu tersebut tidak dapat dikatakan anak-anak, tetapi belum juga dapat dikatakan dewasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwono (2001:51) yang menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, bukan hanya dalam artian psikologis, tetapi juga dalam artian secara fisik. Perubahan fisik yang terjadi itulah yang menjadi gejala primer dalam pertumbuhan remaja, sedangkan perubahan psikologis muncul, antara lain, sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik itu.

Selain terjadi perubahan dan batas usia itu tentunya pada masa remaja ini tidak terlepas dari tahap-tahap perkembangan secara psikologis yang harus dilalui dengan baik. Erikson (dalam Marcia, 1980) menjelaskan bahwa remaja berada dalam tahap perkembangan dengan adanya dikotomi kondisi, yaitu kondisi ikatan identitas melawan kondisi kebingungan peran (identitas). Lebih jauh Erikson menjelaskan bahwa dalam kehidupan sepanjang hayat yang dilalui manusia, terdapat delapan tahap perkembangan psikologi sosial yang harus dilalui manusia dan di setiap tahap itu terdapat dua kondisi yang berlawanan, Hidayat (2011) menjelaskan kondisi yang berlawanan ini memiliki makna berupa *impact* dari kondisi sosial yang ada di sekitar manusia tersebut. Secara tegas, disebutkan bahwa kondisi yang berlawanan tersebut akan menjadi kekuatan dasar yang akan memengaruhi perkembangan kepribadian manusia hingga akhir hayatnya.

Delapan tahap perkembangan psikososial menurut Erikson (dalam Hall dan Lindzey, 2004) adalah sebagai berikut:

1. kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar (0 – 1 tahun)
2. otonomi versus rasa malu-malu (1 – 3 tahun)
3. inisiatif versus rasa bersalah (3 – 5 tahun)
4. kerajinan versus inferioritas (5 – 11 tahun)
5. ikatan identitas versus kebingungan peran (12 – 18 tahun)
6. intimasi versus isolasi (18 – 35 tahun)
7. *generativity* versus stagnasi (35 – 55 tahun)
8. intergritas ego versus keputusasaan (lebih dari 55 tahun)

Kemudian Ahman (dalam Supriatna, 2011) menjelaskan terdapat tiga faktor dominan yang memengaruhi proses perkembangan remaja, yaitu faktor pembawaan (*heredity*), faktor lingkungan (*environment*), dan faktor waktu (*time*). Dalam melewati tahap perkembangan tersebut, seorang remaja pastinya membutuhkan lingkungan sebagai landasan empiris perkembangannya. Lingkungan yang mendukung dan mendorong perkembangan remaja tentu saja akan menyebabkan tahap perkembangan remaja menjadi ikatan identitas. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung akan mengarahkan perkembangan psikososial remaja ke arah kebingungan peran atau krisis identitas.

Secara umum, lingkungan rumah merupakan lingkungan yang sangat memengaruhi perkembangan remaja. Remaja sebagai anak di rumah mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang banyak dari orang tua sebagai pendidik dan pengarah di rumah. Semua aspek harus ditanamkan ke

dalam diri anak, seperti budaya, kepribadian, dan interaksi. Selain itu, rumah juga merupakan bagian dari pendidikan karena merupakan lingkungan pendidikan (*environment of educational*). Dalam hal ini, rumah menjadi tempat subjek-subjek dalam rumah, seperti ayah, ibu, dan anak, melakukan fungsi dan kewajiban mereka, seperti yang disampaikan Notoatmodjo (dalam Supriatna, 2011: 29).

Orang tua merupakan pengasuh dan manajer anak di dalam keluarga. Banyak perilaku yang dimunculkan oleh anak bersumber dari orang tuanya. Dalam teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura (1986), dijelaskan bahwa seorang anak adalah *bobo doll* (boneka yang meniru suara) dari perilaku orang tuanya. Ini berarti pengaruh orang tua terhadap anaknya sangat besar. Selain itu, ada banyak temuan tentang perubahan kondisi keluarga terhadap tercapainya tugas perkembangan anak, seperti penelitian Hetherington dan Stanley-Hagan (2002) yang menemukan bahwa 40 persen dari anak-anak di Amerika yang orang tuanya mengalami perceraian kelak akan mengalami perceraian juga dalam pernikahannya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua merupakan pengasuh, manajer, dan guru yang memberikan pengaruh besar terhadap anak, sedangkan hilangnya pengaruh yang baik akan mengakibatkan remaja kehilangan identitas.

Dariyo (2004) menjelaskan bahwa orang tua yang komunikatif merupakan salah satu ciri yang akan membantu perkembangan anak untuk mencapai identitas diri dengan baik. Komunikasi yang kurang baik antara orang tua dan anak dapat mengakibatkan perilaku negatif pada anak. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan antarpribadi. Saad (2003) mengungkapkan bahwa kualitas

hubungan antarpribadi akan memberi pengaruh yang besar terhadap perilaku individu, terutama anak dan remaja.

Lebih lanjut Rakhmat (Saad, 2003) mengungkapkan bahwa hubungan dengan orang tua seyogianya diwarnai oleh prinsip saling menjalin komunikasi dan membangun relasi yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang sehat. Menurut Papalia dan Feldman (2014), perkembangan yang penting untuk diketahui orang tua mencakup aspek psikososial, yang terdiri atas etnik, identitas, hubungan antarsebaya, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan orang tua kandung, anti sosial, dan kenakalan remaja.

Pemerintah juga memiliki perhatian yang besar terhadap perkembangan remaja karena remajalah yang akan menjadi generasi penerus. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya program Bina Keluarga Remaja (BKR). BKR merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan peningkatan kualitas remaja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dalam pengelolaan programnya didasarkan pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/2012. Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya sumber daya manusia potensial melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua dalam keluarga. Selain itu, adanya program BKR ini diharapkan dapat mengatasi meningkatnya kecenderungan perilaku seks bebas di kalangan remaja. Namun, BKR dilaksanakan situasi ketika media sosial

sangat populer di kalangan remaja. Selain itu, curahan hati remaja cenderung dilakukan kepada teman dekat dibandingkan dengan kepada orang tuanya.

Dewantara (2010) menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal yang bagus antara orang tua kepada anaknya menyebabkan berkurangnya kenakalan remaja. Sejalan dengan itu, Bintoro (2016) juga meneliti tentang pola komunikasi interpersonal keluarga, motivasi berprestasi, dan prestasi belajar remaja. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengorelasikan ketiga variabel tersebut dan menemukan bahwa komunikasi interpersonal keluarga menjadi faktor penentu karena variabel ini mampu memengaruhi dua variabel lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak menjadi fungsi vital dalam perkembangan kepribadian remaja. Penelitian itu juga menekankan bahwa komunikasi interpersonal orang tua dan anak menjadi aspek sentral perkembangan kepribadian remaja.

Kusumaningrum (2012) yang meneliti tentang hubungan komunikasi orang tua-anak dengan ketercapaian identitas remaja akhir menemukan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara dua variabel tersebut. Jika dilihat dari variabel yang diteliti, penelitian ini dapat dijadikan riset terkait pentingnya model komunikasi interpersonal yang efektif bagi orang tua dalam membantu remaja mencapai *identity achievement*. Hasil penelitian Soldatova (2013) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi kondisi identitas diri remaja, yaitu dukungan sosial keluarga, berupa komunikasi, motivasi, dan dukungan adaptasi. Kesesuaian penelitian ini berada pada variabel identitas ego dan temuan-temuan berupa faktor yang memengaruhi tercapainya kondisi identitas ego yang baik. Agnes (2009) yang meneliti

tentang pencapaian identitas diri remaja menemukan bahwa kondisi orang tua, entah orang tua kandung atau angkat atau tiri, tidak memengaruhi secara langsung pencapaian identitas.

Berdasarkan masalah yang terjadi, peneliti tertarik untuk mendeteksi komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak dalam pencapaian identitas diri remaja. Hasil deteksi tersebut akan menggambarkan konten mana yang harus mendapat penekanan atau penguatan untuk mengembangkan media pembelajaran berupa modul agar dapat digunakan oleh petugas BKR atau konselor dalam memberikan pelayanan. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa dengan menggunakan modul, anggota BKR dalam hal ini orang tua dan anak/remajanya dapat melakukan kegiatan belajar sendiri tanpa kehadiran pengajar (petugas BKR/kader/konselor) secara langsung. Dengan kata lain, anggota BKR dapat belajar mandiri dan aktif sehingga diharapkan memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang baru sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media modul ini juga sering disebut bahan instruksional mandiri karena petugas BKR/konselor tidak harus secara langsung memberi pelajaran atau mengajarkan sesuatu kepada para anggota BKR dengan tatap muka, tetapi cukup dengan memberikan modul.

Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti ingin mengembangkan modul komunikasi interpersonal yang efektif serta memfokuskan pada penguasaan pengetahuan dan pemahaman yang dibutuhkan oleh anggota BKR. Peneliti sangat mengharapkan produk yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan dalam praktik pelayanan konseling. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dirancang untuk mencapai tujuan pengembangan sebagai berikut. Pertama, menghasilkan pokok-pokok materi yang akan

mewarnai modul komunikasi interpersonal yang efektif bagi orang tua dan anak dalam pencapaian identitas diri remaja yang layak secara isi. Kedua, mendeskripsikan tingkat keterpakaian modul komunikasi interpersonal yang efektif bagi orang tua dan anak dalam pencapaian identitas diri remaja oleh kader BKR atau konselor.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*research & development*). Prosedur pengembangan yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah pengembangan menurut model ADDIE yang meliputi *Analyze, Design, Development, Implementation*, dan *Evaluation* (Branch, 2009: 2). Kegiatan pengembangan produk yang dilakukan peneliti ini hanya sampai pada tahap uji kelompok kecil atau uji keterpakaian produk oleh kader BKR atau konselor. Subjek uji coba dalam penelitian ini terdiri atas tenaga ahli dalam bidang bimbingan dan konseling untuk melakukan uji kelayakan terhadap produk dan tenaga praktisi, yaitu kader BKR atau konselor untuk menilai uji keterpakaian dari produk yang telah dirancang. Sasaran penelitian adalah BKR di Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang yang berjumlah 30 keluarga.

Tahapan penelitian diawali dengan menetapkan sampel penelitian melalui survei kasus yang ada di BKR seluruh Kota Padang. Berdasarkan survei ditemukan adanya kasus yang perlu pembinaan khusus, yaitu pada kelompok BKR di Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Dari 30 keluarga yang ada, ditetapkan 11 keluarga dengan jumlah 15 orang remaja yang memiliki kasus terkait komunikasi interpersonal dan pencapaian identitas diri remaja. Selanjutnya peneliti menyusun instrumen

dalam bentuk kuisioner dengan Skala Likert dan menganalisis secara kuantitatif kondisi komunikasi interpersonal orang tua dan anak serta kondisi identitas diri remaja yang ada di BKR Parupuk Tabing. Diketahui bahwa instrumen yang digunakan pada uji tingkat validitas (*item analysis*) dan reliabilitasnya (Cronbach's Alpha) dinyatakan valid per *item* dan reliabel (0,714).

Hasil analisis tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan desain modul komunikasi interpersonal orang tua dan anak yang efektif serta pencapaian identitas diri remaja optimal. Setelah materi didesain, diuji kelayakannya oleh ahli untuk dapat dikembangkan menjadi modul.

### Pembahasan

Hasil penyekoran identitas diri dan komunikasi orang tua dengan anak remajanya dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa skor identitas diri remaja yang tidak tercapai, khususnya adalah pada aspek *identity achievement*. Walaupun ada yang memperoleh nilai sangat tercapai, nilai maksimal belum tercapai dan jumlahnya masih sedikit. Pada total skor terlihat bahwa tingkat ketercapaiannya antara 61,07 sampai dengan 67,6 pada tiga aspek. Sementara itu, komponen yang satunya lagi masih sangat rendah. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka masih perlu penanganan yang serius melalui pembuatan modul yang menyentuh seluruh komponen identitas diri remaja sehingga tingkat ketercapaian seluruh komponen menjadi tinggi (di atas 90)

Tabel 2 menjelaskan bahwa komunikasi orang tua dan anak remajanya sangat memprihatinkan karena seluruh komponen masih pada tingkat sedang. Walaupun ada yang mencapai tingkatan baik, hanya satu

**Tabel 1 Skor Identitas Diri Remaja**

<i>Resp.</i>	<i>Identity Achievement</i>		<i>Moratorium</i>		<i>Foreclosure</i>		<i>Identity Diffusiion</i>	
1	36	Tdk tercapai	54	sedang	84	Sangat tercapai	46	sedang
2	42	Sedang	50	sedang	80	tercapai	48	sedang
3	46	Sedang	54	sedang	58	sedang	80	tercapai
4	46	Sedang	50	sedang	80	tercapai	58	sedang
5	36	Tdk tercapai	48	sedang	52	sedang	80	tercapai
6	46	Sedang	82	Sangat tercapai	68	er capai	52	sedang
7	48	Sedang	82	Sangat tercapai	52	sedang	50	sedang
8	38	Tdk tercapai	58	sedang	88	Sangat tercapai	62	tercapai
9	38	Tdk tercapai	46	sedang	46	Sedang	82	Sangat tercapai
10	40	Tdk tercapai	82	Sangat tercapai	58	Sedang	62	tercapai
11	46	Sedang	82	Sangat tercapai	62	tercapai	66	tercapai
12	24	Tdk tercapai	48	sedang	50	Sedang	86	Sangat tercapai
13	42	Sedang	54	sedang	70	tercapai	80	baik
14	40	Tdk tercapai	60	sedang	84	sangat tercapai	58	sedang
15	38	Tdk tercapai	66	tercapai	82	sangat tercapai	60	sedang
Total	40,40	Tidak tercapai	61,07	Tercapai	67,60	Tercapai	64,67	Tercapai

Sumber: Olahan Data Primer, 2018

yang mencapai sangat baik pada komponen kesamaan. Jika tingkat komunikasi ini tidak dibenahi, maka kondisi itu akan menghambat hubungan baik antara orang tua dan anak remajanya yang semakin banyak dipengaruhi oleh IT dan media sosial.

Penilaian terhadap identitas diri remaja menunjukkan bahwa aspek tingkat ketidaktercapaian masih memprihatinkan. Hal itu, terutama untuk *identity achievement* dengan persentase 26,67 persen yang dinyatakan sangat tidak tercapai dan kriteria ketercapaian

**Tabel 2 Skor Komunikasi Orang Tua dan Anak Remaja**

Resp.	Keterbukaan		Perilaku Positif		Empati		Perilaku Sportif		Kesamaan	
1	44	Sedang	50,0	sedang	67,5	baik	80,0	baik	68,0	baik
2	64	Baik	60,0	sedang	62,5	baik	63,3	baik	44,0	sedang
3	52	Sedang	26,7	tidak baik	40,0	tidak baik	40,0	tidak baik	48,0	sedang
4	60	Sedang	66,7	Baik	67,5	baik	60,0	sedang	64,0	baik
5	48	Sedang	53,3	sedang	55,0	sedang	46,7	sedang	48,0	sedang
6	56	sedang	60,0	sedang	57,5	sedang	73,3	baik	40,0	tidak baik
7	56	sedang	46,7	sedang	52,5	sedang	60,0	sedang	68,0	baik
8	64	baik	63,3	baik	60,0	sedang	76,7	baik	92,0	sangat baik
9	64	baik	56,7	sedang	67,5	baik	60,0	sedang	68,0	baik
10	64	baik	53,3	sedang	55,0	sedang	46,7	sedang	52,0	sedang
11	60	sedang	56,7	sedang	42,5	sedang	50,0	sedang	40,0	tidak baik
12	40	tidak baik	53,3	sedang	30,0	tidak baik	40,0	tidak baik	32,0	tidak baik
13	28	tidak baik	40,0	tidak baik	35,0	tidak baik	40,0	tidak baik	44,0	sedang
14	52	sedang	70,0	baik	70,0	baik	63,3	baik	68,0	baik
15	56	sedang	56,7	sedang	60,0	sedang	70,0	baik	56,0	sedang
Total	53,9	sedang	54,2	sedang	54,8	sedang	58,0	sedang	55,5	sedang

Sumber: Olahan Data Primer, 2018

*identity achievement* yang tidak tercapai 44,67 persen, serta belum ada yang masuk dalam kriteria tercapai maupun sangat tercapai. Aspek *moratorium*, *foreclosure*, dan *identity diffusion* masih didominasi oleh tingkat cukup tercapai. Angka-angka tingkat ketercapaian dapat dilihat pada Tabel 3.

Sementara itu, hasil penumpulan data dari lima komponen komunikasi, yaitu keterbukaan, perilaku positif, empati, perilaku sportif, dan kesamaan, menunjukkan bahwa komponen

keterbukaan dan perilaku positif dari komunikasi antara orang tua dan anak remaja sangat memprihatinkan. Dari kedua komponen tersebut tidak ada yang dalam kondisi sangat baik atau nol persen. Dominasi tingkat penilaian terletak di tingkat sedang antara 33,33 persen sampai 50 persen. Oleh karena itu, perlu pembinaan yang lebih serius, terutama pada komponen keterbukaan dan perilaku positif. Angka klasifikasi dan persentase tingkat komunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.



*Komunikasi Interpersonal antara Orang Tua dan Anak Remaja serta  
Identitas Diri Remaja: Studi di Bina Keluarga Remaja Parupuk Tabing,  
Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat*

**Tabel 3 Identitas Diri Remaja**

Kriteria	Identity Achievement	Moratorium	Foreclosure	Identity Diffusion
Sangat Tercapai	0,00	12,00	18,67	16,67
Tercapai	0,00	18,67	24,67	20,00
Cukup Tercapai	28,67	36,67	35,33	35,33
Tidak Tercapai	44,67	28,00	18,67	26,00
Sangat Tidak Tercapai	26,67	4,67	2,67	2,00
Total	100	100	100	100

Sumber: Olahan Data Primer, 2018

**Tabel 4 Komunikasi Orang Tua dan Anak Remaja**

Kriteria	Keterbukaan	Perilaku Positif	Empati	Perilaku Supoportif	Kesamaan
Sangat Baik	0,00	0,00	5,00	6,67	8,00
Baik	16,00	14,44	15,83	21,11	16,00
Sedang	45,33	50,00	38,33	37,78	33,33
Tidak Baik	30,67	27,78	30,00	24,44	30,67
Sangat Tidak Baik	8,00	7,78	10,83	10,00	12,00
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Olahan Data Primer, 2018

**Tabel 5 Uji Keterpakaian Komponen tentang Identitas Diri dan Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak**

No	Komponen	Skor Ahli		Skor ahli	∑ Skor ideal	%	Kategori
		A	B				
1.	Identitas diri ( <i>Identity Achievement, Moratorium, Foreclosure, Identity Diffusion</i> )	18	17	35	40	87,5	SL
2	Komunikasi Interpersonal yang efektif (keterbukaan, perilaku positif, empati, perilaku suportif, kesamaan)	17	17	34	40	85	SL

Keterangan: SL (Sangat Layak)

Sumber: Olahan Data Primer, 2018

Selanjutnya data yang telah dipaparkan tersebut dijadikan pokok pikiran desain modul komunikasi interpersonal yang efektif bagi orang tua dan anak untuk pencapaian identitas diri remaja. Data statistik uji keterpakaian komponen modul oleh ahli dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan uji keterpakaian komponen identitas diri yang terdiri atas aspek *identity achievement*, *moratorium*, *foreclosure*, dan *identity diffusion*, dinilai bahwa keseluruhan aspek tersebut perlu dijadikan sebagai landasan pengembangan media berupa modul yang akan digunakan dalam program BKR untuk pengembangan identitas diri remaja. Sejalan dengan itu, komponen komunikasi interpersonal orang tua dan anak dengan aspek keterbukaan, perilaku positif, empati, dan perilaku suportif juga dinilai dapat mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal orang tua dan anak di kelompok BKR.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa identitas diri remaja masih belum memperoleh ketercapaian yang tinggi, demikian pula dengan komunikasi orang tua dengan anak/remajanya yang masih sangat tidak baik. Sementara itu, tingkat keterpakaian materi modul komunikasi interpersonal orang tua dan anak, serta identitas diri berada pada kategori sangat layak. Kedua komponen ini memerlukan modul yang memuat pembinaan seluruh komponen identitas diri remaja dan komunikasi antara orang tua dan anak/remajanya.

## Daftar Pustaka

Agnes, Yurika. 2012. "Pencapaian Identitas Diri pada Remaja yang Memiliki Ibu Tiri". *Jurnal Ilmiah Psikologi UG Jurnal Vol 5 No 2*.

- Bandura, A. 1986. *Social Foundations of Thought and Action*. Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bintoro, Fachrudin Rahmat. 2016. "Pola Komunikasi Interpersonal Keluarga, Motivasi berprestasi dan Prestasi Belajar". *Jurnal Komnas Vol 1 No 18*.
- Branch, Robert Maribe. 2009. *Instructional Design: The ADDIE Approach*. New York: Springer Science and Business Media, LLC.
- Dariyo, Agoes. 2004. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Dewantara, Apri Catur. 2010. "Pengaruh Kualitas Komunikasi Orang Tua dengan Anak dan Lingkungan Pergaulan terhadap Kenakalan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Delanggu". *Indegenous Vol 2 No 1*.
- Hall, Calvin S. dan Gardner Lindzey. 1993. *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*. Editor A. Supratikya. Yogyakarta: Kanisius.
- Hetherington, E. M and M. Stanley-Hagan. 2002. "Parenting in Divorced and Remarried Families, in M. Bornstein (ed). *Handbook of Parenting*, pp. 287-316. 2nd end. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Kusumaningrum, Jatika dan Hepi Wahyuningsih. 2012. "Hubungan Komunikasi Interpersonal Orang tua-anak dengan Ketercapaian Identitas diri Remaja". *Psikologika Vol 17, No 1*.
- Marcia, James. 1980. *Identity in Adolescence*. New York: Wiley
- Papalia, E. D dan Feldman, R. T. 2014. *Meyelami Perkembangan Manusia: Experience Human Development*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Saad, Hasballah M. 2003. *Perkelahian Pelajar*. Yogyakarta: Galang Press
- Sarwono, Sarlito W. 2001. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shapiro, Roger L. 1978. "The Adolescence, the Therapist and the Family: the Management

*Komunikasi Interpersonal antara Orang Tua dan Anak Remaja serta  
Identitas Diri Remaja: Studi di Bina Keluarga Remaja Parupuk Tabing,  
Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat*

of Eksternal Resistances to Psychoanalytic  
Therapy of Adolescents”. *Journal of  
Adolescence* 10: 3 – 10.

Soldatova, E.L. dan I.A Shlyapnikova. 2013.  
“Ego-identity in the Structure of Personality  
Maturity”. *Procedia – Social and Behavioral  
Science* 86: 283 – 288.

Supriatna, Mamat. 2011. “Model Konseling  
Aktualisasi Diri untuk Mengembangkan  
Kecakapan Pribadi Mahasiswa”. *Disertasi*.  
Tidak diterbitkan. Bandung: PPS UPI.

## Representasi Perempuan Pekerja Migran menurut Laki-laki di Kota Palembang

Armansyah dan Mirna Taufik

Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI, Palembang

Korespondensi: Armansyah (*e-mail*: armagedone77@yahoo.com)

### Abstrak

Partisipasi perempuan dalam lapangan kerja terus meningkat. Mereka rela melakukan migrasi ke tempat yang jauh dari keluarga untuk mencari pekerjaan. Dulu perempuan bermigrasi pada jarak yang dekat, tetapi saat ini mereka dapat bermigrasi sampai lintas negara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan representasi perempuan pekerja migran menurut laki-laki di Kota Palembang. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari wawancara terhadap informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan *reduction*, *display*, dan *conclusion*, sedangkan keabsahan data menggunakan derajat *credibility* melalui tahapan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan representasi laki-laki di Kota Palembang terhadap perempuan pekerja migran adalah baik. Budaya perempuan bermigrasi dan bekerja dianggap hal yang biasa dan baik pada era modern sekarang ini. Secara umum, perempuan dianggap lebih baik jika bekerja dekat dengan lingkungan keluarga. Namun, jika harus bermigrasi, disarankan keluarga (suami dan anak) hendaknya ikut serta. Sebagian besar informan mendukung pasangannya bekerja dan bermigrasi, serta bentuk dukungan yang diberikan, seperti membantu pekerjaan rumah, mencuci, menyapu, dan mengurus anak.

**Kata kunci:** representasi, perempuan pekerja, migran

## Representation of Women Migrant Workers by Men in Palembang City

### Abstract

Women's participation in employment continues to increase. They are willing to migrate to a place away from the family to work. In the past, women migrated close to their origin, but now they can migrate across the country. This study aims to explain the representation of female migrant workers by men in Palembang City. The method used is qualitative, with data collection through observation, interview and documentation. Data obtained from interviews with selected informants with purposive sampling technique. Data analysis uses reduction, display, and conclusion, while data validity uses degrees of credibility through

extension stages of observation, increased persistence, and triangulation. The results showed that male representation in Palembang City toward female migrant workers was good. The culture of women migrating and working is considered normal and good in the today's modern era. In general, women are considered to be better working closer to the family's environment. However, if they have to migrate, it is advisable that their families (husband and child) should accompany them. Most informants support their partners to work and migrate, forms of support are such as assisting the house chores, washing, sweeping, and caring for children.

**Keywords:** representation, women workers, migrants

## **Pendahuluan**

Kota Palembang memiliki jumlah penduduk 1.558.491 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 780.698 jiwa dan penduduk perempuan 777.793 jiwa. Penduduk Kota Palembang dari tahun 2013 ke 2014 berkembang sekitar 1.47 persen (BPS, 2014). Pada 2016 jumlah penduduk Kota Palembang adalah 1.602.100 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 803.00 jiwa (50,12 persen) dan penduduk perempuan sebesar 799.100 jiwa (49,88 persen) (<http://dinkes.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-147-263.pdf>). Dengan adanya peningkatan pembangunan di Kota Palembang, kota ini memiliki daya tarik yang besar bagi para migran. Migran adalah individu yang melakukan migrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Tarmizi (2013: 1), terdapat tiga variabel yang menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Saat ini arus migrasi terjadi semakin cepat. Jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama bukan lagi merupakan masalah bagi penduduk. Hal itu karena semua kendala dapat diatasi dengan kemajuan transportasi baik darat, laut maupun udara. Menurut Lee (1991) dalam Nasution (1999: 109), migrasi dalam arti luas adalah perubahan tempat tinggal secara

permanen atau semipermanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa; serta tidak ada perbedaan antara migrasi dalam negeri dan migrasi ke luar negeri. Pendapat serupa disampaikan oleh Smith dalam Standing (1991: 10) yang menyatakan bahwa migrasi merupakan semua perpindahan ruang fisik, termasuk perubahan tempat tinggal. Dengan meningkatnya arus migrasi akibat dari kemajuan teknologi dan pembangunan, Kota Palembang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, penyebaran penduduk cenderung ke daerah perkotaan yang memiliki sarana dan prasarana kehidupan yang lengkap. Sementara itu, teori migrasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Lee (1996), Todaro (1995), dan Titus (1982) yang menyatakan bahwa motivasi utama untuk berpindah adalah motif ekonomi, yaitu motif yang berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antara berbagai daerah ([http://randyibo.blogspot.co.id/2016\\_01\\_01\\_archive.html](http://randyibo.blogspot.co.id/2016_01_01_archive.html)).

Pelaku migrasi bukan hanya laki-laki, melainkan saat ini telah banyak perempuan yang melakukan migrasi, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Berbicara tentang perempuan sebagai pelaku migrasi tentunya sangat erat berkaitan dengan keamanan dan juga pola hidup perempuan yang tinggal

jauh dari keluarga. Hal yang paling penting adalah faktor keamanan dan pergaulan yang kerap kali dapat mengancam keselamatan perempuan sebagai migran di daerah yang baru. Sama halnya dengan laki-laki, perempuan yang melakukan migrasi juga bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru.

Tampak adanya peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan (KtP) sejak 2010 dan yang tertinggi terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35 persen. Untuk 2015, jumlah kasus meningkat sebesar 9 persen dari tahun 2014. Angka ini adalah jumlah kasus KtP yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan mungkin dapat lebih tinggi seperti fenomena gunung es (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2016: 1). Tingkat kekerasan ini dapat terjadi kepada perempuan yang bermigrasi maupun yang tidak bermigrasi. Namun, perempuan yang bermigrasi akan lebih rentan terkena tindak kekerasan karena jauh dari keluarga. Selain itu, juga penelitian Setiadi membuktikan migrasi perempuan menjadi pendorong perubahan nilai budaya dalam masyarakat tampak cukup dinamis (<https://ugm.ac.id/id/berita/2649migrasi.perempuan.mendorong.perubahan.nilai.budaya>). Perubahan tersebut tampak pada berkurangnya peran pasangan (suami) dalam kehidupan berumah tangga, perempuan menjadi tulang punggung keluarga, serta meningkatnya peran dan rasa percaya diri perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menyikapi hal tersebut, tampak adanya perubahan budaya pada fungsi dan peran perempuan. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya karakteristik demografi yang dimiliki oleh perempuan pekerja, seperti pendidikan dan keterampilan (Armansyah & Kiki Aryaningrum, 2017). Perempuan

yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik akan lebih banyak memilih untuk bekerja dan melakukan migrasi. Perubahan ini tentunya akan mendapatkan respons dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya kaum laki-laki. Untuk itu, peneliti mencoba melakukan kajian tentang representasi. Representasi adalah cara untuk membentuk pengetahuan yang dimungkinkan oleh otak untuk memaknai suatu tanda yang dilakukan oleh manusia. Definisi yang lebih jelasnya adalah penggunaan tanda (suara/bunyi, gambar, dan lain-lain) untuk menghubungkan, memproduksi, menggambarkan, memotret sesuatu yang dilihat, dibayangkan, dirasakan dalam bentuk fisik tertentu (Danesi, 2012) dalam (Wibowo, 2015). Menurut Judy Giles dan Tim Middleton (1999) (dalam Saum, 2016), representasi berasal dari kata "*represent*" yang terdiri atas tiga arti, yaitu *to stand in for* (melambangkan), *to speak or act on behalf of* (berbicara atas nama seseorang), dan "*to re-present*" (menghadirkan kembali peristiwa yang sudah terjadi). Representasi memainkan dua peran penting berikut ini. Pertama, apakah sebuah kelompok, seseorang, gagasan ditampilkan sebagaimana semestinya tanpa diburuk-burukan atau dilebih-lebihkan. Kedua, bagaimana representasi tersebut ditampilkan mulai dari pemilihan kata, kalimat, aksentuasi, foto, yang ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2011 dalam Saum, 2016).

Sementara itu, representasi menurut Stuart Hall (dalam Aprinta, 2011) mengandung dua pengertian berikut ini. Pertama, representasi mental, yaitu konsep tentang sesuatu yang ada di kepala tiap manusia atau disebut juga sebagai peta konseptual. Representasi mental ini membentuk sesuatu yang abstrak. Kedua, representasi bahasa, yang bahasa berperan penting dalam konstruksi makna.

Konsep abstrak yang ada dalam kepala manusia harus diterjemahkan dalam bahasa yang lazim supaya dapat menghubungkan konsep-konsep dan ide-ide manusia tentang suatu tanda dan simbol-simbol tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa representasi adalah cara pandang individu atau kelompok pada suatu fenomena atau kejadian yang ada pada masyarakat. Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini terkait perilaku migrasi perempuan dengan tujuan untuk bekerja. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba melakukan kajian penelitian yang berjudul “Representasi Perempuan Pekerja Migran menurut Laki-laki di Kota Palembang”.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksudkan dengan penelitian menggunakan metode kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Metode ini digunakan karena peneliti akan mendalami suatu permasalahan yang terjadi di lapangan tanpa melakukan perubahan pada kondisi sosial yang ada di lapangan. Sementara itu, penelitian dilakukan di Kota Palembang dengan mengambil beberapa informan yang telah di pilih secara *purposive sampling*. Jangka waktu penelitian ini adalah dari September 2017 sampai dengan Desember 2017. Penelitian ini bukan merupakan alat untuk mengeneralisasi, melainkan hanya untuk *extrapolation*. Hal itu berarti bahwa penelitian hanya dapat digunakan pada kondisi dan tempat yang memiliki persyaratan yang sama dengan keadaan atau karakteristik yang telah diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 laki-laki yang berstatus menikah dan 5 laki-laki yang berstatus belum menikah. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah laki-laki berstatus menikah, laki-laki berstatus belum menikah, dan laki-laki yang tinggal di Kota Palembang.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut. Pertama adalah observasi, kedua adalah dengan wawancara, dan ketiga adalah dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kriteria keabsahan data yang digunakan adalah derajat kepercayaan (*credibility*). Sementara itu, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya kesalahan dalam penyajian data oleh peneliti.

### **Pembahasan**

Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang dan terhadap informan dilakukan wawancara mendalam untuk proses pengumpulan data. Berdasarkan hasil wawancara, ada enam kategori yang dapat dijadikan sebagai representasi perempuan pekerja migran menurut laki-laki di Kota Palembang antara lain. Keenam representasi itu adalah persepsi, peran perempuan pekerja migran dalam rumah tangga, peran suami/pasangan perempuan pekerja migran dalam rumah tangga, fungsi perempuan pekerja migran dalam rumah tangga, gap dan motivasi antara perempuan pekerja dan laki-laki, serta adanya bias gender. Keenam kategori tersebut akan diuraikan dalam bagian pembahasan di bawah ini.

### *Persepsi Laki-laki pada Perempuan Pekerja Migran*

Semakin tingginya partisipasi perempuan dalam lapangan kerja membuat peran mereka menjadi semakin kompleks. Tidak hanya mengurus urusan dalam rumah tangga, perempuan masa kini juga terlibat dalam urusan pekerjaan di luar rumah, seperti pekerja kantoran, guru, dosen, pedagang, dan buruh. Tidak sedikit dari perempuan yang, bahkan melakukan migrasi ke daerah yang jauh demi untuk mendapatkan pekerjaan, seperti migrasi antarkabupaten, kota, provinsi, bahkan antarnegara untuk menjadi TKI di luar negeri. Melihat fenomena ini, peneliti melakukan kajian tentang bagaimana persepsi laki-laki di Kota Palembang terhadap perempuan pekerja migran tersebut. Peneliti melakukan wawancara pada beberapa laki-laki yang dijadikan informan penelitian. Sebagai hasilnya, peneliti menemukan beberapa pendapat terkait isu ini.

Pendapat pertama dikemukakan oleh I\_Wy-01 yang berstatus menikah. Menurutnya, dalam era modern sekarang ini bekerja bukan lagi hanya menjadi hak laki-laki. Bekerja merupakan hak perempuan karena sekarang hal itu disebut dengan persamaan gender sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam dunia pekerjaan. Hasil kutipan wawancara dengan I\_Wy-01 mengatakan bahwa “Dalam dunia modern bekerja bukan lagi terkait laki-laki atau perempuan. Semua dapat bekerja, artinya terdapat persamaan gender”.

Informan di atas telah memahami bahwa antara perempuan dan laki-laki terdapat persamaan gender dalam hal pekerjaan. Berdasarkan jawaban dari informan tersebut, persepsinya terhadap perempuan pekerja migran adalah hal yang wajar dan biasa karena perempuan juga mempunyai hak

untuk bekerja. Pendapat yang serupa disampaikan oleh I\_Kd-04 status belum menikah. “Perempuan yang bekerja sah-sah saja karena mereka juga berhak buat berkarya dan bekerja”.

Bagi I\_Kd-04, perempuan bekerja adalah hal yang biasa dan diperbolehkan. Menurutnya, bekerja merupakan media perempuan untuk berkarya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendapat laki-laki yang berstatus menikah dan belum menikah memiliki persamaan. Mereka beranggapan bahwa pada zaman modern sekarang ini perempuan bekerja merupakan hal yang biasa terlebih lagi dengan adanya wacana persamaan gender sehingga perempuan juga memiliki hak yang sama dalam lapangan pekerjaan.

Temuan penelitian ini mirip dengan yang dilakukan Djasmoredjo (2004). Penelitiannya menemukan bahwa karyawan laki-laki memiliki persepsi yang baik terhadap pemimpin perempuan. Menurut penelitian Djasmoredjo, pemimpin perempuan memiliki karakteristik yang istimewa apalagi ketika mereka mampu mengarahkan dan memimpin bawahannya yang adalah laki-laki. Jadi dalam hal ini perempuan bekerja adalah suatu hal yang lumrah apalagi ketika mereka mampu bersifat profesional. Mereka mampu melakukan manajemen waktu yang baik, yaitu antara urusan kantor dan urusan rumah tangga. Tentunya hal itu tidak terlepas dari adanya dukungan dan komunikasi yang baik dengan suami atau pasangan.

### *Peran Perempuan Pekerja Migran dalam Rumah Tangga*

Perempuan pekerja migran memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengurus rumah tangga. Hal ini tentunya dapat menjadi permasalahan jika antara suami dan istri tidak terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik.



Oleh karena itu, peneliti membuat pertanyaan dalam penelitian ini terkait dengan peran perempuan yang seharusnya dalam urusan rumah tangga menurut laki-laki di Kota Palembang. Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, maka ditemukan informasi bahwa perempuan pekerja migran harus tetap melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Informan mengatakan bahwa perempuan pekerja migran harus tetap sadar dengan tupoksinya sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah, suami dan anak. Oleh sebab itu, perempuan harus pandai mengatur waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangga. Berikut ini kutipan wawancara dengan I\_Ir-03 status menikah.

“Perempuan yang bekerja harus dapat mengatur antara bekerja dan mengurus rumah tangga. Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh istri malah dikerjakan oleh suami, secara norma itu kurang baik.”

Informan di atas berpendapat bahwa perempuan pekerja harus tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Ia mengatakan bahwa jangan sampai pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh istri malah dikerjakan oleh suami karena hal tersebut bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Hal itu sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh I\_Yg-06 status lajang. “Bagi perempuan yang bekerja harus dapat membagi waktu antara bekerja di luar dan di dalam rumah tangga.”

Pendapat I\_Yg-06 sama dengan pendapat I\_Ir-03. I\_Yg-06 mengatakan bahwa perempuan pekerja migran selain bekerja juga harus dapat mengatur waktu untuk urusan pekerjaan rumah, serta mengurus anak dan suami. Jadi selain bekerja di luar, perempuan juga harus tetap mengerjakan

urusan rumah tangga yang lainnya karena hal itu merupakan kewajibannya sebagai seorang istri atau pun ibu dari anak-anaknya. Perempuan bekerja untuk membantu menambah pendapatan suami yang kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari (Soebyakto dan Armansyah, 2016). Temuan penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Salaa (2015). Menurut Salaa, perempuan yang bekerja, selain mereka mampu menambah pendapatan keluarga juga tidak pernah meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang istri, ibu dari anak-anaknya, dan mengurus pekerjaan rumah lainnya. Jadi sebenarnya ketika perempuan bekerja, maka nalurinya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya akan tetap ada. Naluri itu akan diikuti dengan tindakan mereka yang selalu berupaya untuk menunaikan kewajibannya dalam urusan berumah tangga.

#### *Peran Suami/Pasangan Perempuan Pekerja Migran dalam Keluarga*

Sebelum menikah biasanya antara pasangan akan membuat komitmen bersama mengenai hal-hal yang akan dilakukan setelah menikah nantinya. Termasuk di dalamnya adalah urusan istri bekerja atau tidak bekerja dan bagaimana seharusnya tugas dan fungsi masing-masing jika istri atau perempuannya bekerja. Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji tentang pandangan kaum laki-laki mengenai perannya di rumah ketika istri atau pasangan mereka bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki akan dengan senang hati membantu pekerjaan sang istri di rumah atau kalau pun mereka tidak dapat membantu, maka akan mencari alternatif lain misalnya dengan cara menyewa jasa pembantu untuk mengurus urusan rumah tangga. Berikut ini salah satu kutipan hasil wawancara dengan I\_Di-08

status menikah. “Ketika istri bekerja, maka suami harus membantu mengurus anak dan pekerjaan rumah lainnya.”

Menurut I\_Di-08, suami harus membantu pekerjaan istri di rumah. Apapun pekerjaan yang dapat dilakukan, maka seharusnya suami ikut membantu. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban sang istri karena mereka bekerja juga demi kepentingan keluarga sehingga selayaknya suami di rumah ikut membantu. Suami harus berpikiran positif dan memberikan dukungan kepada istri yang bekerja. Salah satu caranya adalah dengan bergotong royong mengerjakan urusan rumah tangga, seperti mengurus anak, mencuci, dan menyapu. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh I\_Kd-04 status belum menikah.

“Ketika istri bekerja, maka pasangannya harus dapat membantu. Walaupun mungkin tidak terlalu mengerti masalah urusan rumah tangga namun kita dapat mengerjakan apa yang kita bisa atau bersama-sama dengan istri saling membantu.”

Menurut I\_Kd-04, walaupun laki-laki itu kurang paham dan pandai mengerjakan urusan rumah tangga, ia masih tetap dapat membantu dengan cara mengerjakan apa yang dapat dilakukan atau bergotong royong dengan istri. Misalkan sebelum berangkat kerja mereka bersama-sama mengerjakan urusan rumah tangga, seperti menyapu, menyiapkan makanan, dan memandikan anak. Dengan demikian, dari informasi yang diperoleh sebagian besar laki-laki yang diwawancarai merasa tidak berkebaratan untuk membantu istrinya bekerja di rumah.

Bagi mereka, hal tersebut bertujuan untuk membantu sang istri karena istri bekerja di luar juga demi kepentingan keluarga mereka, seperti untuk menambah pendapatan

keluarga demi masa depan anak-anak mereka. Oleh karena itu, wajar saja jika suami atau pasangan mereka ikut membantu pekerjaan rumah yang dapat diselesaikan bersama. Temuan penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Sri (2015). Menurut Putri dan Sri, dalam kehidupan berumah tangga, biasanya suami dan istri melakukan kesepakatan bersama dalam tiga hal, yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Dalam mengambil keputusan, suami akan selalu melibatkan istri untuk membuat keputusan bersama. Pengelolaan keuangan cenderung dipercayakan kepada istri dan pengasuhan anak juga cenderung dilakukan oleh istri, tetapi kadang kala suami terlibat dalam mengurus anak. Hal ini menunjukkan peran suami dalam rumah tangga ketika istri bekerja. Hal itu berarti suami harus memberikan kepercayaan dan adanya keterbukaan antara suami istri. Masalah mengurus anak dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat saling meringankan tugas masing-masing.

#### *Fungsi Perempuan Pekerja Migran bagi Laki-laki dalam Keluarga*

Perempuan bermigrasi dan bekerja tentunya bukan hanya untuk tujuan kepentingan dirinya sendiri. Apalagi jika yang bermigrasi itu adalah perempuan yang telah menikah. Tentunya ada latar belakang yang kuat sehingga mereka rela bermigrasi demi mencari pekerjaan. Penelitian ini mencoba melakukan kajian tentang persepsi laki-laki di Kota Palembang terkait dengan fungsi perempuan pekerja migran dalam keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan informasi bahwa fungsi perempuan pekerja migran bagi laki-laki dalam keluarga adalah untuk menambah penghasilan

*Representasi Perempuan Pekerja Migran  
menurut Laki-laki di Kota Palembang*

keluarga, menambah pendapatan suami, aktualisasi diri, media berkarya bagi perempuan, menambah pengalaman perempuan dan untuk masa depan anak-anak mereka. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan I\_Sy-02 status menikah. "Istri bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, jika pendapatan suami rendah maka peran suami bekerja akan sangat membantu".

Menurut I\_Sy-02, jika istrinya bekerja, maka itu bertujuan untuk menambah penghasilan keluarga. Pendapatan yang diperolehnya sedikit sehingga jika istri bekerja, maka dapat menambah pendapatan suami. Pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan keluarga selain juga untuk tabungan bagi anak-anak mereka di masa depan. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh I\_Kd-04 status belum menikah.

"Fungsi perempuan bekerja bagi laki-laki selain untuk karir dan karyanya juga dapat dijadikan motivasi bagi laki-laki. Bahwa perempuan dengan segala keterbatasannya dapat bekerja dan mungkin gajinya lebih besar dari laki-laki, maka hal itu dapat menjadi motivasi bagi laki-laki untuk lebih semangat bekerja."

Menurut I\_Kd-04, perempuan bekerja itu selain menambah pendapatan keluarga juga untuk mengembangkan karier dan karya mereka. Dengan bekerja, perempuan lebih bebas berkarya dan meningkatkan kariernya. Selain itu, perempuan yang bekerja menjadi motivasi bagi laki-laki. Perempuan dengan segala keterbatasan mampu bekerja apalagi laki-laki. Jadi menurut I\_Kd-04 melihat perempuan bekerja akan memotivasi laki-laki untuk bekerja lebih baik lagi. Salaa (2015) juga mengungkapkan bahwa tujuan perempuan bekerja tidak lain adalah untuk menambah

pendapatan keluarga. Permasalahan yang sering terjadi ketika perempuan bekerja adalah mereka tidak dapat menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Handayani (2013), perlu adanya aturan keterlibatan anggota keluarga dan adanya komunikasi yang baik dengan pasangan mengenai permasalahan kerja dalam keluarga.

*Gap dan Motivasi antara Perempuan dan Laki-laki*

Perempuan pekerja identik dengan sikap mandiri karena mereka mempunyai penghasilan sendiri. Sebagian laki-laki akan merasa kurang percaya diri mendekati perempuan yang bekerja, apalagi pekerjaan perempuan tersebut lebih baik dan gajinya lebih tinggi daripada laki-laki. Penelitian ini dapat menjawab salah satu permasalahan yang selama ini ada di masyarakat yang mempertanyakan alasan perempuan yang cantik, dengan pekerjaan yang bagus, tetapi terlambat menikah atau tidak menikah. Salah satu penyebabnya menurut hasil penelitian ini adalah karena laki-laki akan merasa minder mendekati perempuan yang bekerja. Hal itu berarti terdapat gap atau batas antara laki-laki dan perempuan yang membuat laki-laki merasa kurang percaya diri untuk mendekati perempuan yang telah bekerja. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan I\_Dn-05 status belum menikah. "Saya akan merasa minder mendekati perempuan yang bekerja jika pekerjaannya itu lebih baik daripada saya."

Menurut I\_Dn-05, ia akan merasa kurang percaya diri untuk mendekati perempuan yang bekerja. Apalagi jika pekerjaan perempuan tersebut lebih baik daripada pekerjaannya. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh I\_Yg-06 status lajang. "Saya kurang percaya

diri untuk mendekati perempuan yang bekerja jika saya belum bekerja jadi terdapat batasan antara laki-laki dan perempuan yang bekerja.”

Menurut I\_Yg-06, rasa kurang percaya diri akan muncul ketika dia belum bekerja. Laki-laki tidak percaya diri untuk mendekati perempuan yang lebih tinggi karier, pekerjaan, dan pendapatan daripada mereka. Hal ini terjadi karena budaya di Indonesia pada umumnya adalah penganut patriarki sehingga laki-laki merasa belum siap jika posisi perempuan lebih tinggi (Irfarinda, 2014). Ada makna yang unik dari hasil temuan ini. Berdasarkan pendapat di atas, laki-laki tidak akan percaya diri untuk mendekati perempuan yang bekerja lebih tinggi daripada mereka. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja lebih sulit mendapatkan pasangan daripada perempuan yang tidak bekerja. Para lelaki juga akan berusaha untuk menyamakan posisi dengan perempuan yang telah bekerja. Mereka berpikir jika ingin mendekati perempuan yang bekerja, maka secara otomatis mereka juga harus memiliki pekerjaan terlebih, bahkan ada yang membuat standar harus memiliki pekerjaan yang lebih baik dari calon pasangannya.

Selanjutnya selain terbentuk gap antara laki-laki dan perempuan. Perempuan pekerja secara otomatis juga menjadi motivasi bagi laki-laki untuk bekerja lebih baik. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan I\_Kd-04 status belum menikah. “Ketika laki-laki menemukan perempuan yang bekerja mungkin itu dapat dianggap sebagai kelebihan dan juga motivasi. Karena perempuan saja dapat bekerja apalagi laki-laki.”

Menurut I\_Kd-04, ketika menemukan dan melihat perempuan pekerja, ia akan lebih termotivasi untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja lebih baik. Pendapat yang serupa disampaikan oleh I\_Dn-05 status belum menikah. “Untuk mendekati perempuan

yang bekerja setidaknya saya harus memiliki pekerjaan yang lebih baik dari perempuan itu.”

Jadi dari beberapa pendapat informan di atas, ketika mereka menemukan perempuan atau pasangan mereka bekerja, laki-laki akan merasa termotivasi. Mereka akan berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang lebih atau paling tidak sama dengan perempuan yang ingin mereka dekati. Hal ini tentunya memberikan dampak positif pada laki-laki, yaitu untuk membangkitkan semangat bekerja lebih baik supaya dapat mendekati dan mendapatkan pasangan yang lebih baik.

### *Bias Gender*

Gender adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang tidak membedakan jenis kelamin. Hal itu berarti bahwa antara perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Perempuan juga berhak berkarya dan bekerja di luar rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat bias gender dari pernyataan telah disampaikan oleh laki-laki. Masih ada sebagian laki-laki yang merasa bahwa tugas mengurus rumah tangga itu hanyalah kewajiban istri dan apabila dikerjakan oleh suami, maka hal itu bertentangan dengan norma di masyarakat. Selain itu, laki-laki juga tidak mau jika posisi perempuan lebih tinggi darinya, baik dalam hal pekerjaan maupun pendapatan. Hal ini terbukti dari masih ada sebagian laki-laki yang merasa minder dan kurang percaya diri jika pasangan mereka lebih tinggi pekerjaan dan pendapatannya daripada mereka. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan I\_Ir-03 status menikah.

“Perempuan yang bekerja harus dapat mengatur antara bekerja dan mengurus rumah tangga. Jangan sampai pekerjaan

*Representasi Perempuan Pekerja Migran  
menurut Laki-laki di Kota Palembang*

yang seharusnya dilakukan oleh istri malah dikerjakan oleh suami, secara norma itu kurang baik.”

Menurut I\_Ir-03, pekerjaan rumah adalah kewajiban istri. Jika dikerjakan oleh suami, maka hal itu tidak sesuai dengan norma dan dipandang kurang baik. Oleh sebab itu, perempuan pekerja harus dapat mengatur waktu dengan baik antara bekerja dan mengurus rumah tangga. Selain pembatasan pada pekerjaan rumah, sebagian laki-laki juga membatasi perempuan dalam bermigrasi. Berikut kutipan hasil wawancara dengan I\_Yg-06 status belum menikah. “Jika perempuan bermigrasi untuk bekerja berstatus lajang maka wajar-wajar saja, namun jika sudah berkeluarga maka hal itu kurang baik.”

Menurut I\_Yg-06, perempuan boleh melakukan migrasi apabila mereka masih berstatus belum menikah, tetapi apabila telah menikah, maka sebaiknya mereka tidak melakukan migrasi. Perndapat ini serupa dengan pernyataan dari I\_Tj-07 status belum menikah. “Perempuan yang bermigrasi untuk bekerja kurang baik karena dapat membuat dia melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.”

Berdasarkan pernyataan I\_Tj-07, perempuan bermigrasi demi pekerjaan kurang baik jika harus meninggalkan keluarganya. Hal itu dapat membuat perempuan tersebut melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus anak dan suami serta urusan rumah tangga lainnya. Jika harus bermigrasi, maka keluarga perempuan tersebut harus ikut serta bermigrasi. Ada juga sebagian dari laki-laki yang beranggapan bahwa tugas perempuan itu hanyalah di rumah mengurus anak-anaknya, sedangkan bekerja adalah tugas suami.

Temuan penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Parry (2017)

yang menyatakan bahwa di Afrika Selatan, laki-laki merupakan raja sehingga mereka tidak akan senang jika perempuan memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada laki-laki. Perempuan yang bekerja dan tidak dapat mengatur waktu yang baik antara bekerja dan mengurus rumah tangga sering dijadikan penyebab banyaknya kasus perceraian di Afrika Selatan. Oleh karena itu, selain memahami masalah gender yang baik, diperlukan juga kesadaran terhadap tugas dan fungsi masing-masing antara pasangan suami istri sehingga selain pekerjaan berjalan baik, urusan rumah tangga juga terkendali dan harmonis.

Berdasarkan penelitian ini, maka representasi perempuan pekerja migran menurut laki-laki di Kota Palembang dapat dilihat dari enam kategori, yaitu persepsi, peran perempuan pekerja migran dalam keluarga, peran suami dalam rumah tangga ketika istri bekerja, fungsi perempuan pekerja migran dalam keluarga, gap dan motivasi antara perempuan dan laki-laki, serta bias gender. Dapat disimpulkan secara umum bahwa pandangan mayoritas laki-laki yang dijadikan informan terhadap perempuan pekerja migran positif. Bagi laki-laki, perempuan yang bermigrasi untuk tujuan bekerja merupakan fenomena yang wajar di zaman modern sekarang ini. Ketika perempuan telah memiliki pendidikan yang baik, maka sebaiknya jika mereka bekerja sebagai bentuk penghargaan atas pendidikan yang telah mereka capai. Sementara itu, perempuan pekerja harus dapat melakukan manajemen waktu yang baik antara bekerja di kantor dengan mengurus rumah tangga. Perempuan pekerja harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Perempuan harus secara sadar mengerjakan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

Komunikasi yang baik dengan pasangan terkait masalah pekerjaan di dalam rumah harus didiskusikan secara baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebaiknya perempuan bekerja di lingkungan yang dekat dengan keluarga dan jika harus bermigrasi, maka keluarga harus ikut serta atau memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Perempuan yang bekerja akan membuat rasa percaya diri laki-laki yang ingin mendekati mereka sedikit rendah. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang lebih rendah daripada mereka akan cenderung untuk menghindari perempuan yang telah bekerja.

## **Kesimpulan**

Penelitian tentang representasi perempuan pekerja migran menurut laki-laki di Kota Palembang menemukan bahwa terdapat berbagai pandangan atau persepsi laki-laki di Kota Palembang baik yang berstatus menikah ataupun belum menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari informan laki-laki yang diwawancarai memiliki persepsi yang baik terhadap perempuan pekerja migran. Perempuan pekerja migran adalah hal yang baik dan biasa dalam era modern. Hanya saja ketika bermigrasi hendaknya perempuan memikirkan urusan pekerjaan rumah tangganya. Hendaknya perempuan bekerja di tempat yang dekat dengan lingkungan keluarganya dan jika harus bermigrasi, maka keluarga harus ikut serta.

Perempuan pekerja migran selain bekerja harus dapat menunaikan kewajibannya secara sadar sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus rumah, suami, dan anak. Sebagian besar informan laki-laki dalam penelitian ini tidak merasa keberatan

untuk membantu pekerjaan rumah ketika istri bekerja. Sebagian informan mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena istri bekerja juga untuk membantu kebutuhan keluarga. Perempuan pekerja migran memberikan gap dan motivasi bagi laki-laki. Laki-laki merasa kurang percaya diri mendekati perempuan yang bekerja. Apalagi pekerjaan perempuan tersebut lebih baik daripada laki-laki. Namun, di samping itu perempuan yang bekerja memberikan motivasi bagi para lelaki untuk bekerja lebih baik sehingga mereka dapat mencapai posisi yang lebih atau paling tidak setara dengan perempuan yang bekerja tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bias gender dari persepsi laki-laki terhadap perempuan yang bekerja. Masih ada laki-laki yang beranggapan bahwa tugas perempuan hanya mengurus anak di rumah, pekerjaan rumah adalah kewajiban istri, serta perempuan harusnya tidak melakukan migrasi dan bekerja pada jarak yang dekat dengan lingkungan keluarga. Sebagian laki-laki juga tidak merasa percaya diri ketika ada perempuan yang memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada mereka. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah laki-laki membuat kriteria tersendiri bagi kaum perempuan pekerja. Kriteria yang dimaksud adalah dalam hal perihal pasangan. Bagi laki-laki yang akan mendekati perempuan yang bekerja, mereka harus memiliki pekerjaan yang lebih atau paling tidak sama dengan perempuan yang akan didekatinya itu. Temuan lainnya menunjukkan penyebab perempuan yang bekerja lebih sulit mendapatkan pasangan adalah karena laki-laki kurang percaya diri untuk mendekati perempuan yang bekerja apalagi ketika mereka telah memiliki jabatan dan pendapatan yang lebih besar daripada laki-laki.

## Saran

Perempuan pekerja harus dapat melakukan manajemen waktu yang baik antara bekerja di luar dan di dalam rumah. Pembagian kerja antara suami dan istri dalam urusan rumah tangga harus dikomunikasikan dengan baik sebelum menikah dan setelah menikah untuk menghindari kesalahpahaman. Perempuan harus dapat menyakinkan suami bahwa ketika karir dan pendapatannya lebih tinggi daripada suami, maka hal itu bukan berarti untuk menyaingi suami atau merendahnya. Namun, semua itu semata-mata untuk kepentingan keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

Keterbatasan penelitian ini adalah pada variasi laki-laki yang dijadikan informan. Karena keterbatasan waktu dan dana maka karakteristik informan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada status, dan tempat tinggal. Seharusnya ada lebih banyak karakteristik yang dapat mewakili untuk memperoleh jawaban dan informasi yang lebih mendalam. Karakteristik yang perlu ditambah adalah, seperti dari tingkat pendidikan, umur, dan pekerjaan. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah supaya dapat dibuat kajian tentang persepsi laki-laki terhadap perempuan pekerja migran dengan karakteristik yang lebih bervariasi. Selain itu juga perlu dilakukan survei dalam bentuk angket tentang pernyataan setuju dan tidak setuju dengan perempuan pekerja migran.

## Daftar Pustaka

- Aprinta, Gita. 2011. Kajian Media Massa: Representasi Girl Power Wanita Modern dalam Media Online (Studi Framing Girl Power dalam Rubrik Karir dan Keuangan Femina Online). *The Messenger, Volume II, Nomor 2, Edisi Januari*.
- Armansyah & Kiki Aryaningrum. (2017). Analisis Karakteristik Demografi Pekerja Wanita Sektor Informal pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kota Palembang. *Populasi, 25(1)*, 52–63. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/32415/19530>.
- Soebyakto, Bambang Bemby; Armansyah. 2016. "Migran Women Working at Informal Sectors: Empirical Study in Kuto Batu Village, Ilir Timur II Palembang City". *International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6, No. 4; April*.
- BPS Kota Palembang. 2014. *Palembang dalam Angka*. Palembang.
- Creswell, John, W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djasmoredjo, Bene, D.M. 2004. "Persepsi Karyawan Laki-laki Terhadap Pemimpin Perempuan: Apakah Pemimpin Perempuan Lebih Bersifat Asuh daripada Pemimpin Laki-laki". *Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi. Vol 4, No.3*, Desember 2004. <https://media.neliti.com/media/publications/222153-persepsi-karyawan-laki-laki-terhadap-pem.pdf>. Diakses 12 Januari 2018. Pukul 22:06 WIB.
- Handayani, Arri. 2013. Keseimbangan Kerja Keluarga pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border. *Buletin Psikologi, Vol. 21, No. 2, Desember 2013, Hlm. 90-101*. <https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/download/7373/5740>. Diakses 13 Januari 2018, Pukul 13:46 WIB.
- Irfarinda, Mutiara. 2014. "Analisis Gender Tenaga Kerja Wanita dalam Partisipasi Ekonomi Rumah Tangga". *Laporan Studi Pustaka*. <http://www.skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/downloadSuppFile/1430/764>. Diakses 13 Januari 2018. Pukul 14:00 WIB.

- Nasution, Arif. 1999. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Medan: Alumni.
- Parry, Bianca Rochelle dan; Puleng Segalo. 2017. "Eating Burnt Toast: The Lived Experiences of Female Breadwinners in South Africa". *Journal of International Women's studies Vol. 18, No. 4, August 2017*.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning dan; Sri Lestari. 2015. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa". *Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015. Hal. 72-85*. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523/1056>. Diakses 13 Januari 2018. Pukul 13:25 WIB.
- Salaa, Jeiske. 2015. Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Holistik Tahun VIII No. 15 Januari-Juni 2015*. <https://media.neliti.com/media/publications/959-ID-peran-ganda-ibu-rumah-tangga-dalam-meningkatkan-ekonomi-keluarga-di-desa-tarohan.pdf>. Diakses 13 Januari 2018. Pukul 13:06 WIB.
- Saum, Tiara. 2016. *Wanita dalam Surat Kabar (Representasi Wanita Karier dalam Rubrik Persona Harian Kompas Edisi Januari – Februari 2016)*. Surakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
- Standing, Guy. 1991. *Konsep-Konsep Mobilitas di Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Tarmizi, Nurlina. 2013. *Tri Matra Kependudukan*. Palembang: Unsri Press.
- Wibowo, Eviyono Adi. 2015. *Representasi Perempuan dalam Film Wanita Tetap Wanita (Analisis Semiotika Representasi Perempuan dalam Film Wanita Tetap Wanita)*. Surakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [http://randyibo.blogspot.co.id/2016\\_01\\_01\\_archive.html](http://randyibo.blogspot.co.id/2016_01_01_archive.html) diakses 3 Oktober 2016, pukul 17.28 WIB
- [http://www.komnasperempuan.go.id/wpcontent/uploads/2016/03/KOMNAS-PEREMPUAN\\_-\\_CATATAN-TAHUNAN-2016edisi-Launching-7-Maret-2016.pdf](http://www.komnasperempuan.go.id/wpcontent/uploads/2016/03/KOMNAS-PEREMPUAN_-_CATATAN-TAHUNAN-2016edisi-Launching-7-Maret-2016.pdf) diakses 03 Oktober 2016, pukul 18.28. WIB.
- <http://dinkes.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-147-263.pdf> diakses, 3 Oktober 2016, Pukul 19.39 WIB.
- <http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/810/536>, diakses 03 Oktober 2016, Pukul 19.43 WIB.
- <https://ugm.ac.id/id/berita/2649migrasi.perempuan.mendorong.perubahan.nilai.budaya>.



**Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam rangka  
Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019  
di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan**

Sukmaniar<sup>1</sup>, Wahyu Saputra<sup>1</sup>, dan Dani Saputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI Palembang, <sup>2</sup>BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Korespodensi: Sukmaniar (*e-mail*: umma.niar@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peserta KB aktif untuk mencapai target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab rendahnya peserta KB aktif adalah pemahaman bahwa banyak anak banyak rezeki, kekhawatiran merasa kesepian jika memiliki sedikit anak, masih berkeinginan mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang berbeda, status pekerjaan suami, tidak memahami pentingnya KB, tidak ada alat/cara KB yang sesuai dengan keinginan, dan tidak ada kegiatan/program KB. Upaya peningkatan jumlah peserta KB aktif dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan dana, pelatihan, manajemen sosialisasi, dan pelatihan alat KB pada PUS, kerja sama dengan pemangku kepentingan, pendekatan tokoh masyarakat, bantuan alat dan pemasangan kontrasepsi secara gratis, pemberian apresiasi kepada pengguna KB, melakukan *monitoring* dan evaluasi serta umpan balik, tinjauan kembali dari hasil *monitoring* dan evaluasi agar dapat diperbaiki pada program KB berikutnya demi tercapainya target Renstra BKKBN 2015-2019.

**Kata kunci:** peserta KB aktif, target Renstra BKKBN 2015-2019

**Efforts to Increase Active Participants of Family Planning in order to  
Achieve the Target of BKKBN Strategic Plan 2015-2019  
in Musi Rawas Regency, South Sumatera Province**

**Abstract**

This study aims to increase active family planning participants in achieving the target of BKKBN Strategic Plan 2015-2019 in Musi Rawas Regency, South Sumatera Province. This research used the mixed methods. The findings of this study indicate that the cause of low active family planning participants are the understanding that more children more benefits, feeling of loneliness if they had fewer children, still expecting children of different sex, status of husband's occupation, lack of understanding of the importance of family planning, family planning methods and no family planning/programs. Efforts to increase the number of active family

planning participants can be done by providing funding, training, socialization management and training of family planning tools on couples of childbearing age, cooperation with stakeholders, community leaders approach, contraceptive tools and installation for free, appreciation given to family planning users, monitoring and evaluation as well as feedback, review of monitoring and evaluation results to be improved in the next family planning program to achieve the Target of BKKBN strategic plan 2015-2019.

**Keywords:** active family planning participants, BKKBN strategic plan targets 2015-2019

## **Pendahuluan**

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, misalnya kelahiran (Saputra & Munandar 2017a), kematian, serta penduduk yang datang dan penduduk yang pergi dari wilayahnya (Soebyakto & Saputra 2015; Soebyakto, Sukmaniar, & Saputra 2016; Sukmaniar, Romli, & Sari 2017). Sementara itu, pertumbuhan penduduk merupakan hal utama untuk menjalankan proses pembangunan nasional. Menurut BPS (2014: 15), salah satu masalah pada proses pembangunan adalah kependudukan yang mencakup, antara lain, jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Oleh karena itu, diperlukan data mengenai penduduk menurut lokasi dan kesejahteraannya, seperti kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, keamanan, dan fertilitas.

Salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan adalah Provinsi Sumatera Selatan. Diketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas daerah 87.017,41 hektar dan secara geografis, terletak antara 1° sampai 4° Lintang Selatan dan antara 102° sampai 106° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, dengan Provinsi Lampung di sebelah selatan, dengan Provinsi Bengkulu di sebelah barat, dan Provinsi Bangka Belitung di sebelah timur. Jumlah

penduduk Sumatera Selatan berdasarkan data BPS tahun 2014 adalah 7.941.741 jiwa. Salah satu penyebab banyaknya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan itu adalah faktor kelahiran (fertilitas).

Fertilitas yang tinggi dapat memengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk. Menurut Mantra (2015: 145), fertilitas berarti terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Tingginya tingkat fertilitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah usia perkawinan pertama dan banyaknya pasangan usia subur (PUS). Usia perkawinan pertama seorang perempuan memengaruhi panjangnya masa melahirkan sehingga dapat meningkatkan jumlah fertilitas. Selanjutnya semakin banyaknya jumlah pasangan usia subur (PUS) akan memperbesar peluang banyaknya kelahiran. Oleh karena itu, banyaknya jumlah anak juga akan memperbesar tanggungan kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Dengan demikian, pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera. Salah satu cara menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (BPS, 2014: 83). Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya untuk menekan jumlah

*Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan*

kelahiran yang akan terjadi. Jika jumlah kelahiran tinggi, maka kesejahteraan penduduk akan rendah yang disebabkan oleh semakin banyaknya beban yang akan ditanggung oleh kepala keluarga.

Penduduk dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menjalankan program KB untuk mengendalikan jumlah penduduk. Salah satu hal yang memengaruhi jumlah penduduk adalah kelahiran (Tarmizi, 2013: 27-28). Namun, program KB di Sumatera Selatan menghadapi masalah ketidakmerataan peserta KB aktif dan penggunaan alat kontrasepsi yang dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk di Sumatera Selatan (Saputra and Munandar, 2017b). Wilayah dengan penggunaan alat kontrasepsi yang kurang optimal dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Musi Rawas dengan hanya 71,3 persen, sedangkan tampak bahwa 28,7 persen PUS belum menjadi peserta KB aktif.

Mengacu pada target Renstra BKKBN 2015-2019, diharapkan masyarakat mampu memperbaiki kehidupan ekonominya dan mudah mengakses segala informasi, khususnya akses PUS terhadap KB. Pencapaian Renstra BKKBN 2015-2019 berkaitan yang erat dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang merupakan salah satu ujung tombak yang akan memudahkan penduduk menjalankan program KB dengan lebih baik lagi. Namun, optimalisasi peserta KB aktif harus terus ditingkatkan dengan melihat beberapa wilayah yang masih memiliki jumlah peserta KB aktif yang masih rendah di Sumatera Selatan.

Target Renstra BKKBN 2015-2019 dalam menurunkan jumlah fertiltas pada terdiri atas beberapa indikator, antara lain, adalah angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun),

pemakaian kontrasepsi (CPR), kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*), Peserta KB Aktif (PA) MKJP, dan tingkat putus pakai kontrasepsi. Indikator-indikator tersebut sebaiknya terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data Sumsel dalam Angka Tahun 2017, indikator tidak terdistribusikannya dengan baik peserta KB aktif disebabkan oleh adanya kabupaten yang memiliki jumlah peserta KB aktif terendah, yaitu Kabupaten Musi Rawas.

Penyebab rendahnya jumlah peserta KB aktif dan upaya meningkatkan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Musi Rawas menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam Upaya Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya kesertaan KB di Kabupaten Musi Rawas dan merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesertaan KB aktif di Kabupaten Musi Rawas.

### **Metodologi**

Metode penelitian ini menggunakan *mixed methods* (metode campuran) dengan *Sequential Explanatory Design*. Sampel yang digunakan berjumlah 55 responden yang dianalisis dengan teknik pengukuran Skala *Likert* kemudian dianalisis dengan frekuensi (proporsi) pada program SPSS untuk melihat persentase setiap distribusi jawaban pada pendekatan kuantitatif serta kepada 9 informan, akan dilakukan wawancara secara mendalam dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data pada pendekatan kualitatif.

**Pembahasan**

*Penyebab Rendahnya Kesertaan KB di Kabupaten Musi Rawas*

PUS yang ada di Kabupaten Musi Rawas memiliki banyak alasan yang menyebabkan mereka tidak ikut serta sebagai peserta KB aktif. Delapan alasan di antaranya adalah

masih ingin mendapatkan anak dengan kelamin yang berbeda (65,5 persen), tidak memahami pentingnya KB (61,8 persen), status pekerjaan suami (60 persen), tidak ada kegiatan/program KB yang di wilayah tersebut (56,4 persen), tidak ada alat/cara KB yang sesuai dengan keinginan (54,5 persen), jumlah anak yang lebih dari 2 (52,7 persen), pemahaman bahwa banyak anak banyak

**Tabel 1 Penyebab Rendahnya Kesertaan KB di Kabupaten Musi Rawas**

No	Penyebab rendahnya kesertaan KB	Pertanyaan		
		Setuju %	Netral %	Tidak Setuju %
1	Jumlah anak lebih dari 2 orang anak	52,7	7,3	40
2	Pemahaman bahwa banyak anak banyak rezeki	45,5	12,7	41,8
3	Khawatir akan merasa kesepian	45,5	10,9	43,6
4	Masih berkeinginan mendapat anak dengan jenis kelamin yang berbeda	65,5	10,9	23,6
5	Usia suami yang masih muda	30,9	9,1	60
6	Usia istri yang masih muda	23,6	9,1	67,3
7	Usia pernikahan yang masih muda	27,3	10,9	61,8
8	Status pekerjaan suami	60	5,5	34,5
9	Status pekerjaan istri	10,9	9,1	80
10	Faktor sosial	12,7	18,2	69,1
11	Faktor agama	16,4	10,9	72,7
12	Faktor budaya	10,9	3,6	85,5
13	Sifat KB yang rumit	16,4	12,7	70,9
14	Tidak memahami pentingnya KB	61,8	5,5	32,7
15	Tidak tersedianya alat KB	5,5	10,9	83,6
16	Tidak tersedianya petugas KB	10,9	9,1	80
17	Tidak ada alat/cara KB yang sesuai keinginan	54,5	16,4	29,1
18	Jarak tempat pelayanan KB terlalu jauh	9,1	10,9	80
19	Tidak ada kegiatan/program KB	56,4	7,3	36,3
20	Faktor ekonomi	9,1	16,4	74,5

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian 2017

rezeki (45,5 persen), dan khawatir merasa kesepian jika memiliki sedikit anak (45,5 persen). Sementara itu, alasan agama yang merupakan salah satu alasan yang terendah hanya menunjukkan angka 16,4 persen saja. terkait dengan alasan tersebut, fakta yang ada di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan persamaan dengan hasil penelitian dari Yeatman, dkk. (2008: 1873) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara agama dengan pemakaian kontrasepsi di perdesaaan Malawi. Untuk lebih detail tentang alasan penyebab rendahnya kesertaan KB di Kabupaten Musi Rawas yang lebih dominan, dapat dilihat pada Tabel 1.

PUS menginginkan anak yang berjenis kelamin berbeda merupakan alasan terpenting bagi mereka yang menyebabkan mereka tidak ikut serta menggunakan KB. Hal itu tampak dari persentasenya yang paling tinggi dibandingkan dengan alasan lainnya. Alasan dengan persentase tertinggi kedua adalah mereka tidak memahami pentingnya program KB.

a. Jumlah Anak Lebih dari Dua

PUS di wilayah Musi Rawas menyatakan pendapat dan persetujuan mereka bahwa mereka tetap menginginkan jumlah anak lebih daripada dua. PUS berharap di masa depan, anak-anaknya dapat membantu dan menemani mereka yang telah menurun kondisi kesehatannya. Memiliki jumlah anak yang banyak mampu memberikan kepuasan dan keyakinan bahwa mereka tidak akan terlantar di masa tuanya. Mereka berharap akan mendapatkan banyak pilihan untuk tinggal bersama anak yang memberikan nyaman terbaik. Data di atas menunjukkan bahwa secara signifikan, 52,7 persen PUS menyetujui hal ini. Namun, terdapat 40 persen PUS di wilayah ini yang tidak setuju

dengan alasan itu. Walaupun terdapat selisih 13 persen, dapat disimpulkan bahwa alasan ini tetap lebih menonjol di wilayah tersebut.

b. Pemahaman bahwa Banyak Anak Banyak Rezeki

Pemikiran yang masih ada di benak PUS bahwa anak akan memberikan rezeki bagi mereka karena mereka percaya setiap individu telah memiliki rezekinya masing-masing. Pemahaman ini memberikan kenyamanan tersendiri bahwa kehidupan mereka akan baik-baik saja jika mereka memiliki banyak anak. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk tidak ikut serta menggunakan KB.

Pemahaman bahwa banyak anak banyak rezeki adalah pemahaman lama yang masih ada sampai sekarang. Kebanyakan mereka mendapat pembenaran dengan mengatakan bahwa sampai saat ini anak-anaknya tetap dapat makan tanpa melihat nilai kualitas. Beberapa kasus menunjukkan bahwa keluarga yang mampu berhasil mendidik anaknya dengan baik, tetapi tidak sedikit pula yang tidak mampu meningkatkan kualitas anak-anaknya karena putus sekolah akibat rendahnya kondisi ekonomi mereka. Berdasarkan data kuantitatif dan deskripsi kualitatif dapat dirincikan sebagai berikut. Terdapat 45 persen persentase PUS yang menyetujui bahwa banyak anak banyak rezeki, 42 persen PUS tidak setuju, dan yang ragu-ragu atau netral hanya berkisar 13 persen. Walaupun PUS yang menyetujui bahwa banyak anak banyak rezeki tampak mendominasi, proporsi perbedaan angkanya tidak terlalu jauh dengan PUS yang tidak setuju karena hanya berkisar 3 persen saja.

c. Khawatir Merasa Kesepian

Dalam kehidupan berkeluarga, teman hidup tidak hanya berarti suami atau istri karena buah hati juga merupakan bagian terpenting dalam keluarga. Seorang ayah dan ibu akan merasa kesepian jika anak-anaknya telah menikah atau bekerja di wilayah lain. Oleh karena itu, mereka berusaha melahirkan banyak anak supaya di antara banyak anaknya, ada yang tetap memilih tinggal bersama mereka atau mereka dapat ikut tinggal di tempat anaknya tersebut. Alasan ini masih tetap menjadi pilihan para PUS untuk tidak melaksanakan program KB walaupun proporsi jawaban mereka yang setuju dan tidak setuju hanya selisih sedikit.

Ketika anak-anaknya pergi meninggalkan orang tuanya untuk bekerja, menikah, dan sebagainya, maka masih ada anak yang lainnya. Setidaknya masih ada yang mewarisi rumah dan ladang mereka karena biasanya selalu ada anak yang menurunkan warisan rumah dan ladang orang tuanya kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa jika memiliki jumlah anak yang sedikit, tidak ada yang akan menggantikan mereka dan membantu mereka jika telah tidak mampu melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar. Data dari Tabel 1 menunjukkan bahwa selisih jawaban antara mereka bagi yang setuju dengan yang tidak setuju hanya 1 persen yang artinya merasakan kesepian bukanlah jawaban yang paling tepat sebagai penyebab mereka tidak menggunakan KB dan ini akan berdampak pada peningkatan jumlah peserta KB.

d. Masih Berkeinginan Mendapat Anak dengan Jenis Kelamin yang Berbeda

Berdasarkan hasil data di lapangan, PUS di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan keinginan untuk mendapatkan anak dengan

jenis kelamin yang berbeda sehingga mereka tidak ikut serta dalam program KB. Mereka juga sama beranggapan bahwa anak dengan jenis kelamin berbeda akan memberikan karakteristik dan keunikan yang berbeda pula. Bagi mereka, anak laki-laki dapat membantu mereka dalam kegiatan berladang serta membantu melindungi ibu dan saudara-saudara perempuannya. Begitu juga dengan anak perempuan, mereka dapat membantu ibunya untuk memasak, mencuci pakaian, dan urusan rumah tangga lainnya. Secara psikologis, anak laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula sehingga dapat melengkapi memenuhi kebutuhan psikologis dalam hidup berumah tangga.

Pada Tabel 1 tampak PUS yang tidak setuju hanya 23,6 persen serta mereka yang setuju dan yakin bahwa mereka tidak menggunakan KB karena alasan ingin mendapatkan anak-anak dengan jenis kelamin yang berbeda sebesar 65 persen. Ada di antara mereka yang menginginkan anak laki-laki terlebih dulu dan disusul oleh anak perempuan. Selanjutnya mereka akan merasa tidak cukup dengan sepasang anak saja sehingga menambah sepasang berikutnya. Kepuasan mempunyai anak dengan jenis kelamin yang berbeda ini merupakan alasan yang telah ada sejak lama.

e. Status Pekerjaan Suami

Berprofesi sebagai petani mengharuskan mereka meluangkan waktu dari pagi, siang, dan sore untuk berladang setiap harinya. Jika mereka tidak pergi berladang, maka mereka tidak mendapatkan penghasilan untuk keesokan harinya. Bekerja di sektor pertanian mewajibkan mereka selalu merawat ladangnya jika tidak ingin tanamannya layu. Pekerjaan ini menyebabkan para suami tidak

*Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan*

dapat mengantarkan para istri mengakses KB. Selain itu, pada dasarnya dengan status pekerjaan suami yang sebagian besar sebagai petani, mereka tidak terlalu peduli dengan kesertaannya dalam KB. Data di atas mendeskripsikan bahwa status pekerjaan suami memengaruhi akses KB istri sebesar 60 persen. PUS yang tidak setuju sebanyak 34,5 persen dan 5,5 persen masih ragu dalam memilih alasan ini.

f. Tidak Memahami Pentingnya KB

Sebagian PUS yang berada di wilayah ini masih tinggal di perdesaan yang notabene masih mengikuti gaya hidup tradisional. Begitu pula dengan pemahaman KB mereka yang masih terbatas. Pemahaman mereka tentang pantang berkala dan sistem kalender tradisional dalam menggunakan KB masih berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa 61,8 persen berpendapat bahwa mereka hanya paham KB sebagai kegiatan untuk menekan jumlah anak, tetapi belum mampu memaknai manfaat KB yang sebenarnya. Sebagaimana diketahui, manfaat KB selain menekan jumlah penduduk adalah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.

g. Tidak Ada Alat/Cara KB yang Sesuai Keinginan

PUS yang ada di Kabupaten Musi Rawas juga memiliki permasalahan dalam penggunaan KB. Banyak PUS merasa tidak cocok dengan semua jenis KB yang mereka gunakan, baik yang digunakan oleh Wanita Usia Subur (WUS) maupun untuk pria. Pada penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat 54,5 persen PUS yang menyetujui pendapat tersebut. Mereka yang

tidak menyetujui hanya sebesar 29,1 persen dan yang netral atau ragu-ragu bernilai 16,4 persen.

h. Tidak Ada Kegiatan/Program KB

PUS di Kabupaten Musi Rawas merasa sosialisasi terkait program KB masih kurang. Ketika dilakukan wawancara secara mendalam, mereka beranggapan bahwa telah ada sosialisasi, tetapi tidak langsung kepada warganya. Wilayah yang luas dan berjauhan serta adanya keterisolasian tempat tinggal menyulitkan mereka mendapatkan sosialisasi. Bukan hanya itu saja, kesibukan berladang membuat mereka juga tidak memiliki waktu untuk mencari informasi tentang KB. Keterbatasan ini membuat mereka tidak menggunakan KB secara benar dan hanya menggunakan yang masih sederhana, yaitu KB kalender dan sanggama terputus, yang masih tinggi risiko kehamilannya.

Kasus penyebab rendahnya peserta KB aktif ini sebenarnya hanya disebabkan oleh kurang pemerataan sosialisasi, terutama pada PUS yang berada di wilayah-wilayah pelosok. Sebanyak 56,4 persen PUS menyetujui alasan ini sebagai faktor penyebab rendahnya peserta KB aktif. Untuk PUS yang berada dekat pusat kota di kawasan Musi Rawas, mereka tidak menyetujuinya karena mereka merasa telah mendapatkan sosialisasi tentang KB.

*Upaya Meningkatkan Keikutsertaan Peserta KB Aktif dalam Rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa rendahnya peserta KB aktif di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh banyak faktor.

Hasil penelitian ini mendukung teori Bulatao (Adioetomo dan Samosir, 2011: 192) yang mengatakan adanya faktor-faktor penentu KB. Alasan-alasan tersebut adalah jumlah anak lebih daripada dua, pemahaman bahwa banyak anak banyak rezeki, khawatir merasa kesepian, masih berkeinginan mendapat anak dengan jenis kelamin yang berbeda, usia suami yang masih muda, usia istri yang masih muda, usia pernikahan yang masih muda, status pekerjaan suami, tidak memahami pentingnya KB, tidak ada alat/cara KB yang sesuai keinginan, dan tidak ada kegiatan/program KB.

Upaya meningkatkan keikutsertaan peserta KB Aktif dalam rangka pencapaian target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, perlu adanya bantuan dana untuk menjangkau wilayah yang terlampaui jauh karena wilayah inilah yang rawan fertilitas dengan tingkat kesehatan yang rendah. Selain itu, diperlukan juga penambahan petugas pelayanan KB yang berasal dari tiap wilayah yang ada dan memiliki kedekatan hubungan emosional dengan PUS. Dengan demikian, ketika PUS datang ke tempat pelayanan, mereka merasa nyaman dan lebih terbuka membicarakan alat KB yang mereka inginkan.

Kedua, pada sisi lain pemerintah juga memberikan pelatihan khusus terhadap petugas KB untuk menghadapi karakteristik PUS yang unik dan dengan budaya yang masih tertutup. Petugas diharapkan mampu merangkul PUS yang sulit mengambil keputusan untuk ikut serta pada program KB. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah manajemen waktu untuk melakukan sosialisasi. Diharapkan bahwa sosialisasi dapat dilakukan pada waktu yang paling tepat karena PUS di Kabupaten Musi Rawas

Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki pekerjaan di sektor pertanian yang sehari-harinya mereka menghabiskan waktu di lahan pertanian tempat mereka bekerja.

Ketiga, sosialisasi dan pelatihan tentang alat KB pada PUS terus dikampanyekan, baik secara langsung mendatangi dari rumah ke rumah maupun di acara-acara formal dan semiformal, misalnya dalam kegiatan musyawarah desa dan hajatan warga. Hal ini dilakukan agar sosialisasi dapat berlangsung secara spontan dalam suasana kumpul dan berdiskusi bersama. Kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program KB juga perlu dijalin, seperti pemangku kepentingan yang berasal dari Dinas Kesehatan dan lurah/kadus/kades. Pendekatan tokoh masyarakat dapat dijadikan pelopor bagi PUS untuk ikut serta program KB. Pendekatan pada tokoh masyarakat merupakan cara yang terbaik agar PUS mendapatkan keyakinan dan kepercayaan akan hadirnya hubungan emosional di antara mereka.

Keempat, diberikan bantuan alat kontrasepsi secara gratis. Sebaiknya pemasangan dan bantuan alat kontrasepsi di pos-pos tertentu maupun datang secara langsung ke rumah-rumah. Khususnya pada PUS yang berada di kabupaten yang memiliki keadaan ekonomi yang rendah, sebaiknya diberikan alat dan pemasangan alat KB secara gratis. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan juga terjadi di wilayah pelosok Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan demi tercapainya Target Renstra BKKBN 2015-2019.

Kelima, pengguna KB perlu diberikan apresiasi agar dapat terus mengalami peningkatan. Bentuk apresiasi dapat berupa perlombaan bagi kampung-kampung atau desa yang memiliki PUS terbanyak yang menggunakan KB. Pemenangnya akan



*Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan*

diberikan hadiah berbentuk barang atau santunan bantuan pendidikan bagi salah satu anak dari lingkungan mereka. Hal yang sama terjadi di Peru. Menurut Gribble, dkk. (2007: 179), dalam merumuskan kebijakan, perlu diperhatikan bahwa perempuan Peru yang tidak mampu merupakan masyarakat yang miskin dan sangat rentan memiliki jumlah anak yang banyak jika tidak segera diantisipasi. Dari hasil penelitiannya, dikatakan bahwa perempuan yang ekonominya tinggi akan lebih optimal menggunakan program Keluarga Berencana. Oleh karena itu, program KB harus terjangkau oleh orang miskin karena dari sisi ekonomi, mereka tergolong masyarakat dengan ekonomi yang rendah.

Pada kegiatan akhir dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk melihat hambatan dan kekurangan yang memengaruhi proses berjalannya program KB. Selain itu, perlu dilakukan umpan balik serta tinjauan kembali dari hasil *monitoring* dan evaluasi agar dapat diperbaiki pada program KB berikutnya demi tercapainya target Renstra BKKBN 2015-2019.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penyebab rendahnya peserta KB aktif di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Berikut ini adalah delapan alasan yang menyebabkan ketidakikutsertaan PUS sebagai peserta KB aktif. Pertama adalah jumlah anak lebih daripada dua. Kedua adalah adanya pemahaman bahwa banyak anak banyak rezeki. Ketiga adalah adanya kekhawatiran akan merasa kesepian jika memiliki sedikit anak. Keempat adalah masih adanya keinginan mendapatkan anak dengan kelamin yang berbeda. Kelima adalah status pekerjaan suami. Keenam adalah tidak

memahami pentingnya program KB. Ketujuh adalah tidak ada alat/cara KB yang sesuai dengan keinginan. Kedelapan adalah tidak ada kegiatan/program KB yang di wilayah tersebut.

Upaya meningkatkan keikutsertaan peserta KB aktif dalam rangka pencapaian target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, diperlukan adanya bantuan dana untuk menjangkau wilayah yang terlampaui jauh. Kedua, menambah jumlah petugas pelayanan KB dan memberikan pelatihan khusus pada petugas KB. Ketiga, mengkampanyekan sosialisasi dan pelatihan alat KB pada PUS melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat. Keempat, memberikan bantuan alat dan pemasangan kontrasepsi secara gratis. Kelima, pengguna KB perlu diberikan apresiasi agar dapat terus mengalami peningkatan.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan rumusan kebijakan untuk meningkatkan keikutsertaan peserta KB aktif dalam rangka pencapaian target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Rumusan kebijakan itu dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut.

#### **Tahap Pertama**

1. Adanya bantuan dana tambahan untuk menjangkau wilayah pedalaman. Dalam hal ini disarankan kepada pemerintah untuk memberikan dana tambahan agar dapat menjangkau wilayah pedalaman di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Adanya penambahan petugas

pelayanan KB. Agar dapat berjalan dengan baik, sebaiknya ada penambahan tugas pelayanan KB yang berasal dari wilayahnya masing-masing dan memiliki kedekatan hubungan emosional. Dengan demikian, ketika PUS datang ke tempat pelayanan, mereka merasa nyaman dan lebih terbuka terkait dengan alat KB yang mereka inginkan.

3. Adanya pelatihan petugas KB untuk menghadapi karakteristik PUS yang berbeda-beda. Petugas KB diberikan pelatihan terlebih dulu untuk menghadapi PUS yang memiliki karakteristik unik dan berasal dari latar belakang budaya yang masih tertutup. Petugas diharapkan mampu merangkul PUS yang sulit menemukan keputusan dalam ikut serta pada program KB.
4. Adanya manajemen waktu dalam bersosialisasi. Adanya pengaturan waktu yang paling tepat untuk mendatangi PUS yang jarang ada di rumah, misalnya dengan mencari waktu yang tepat dan membuat janji terlebih dulu kepada PUS. Berdasarkan hasil penelitian, biasanya mereka hanya memiliki waktu santai pada sore dan malam hari.

#### Tahap Kedua

1. Diberikan sosialisasi dan pelatihan alat KB pada PUS. Setelah membuat janji dengan PUS, petugas KB dan menyosialisasikan dan memberi pelatihan tentang tata cara penggunaan KB.
2. Petugas KB dapat ikut serta mengampanyekan penggunaan KB dengan ikut dalam kegiatan-kegiatan desa, seperti ikut hadir dalam acara musyawarah desa yang telah

teragenda, dan acara hajatan warga yang meminta waktu. Dalam acara-acara itu, mereka akan meminta izin untuk menyampaikan makna KB dan informasi agar warga dapat mengakses KB di tempat-tempat yang telah ada di sekitarnya.

3. Adanya kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program KB. Hal itu dimaksudkan agar program dapat berjalan sesuai tujuan dan mendapatkan bantuan yang mendukung berjalan program KB tersebut. Para pemangku kepentingan yang dimaksudkan, misalnya, adalah yang berasal dari Dinas Kesehatan dan lurah/kadus/kades.
4. Adanya pendekatan dengan tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat merupakan elemen penting dalam memelopori PUS untuk ikut serta dalam program KB. Pendekatan pada tokoh masyarakat merupakan cara yang terbaik agar PUS mendapatkan keyakinan dan percaya kepada program KB.

#### Tahap Ketiga

1. Adanya bantuan alat KB gratis, serta pemasangan dan bantuan alat KB di pos-pos tertentu maupun datang secara langsung ke rumah-rumah. Khususnya pada PUS yang berada di kabupaten yang memiliki keadaan ekonomi yang rendah, sebaiknya mereka diberikan alat dan pemasangan alat KB secara gratis.
2. Adanya apresiasi terhadap pengguna KB. Pentingnya memberikan apresiasi pada pengguna KB ini agar terjadi peningkatan PUS yang melakukan program KB tersebut. Bentuk apresiasi dapat berupa perlombaan yang

*Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan*

diadakan di kampung-kampung atau desa yang terbanyak PUS pengguna KB dengan memberikan hadiah berbentuk barang atau santunan bantuan pendidikan bagi salah satu anak dari lingkungan mereka.

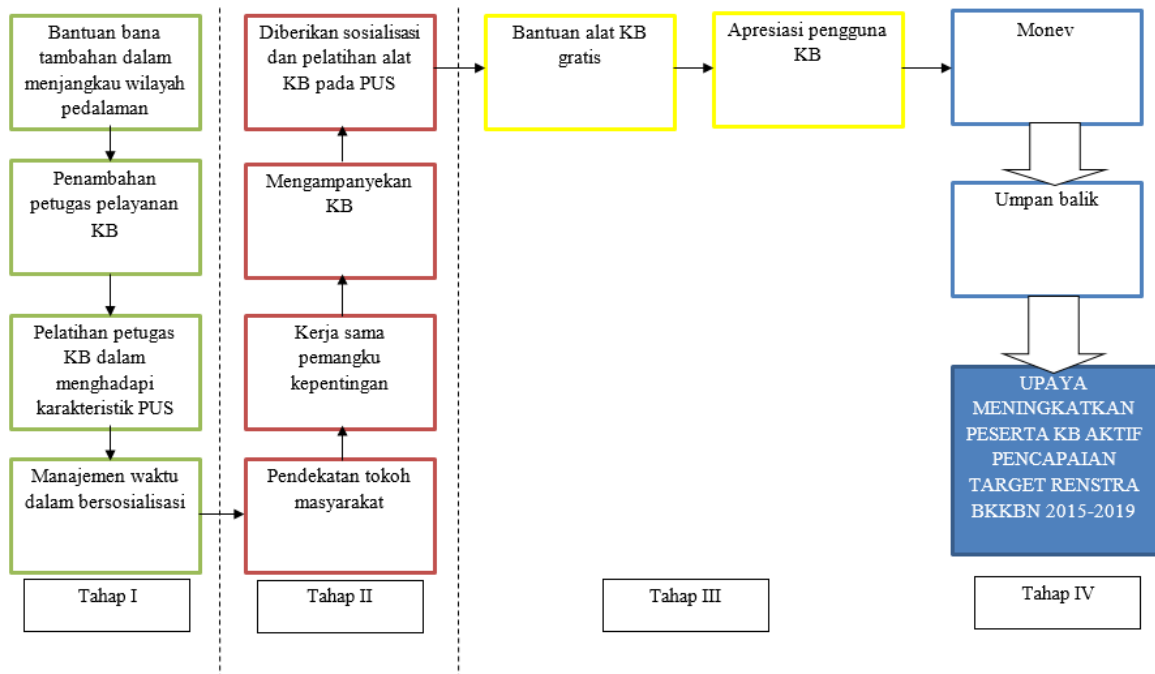
**Tahap Keempat**

1. Dilakukan monev terhadap setiap kegiatan demi berlangsungnya program dengan lebih baik. Pada proses ini dapat dilihat hal-hal saja yang akan menjadi hambatan dan kekurangan yang dapat memengaruhi proses berjalannya program KB.
2. Adanya umpan balik dan tinjauan

kembali dari hasil *monitoring* dan evaluasi untuk memperbaiki proses program KB yang lebih baik di masa yang akan datang dalam Target Renstra BKKBN 2015-2019.

Tahapan-tahapan dari rumusan kebijakan di atas dapat disederhanakan dalam sebuah permodelan rekaya sosial/ rumusan kebijakan. Adapun permodelan kebijakan upaya meningkatkan keikutsertaan peserta KB aktif dalam rangka pencapaian target renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

**Permodelan Kebijakan Upaya Meningkatkan Keikutsertaan Peserta KB Aktif dalam Rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019 di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan**



## Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini sepenuhnya dibiayai oleh Pusat Puslitbang KB dan KS, BKKBN tahun 2017.

## Daftar Pustaka

- Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Samosir, Omas Bulan. 2011. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- BKKBN. 2016. *Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam Mendukung Keluarga Sehat*. Jakarta: BKKBN.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2014. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan 2014*. Palembang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Sumatera Selatan Dalam Angka 2017*. Palembang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2017. *Sumatera Selatan Dalam Angka 2017*. Palembang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS Kabupaten Musi Rawas. 2017. *Sumatera Selatan Dalam Angka 2017*. Palembang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Gribble, James N. dkk. 2007. "Family Planning Policies and Their Impacts on the Poor: Peru's Experience". *International Family Planning Perspectives Journal*. Vol.33 No.4. Desember 2007 Hlm.176-181.
- Mantra, Ida Bagoes. 2015. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, Wahyu and Badrun Munandar. 2017a. "Keputusan Mempunyai Anak Bagi Penduduk Migran Di Pemukiman Kumuh Kota Palembang." *Seminar Nasional Kependudukan & Kebijakan Publik* 1(1):82–99. Retrieved (<http://conference.unsri.ac.id/index.php/semankkap/article/view/474/362>).
- Saputra, Wahyu and Badrun Munandar. 2017b. "Kondisi Pekerjaan Dan Ekonomi Migran Dalam Keputusan Memilih Alat Kontrasepsi Di Pemukiman Kumuh Kota Palembang." *Demography Journal of Sriwijaya* 5(1):17–23. Retrieved (<http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/27/21>).
- Soebyakto, Bambang Bemby and Wahyu Saputra. 2015. "Influencing Factors of Migrant and Non Migrant Male Worker Income in Informal Sectors : Emprical Study in Kuto Batu Village Ilir Timur District Palembang City." *International Journal of Contemporary Applied Sciences* 2(7):57–74. Retrieved ([http://eprints.unsri.ac.id/5809/2/influence\\_factor\\_of\\_migrant\\_and\\_non\\_migrant\\_male\\_worker\\_income\\_in\\_formal.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/5809/2/influence_factor_of_migrant_and_non_migrant_male_worker_income_in_formal.pdf)).
- Soebyakto, Bambang Bemby, Sukmaniar, and Wahyu Saputra. 2016. "Actualization Social Migration and Intensity of Education : A Case Study in Developed and Developing Countries." *Proceeding Sriwijaya Economic and Business Conference 2016* 692–98. Retrieved ([http://eprints.unsri.ac.id/7095/2/064\\_SEABC\\_Bambang\\_Bemby\\_Soebyakto.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/7095/2/064_SEABC_Bambang_Bemby_Soebyakto.pdf)).
- Sukmaniar, Moch Edward Romli, and Devi Novita Sari. 2017. "Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi pada Mahasiswa dari Desa untuk Kuliah di Kota Palembang." *Demography Journal of Sriwijaya* 5(1):1–10. Retrieved (<http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/25/19>).
- Tarmizi, Nurlina. 2013. *TriMatra Kependudukan*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- Yeatman, Sara E. dkk. 2008. "Beyond denomination: The relationship between religion and family planning in rural Malawi". *Demographic Research Journal* Vol.19 No.55. 24 Oktober 2008.

## Kualitas Perparkiran Kota Yogyakarta dari Multiperspektif

Eddy Kiswanto dan Triyastuti Setianingrum

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Eddy Kiswanto (e-mail: eddykiswanto\_cppts@ugm.ac.id)

### Abstrak

Tulisan ini memperlihatkan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan perparkiran yang diselenggarakan Dinas Perhubungan. Penilaian tingkat kepuasan masyarakat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif pengguna parkir, juru parkir (jukir), dan masyarakat di sekitar lokasi parkir. Penilaian nilai indeks menunjukkan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik pelayanan publik demikian pula sebaliknya. Berdasarkan data, fasilitas di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) dinilai kurang baik. Biaya pelayanan di TJU dinilai tidak baik, sedangkan biaya pelayanan di TKP dinilai kurang baik. Aktivitas parkir di TJU dan TKP dinilai mengganggu oleh masyarakat sekitar lokasi parkir. Aktivitas parkir jugadinilai mengganggu aktivitas lalu lintas, masyarakat, dan menimbulkan kebisingan. Namun, masyarakat sekitar tidak keberatan dengan aktivitas perparkiran. Keberadaan jukir dinilai membantu mengurangi aktivitas parkir yang mengganggu aktivitas lalu lintas tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap juru parkir (jukir) menunjukkan seragam Jukir dinilai kurang dan aspek pembinaan dinilai relatif baik. Sementara itu, indeks multiperspektif menunjukkan nilai kurang baik.

**Kata kunci:** indeks, Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir, juru parkir

## The Quality of Parking in Yogyakarta City from Multi-Perspectives

### Abstract

This paper shows the community's satisfaction of parking management by Department of Transportation and provides inputs to improve the public services' quality. The satisfaction seen from various perspectives, namely the perspective of costumers, the parking officers (jukir), and the community surrounded the parking lot. Assessment of satisfaction level on the index value, where higher values indicate better public services. Survey data indicates that existing facilities at TJU and TKP are still considered inadequate. The cost of services in TJU is categorized bad, while service charge at the location has a bad index value. The parking activity in TJU and TKP is considered as disturbing the community surrounded the parking lot. Parking activity is also considered interfering the traffic activity, community activity, and become the noise. Even so, the surrounding community receives parking activity well. The existence of jukir also is helpful in reducing the parking activity that disrupt the traffic activity. The value of parking officers (*jukir*) shows from the side of parking facilities that are considered less uniform of *jukir* and guidance aspects is considered relatively good. Meanwhile, multiperspective index show less good value.

**Keywords:** index, Roadside Public, Special Parking Area, parking officers

## **Pendahuluan**

### *Latar Belakang*

Birokrasi, reformasi birokrasi, dan penciptaan pelayanan publik berkualitas telah menjadi komitmen pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2011, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025, Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi (RMRB). Sementara itu, pelayanan publik diatur dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang segera disusul lima peraturan pemerintah lainnya (yang membahas ruang lingkup, sistem pelayanan terpadu, standar pelayanan, pelayanan berjenjang, dan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik). Tata pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan reformasi birokrasi, penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak menjadi lebih produktif, efisien, dan produktif. Pelaksana otonomi daerah diharapkan mampu secara optimal membangun bangsa dan negara Indonesia secara terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan. Pelaksanaan pemerintahan sekarang bergeser dari "pelaksana" (*rowing*) ke "pengarah" (*steering*) menuju tata pemerintahan yang baik, *reinventing government* dari *government* ke *governance* (Komarudin, 2011).

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satu capaian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan didasarkan pada partisipasi masyarakat, dalam hal ini melalui mekanisme survei kepuasan masyarakat. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Secara definitif, survei kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik (Permen Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pasal 1). Saat ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru mengenai penyusunan SKM, yaitu melalui Permen PANRB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dengan penyelenggaraan SKM diharapkan akan diperoleh indeks kepuasan layanan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi. Pada sisi lain, melalui IKM, instansi penyedia layanan dapat menangkap dan merespons perubahan kebutuhan, persepsi, dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan. Pengukuran IKM juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa kali pengukuran IKM. Hal ini berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Perwal Nomor 74 Tahun 2014. Perwal tersebut merupakan

Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pedoman penyusunan SKM. *Output* dalam kegiatan SKM adalah keluarnya nilai IKM. Sementara itu, IKM dimaknai sebagai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Pengukuran IKM yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan suatu proses yang secara metodologis terstruktur dan dilakukan untuk menjaring masukan masyarakat berkaitan dengan aspek-aspek pelayanan.

Hasil survei kepuasan masyarakat menjadi bahan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang dinilai penting dan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu berarti IKM dapat juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menetapkan kebijakan lanjutan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta di masa mendatang. Tulisan ini merupakan penelitian yang dilakukan PSKK UGM bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai penilaian masyarakat terhadap pelayanan utilitas kota.

### *Tujuan*

Studi ini memiliki dua tujuan sebagai berikut.

1. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan perparkiran yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
2. memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **Tinjauan Pustaka**

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Birokrasi merupakan institusi yang menggerakkan pembangunan karena tanpa peran birokrasi, pembangunan akan mengalami kemandekan dan justru kehilangan arah. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi internal adalah melalui reformasi birokrasi di berbagai bidang strategi, seperti proses rekrutmen pegawai yang ketat, perbaikan kesejahteraan, mekanisme kerja yang transparan, serta adanya *reward merit system* (memberikan penghargaan dan imbalan sesuai pencapaian prestasi) dan bukannya *spoil system* (hubungan kerja yang kolusif dan diskriminatif), belum mampu membuat konstruksi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Konteks reformasi didefinisikan sebagai perubahan radikal untuk perbaikan di berbagai bidang dalam suatu masyarakat atau negara. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat juga diartikan sebagai perubahan radikal dalam bidang sistem pemerintahan. Susunan birokrasi pemerintah bukan hanya diisi oleh birokrat karier, tetapi juga pejabat politik. Menurut teori liberal, birokrasi pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan

rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Dengan demikian, birokrasi pemerintah itu bukan hanya diisi oleh para birokrat, tetapi juga terdiri atas bagian-bagian tertentu yang diduduki oleh pejabat politik (Carino, 1994).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya melakukan pembaruan serta perubahan mendasar dan signifikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur, serta ketatalaksanaan (*business process*, mekanisme, sistem, dan prosedur) yang berujung pada penciptaan pelayanan publik prima dan berkualitas. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/good public governance*).

Birokrasi melayani masyarakat (pengguna/penerima layanan) yang diwujudkan dalam kemudahan pelayanan (baik syarat, prosedur, waktu, biaya, dan produk), pelayanan informasi, pengawasan internal, kepuasan pelanggan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Sampara (2000) menegaskan bahwa yang ingin diciptakan dalam pelayanan publik adalah *excellent service: self-awareness and esteem, sympathy and enthusiasm, reform, vision and victory, innovative and impressive, care and cooperative, empowerment and evolution*. *Excellent service* tersebut harus didukung oleh birokrat yang memiliki sifat *feeling better* (merasa lebih baik), *getting better* (menjadi lebih baik), dan *staying better* (tetap dalam keadaan lebih baik). Tujuh nilai utama *excellent service* yang perlu ditegakkan adalah *charity* (melayani dengan hati nurani), *competency*, *commitment*, *consistency*, *care*, *continuous*, dan *communication*. Dengan kata lain, reformasi birokrasi dan pelayanan publik berusaha membangun aparat negara dan birokrasi yang melayani, profesional,

bersih, efektif, efisien, produktif, transparan, akuntabel, dan kredibel.

Masyarakat berhak atas “pelayanan prima” sebagai konsekuensi dari prinsip *customer-driven government* dalam pelaksanaan reformasi administrasi/pembaruan birokrasi (*reinventing government*). Dalam bukunya berjudul *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)* yang terbit tahun 2008, David Osborne dan Ted Gaebler menyarankan adanya penataan dan pembaruan birokrasi pemerintahan secara menyeluruh (*reinventing government*) dan mewirauahakan birokrasi (*enterprising government*) dengan membangun aspek berikut ini.

1. pemerintah berorientasi pelanggan (*customer-driven government, meeting the needs of the customers, not the bureaucracy*)
2. pemerintah berorientasi misi (*mission-driven government, transferring rule-driven organization*)
3. pemerintah yang tanggap (*anticipatory government, prevention rather than cure*)
4. pemerintah berorientasi hasil (*result-oriented government, funding outcomes, not inputs*)
5. pemerintah yang kompetitif (*competitive government, injecting competition into service delivery*)
6. pemerintah yang berjiwa wirausaha (*entreprising government, earning rather than spending*)
7. pemerintah yang terdesentralisasi (*decentralized government, from hierarchy to participation and teamwork*)
8. pemerintah milik masyarakat (*community-owned government, empowering rather than serving*)
9. pemerintah katalis (*catalytic government, steering rather than rowing*)
10. pemerintah berorientasi pasar (*government oriented market*).



Pelayanan yang baik hanya akan diwujudkan apabila di dalam organisasi pelayanan terdapat sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan warga negara, khususnya pengguna jasa pelayanan dan sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan warga negara. Fokus pada kepentingan warga negara merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh tiap-tiap unit pelayanan karena keberadaan unit pelayanan publik bergantung pada ada tidaknya warga negara yang membutuhkan jasa pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan bagi pemerintah. Kualitas pelayanan adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan. Pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan (Goetsch dan Davis, 2002).

Kualitas pelayanan menurut Evans dan Lindsay (2005) dapat dilihat dari berbagai sudut. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, maka kualitas pelayanan selalu dihubungkan dengan sesuatu yang baik/ prima (*excellent*). Jika kualitas pelayanan dipandang dari sudut *product based*, maka kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang spesifik, dengan variabel pengukuran yang berbeda-beda dalam penilaian kualitas sesuai dengan karakteristik produk yang bersangkutan. Kualitas pelayanan jika dilihat dari sudut *user based*, maka kualitas pelayanan adalah sesuatu yang diinginkan oleh pengguna layanan atau tingkat kesesuaian dengan keinginan pengguna layanan. Sementara itu,

jika dilihat dari *value based*, maka kualitas pelayanan merupakan keterkaitan antara kegunaan atau kepuasan dengan harga. Oleh karena itu, partisipasi pengguna layanan publik sangat penting untuk memberikan penilaian atas pelayanan yang diterimanya.

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dikenal dengan konsep *co-production*. Konsep ini dikenal pertama kali dan dikembangkan sejak tahun 1980-an ketika pakar administrasi publik dan politik urban membangun teori yang menjelaskan kegiatan kolektif dan peran kritis dari keterlibatan warga masyarakat dalam penyediaan pelayanan barang dan jasa. Pada dasarnya teori *co-production* mengonseptualisasikan pemberian layanan, baik sebagai sebuah penataan maupun proses, yaitu ketika pemerintah dan masyarakat membagi tanggung jawab (*conjoint responsibility*) dalam menyediakan pelayanan publik (Marschall, 2004). Dengan konsep tersebut, maka tidak dapat dibedakan antara warga masyarakat sebagai pelanggan tradisional dengan pemerintah sebagai penyedia layanan. Kedua pihak dapat bertindak sebagai bagian dari pemberi layanan. Konsep ini sebenarnya memberi ruang untuk dibangunnya inovasi ke dalam partisipasi masyarakat dengan bentuk baru dalam dunia pelayanan publik. Secara teori, *co-production* dalam pelayanan publik dapat dipahami melalui konsep-konsep pelanggan dan produksi di sektor publik, yaitu *consumer producer*, *regular producer*, dan *co-production*. Menurut Parks dan Kim (1996), *consumer producers* adalah pihak yang berhubungan dengan produksi yang pada akhirnya akan menjadi konsumen akhir dari produk yang dibuatnya. Di sisi lain, *regular producers* adalah yang menyelenggarakan proses produksi, yang akan mengubah *output* menjadi pembayaran, yang pada akhirnya akan membelanjakannya untuk barang dan

jasa lainnya. Dalam hal ini *co-production* memerlukan kedua pihak berkontribusi input pada proses produksi untuk arang dan jasa tertentu. Dengan kata lain, dalam banyak pelayanan, proses produksi *output* dan *outcome* memerlukan partisipasi aktif dari penerima layanan barang dan jasa.

Menurut Cooper dan Schindler (2006), partisipasi publik, terutama dalam proses pengambilan keputusan, adalah sarana untuk memenuhi hak dasar sebagai warga. Pada akhirnya tujuan dari partisipasi publik adalah untuk mendidik dan memberdayakan warga. Sementara itu, menurut Marschall (2004), tujuan dari partisipasi publik pada dasarnya adalah untuk mengomunikasikan dan memengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana juga membantu dalam pelaksanaan pelayanan. Heller, et.al. (1984) menjelaskan adanya dua bentuk dasar partisipasi, yaitu partisipasi akar rumput (*grass-root participation*) yang mengacu pada organisasi dan gerakan sosial yang didasarkan pada inisiatif warga yang memilih tujuan dan metode mereka sendiri, serta partisipasi mandat pemerintah (*government-mandated participation*) yang melibatkan persyaratan hukum bahwa akan ada kesempatan bagi masukan warga terhadap pengambilan keputusan (kebijakan) atau pelaksanaan sebuah lembaga.

Secara sederhana, Cooper dan Schindler (2006) membedakan partisipasi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi tidak langsung (*indirect participation*) dan partisipasi langsung (*direct participation*). Contoh partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat dalam hal penyelenggaraan negara dengan memilih wakilnya untuk duduk di kursi parlemen. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berupa pernyataan pendapat melalui media massa atau disampaikan langsung kepada

wakil rakyat. Sementara itu, partisipasi langsung dapat berupa keterlibatan secara langsung warga dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti menjadi komisi penasihat, berpartisipasi dalam dengar pendapat, keterlibatan di kelompok-kelompok kepentingan, dan partisipasi dalam lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan faktor yang sangat penting untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Konsep partisipasi masyarakat terhadap fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah dapat berupa partisipasi dalam hal menaati pemerintah, membangun kesadaran hukum, dan peduli terhadap peraturan yang berlaku. Di samping itu, dukungan lainnya dapat juga berupa dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum.

Salah satu aspek penting dalam sistem pelayanan publik adalah partisipasi masyarakat. Pemerintah melalui UU Nomor 25 tahun 2009 telah mengakomodasi peran masyarakat dalam pengembangan sistem pelayanan publik yang, antara lain, sebagai bagian dari organisasi penyelenggara, pengguna yang aktif, dan pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk mengadu (*voice*). Selain itu, masyarakat juga ikut terlibat dalam penyusunan standar pelayanan (Dwiyanto, 2010). Partisipasi masyarakat melalui pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan juga disebutkan dalam Permen PANRB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan. Salah satu mekanisme partisipasi masyarakat adalah dengan melakukan survei (Wang,

2011). Dengan survei tersebut, masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed methodology*) yang merupakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hal ini agar diperoleh data yang lebih lebih representatif untuk mengetahui nilai

IKM pengelolaan perparkiran. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam studi ini adalah kajian data sekunder dan *focus group discussion* (FGD). FGD dilakukan saat penyusunan instrumen penelitian hingga klarifikasi hasil penelitian. Selanjutnya pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei kepada masyarakat pengguna layanan (jukir, masyarakat sekitar lokasi parkir, dan pengguna layanan parkir).

Tabel distribusi populasi dan sampel sebagaimana Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1 Populasi dan Sampel**

Jenis Layanan	Populasi		Sampel
	Jenis Data	Jumlah	
Perparkiran			
a. Pengguna	Pengguna TJU	3.945.000	391
	Pengguna TKP (Senopati dan Ngabean)	17.780	
b. Juru parkir (Jukir)	Juru parkir TJU	868	79
c. Masyarakat sekitar	Penduduk Kota Yogyakarta Lokasi TKP dan TJU	394.012	108
	<b>Jumlah Sampel</b>		<b>488</b>

Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

**Tabel 2 Klasifikasi Nilai Indeks berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017

Analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif dan data diolah menggunakan perhitungan nilai indeks kepuasan layanan masyarakat. Sementara itu, tahapan yang dilakukan dalam perhitungan indeks adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah memeriksa kualitas data. Kemudian langkah kedua adalah mengonsistenkan pemberian nilai jawaban responden. Langkah ketiga adalah melakukan standardisasi skor nilai dan langkah terakhir adalah melakukan perhitungan indeks.

Setelah nilai indeks diperoleh, maka dilakukan interpretasi nilai indeks yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Permen PANRB membagi nilai indeks ke dalam empat kategori pelayanan, yaitu tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik (Tabel 2).

### **Karakteristik Responden**

Responden untuk pelayanan perparkiran terdiri atas beberapa kategori, yaitu pengguna layanan parkir, jukir, dan masyarakat sekitar lokasi parkir. Responden pengguna layanan perparkiran TJU dan TKP sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (90,5 persen). Pengguna layanan laki-laki di TKP mencapai 99,6 persen dan di TJU 68,4 persen. Sebagian besar responden TKP berprofesi sebagai kernet bus ataupun supir bus (sektor jasa). Sementara itu, responden masyarakat sekitar lokasi parkir yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan mempunyai persentase yang hampir sama: laki-laki sebesar 55,6 persen dan perempuan 44,4 persen. Dilihat dari pekerjaan responden,

93 persen responden pengguna layanan TKP bekerja di sektor jasa, sedangkan di TJU pekerjaan responden lebih bervariasi. Pekerjaan responden di TJU mulai dari wiraswasta, karyawan swasta, bahkan ada yang tidak bekerja. Mereka yang tidak bekerja sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar.

Rentang usia responden adalah antara kurang dari 30 tahun hingga lebih dari 45 tahun dan telah menikah. Dilihat dari tingkat pendidikan, responden pengguna layanan, baik di TJU maupun TKP, serta kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke atas (SMA ke atas). Tingkat pendidikan responden memberikan pengaruh terhadap ekspektasi mereka terhadap pelayanan. Responden pengguna layanan yang berpendidikan SMA ke atas mencapai 73,2 persen. Secara lebih detail, untuk pengguna di TJU yang berpendidikan SMA ke atas mencapai 92,7 persen dan di TKP mencapai 65 persen, sedangkan untuk kelompok masyarakat mencapai 63,9 persen.

Dalam hal kepemilikan dokumen KTP, hampir sebagian besar responden tidak ber-KTP Kota Yogyakarta. Secara umum, pengguna layanan yang tidak ber-KTP Kota Yogyakarta sebanyak 92,6 persen, sedangkan khusus untuk pengguna TJU sebesar 81,6 persen dan pengguna TKP sebesar 97,1 persen. Meskipun pengguna parkir TJU tidak ber-KTP Kota Yogyakarta, mereka bertempat tinggal di Kota Yogyakarta. Hal ini terlihat dari status pekerjaan responden yang masih pelajar/mahasiswa (kategori tidak bekerja), sedangkan untuk pengguna layanan di TKP, sebagian besar mereka adalah supir/kernet yang keberadaan di Kota Yogyakarta tidak untuk menetap. Detail karakteristik responden, baik di TJU maupun TKP tampak seperti Tabel 3 berikut.

**Tabel 3 Karakteristik Responden TJU dan TKP**

Karakteristik	Total (N=391)		TJU (N=114)		TKP (N=277)	
	N	Persen	N	Persen	N	Persen
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-laki	354	90,5%	78	68,4%	276	99,6%
Perempuan	37	9,5%	36	31,6%	1	0,4%
<b>Status Perkawinan</b>						
Kawin	295	75,4%	56	49,1%	239	86,3%
Tidak/belum kawin	94	24%	57	50%	37	13,4%
Cerai hidup/mati	2	0,5%	1	0,9%	1	0,4%
<b>Usia responden</b>						
< 30 tahun	114	29,2%	67	58,8%	47	17%
30-34 tahun	34	8,7%	8	7%	26	9,4%
35-39 tahun	71	18,2%	12	10,5%	59	21,3%
40-44 tahun	58	14,8%	9	7,9%	49	17,7%
> 45 tahun	114	29,2%	18	15,8%	96	34,7%
<b>Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan</b>						
Tidak/belum pernah sekolah	1	0,3%	0	0	1	0,4%
Tidak lulus SD	3	0,8%	0	0	3	1,1%
SD/MI/SR	30	7,7%	2	1,8%	28	10,1%
SMP/MTs	771	18,2%	6	5,3%	65	23,5%
SMA/MA/Sederajat	215	55,0%	57	50%	158	57%
DI/D2/D3	10	2,6%	4	3,5%	6	2,2%
D4/S1	59	15,1%	44	38,6%	15	5,4%
S2/S3	2	0,5%	1	0,9%	1	0,4%
<b>Pekerjaan</b>						
Jasa	265	68%	7	6%	258	93%
Wiraswasta	36	9%	28	25%	10	4%
PNS/BUMN	7	2%	5	4%	2	1%
Pensiunan	4	1%	4	4%	0	0
Karyawan swasta	26	7%	21	18%	3	1%
Tidak bekerja	53	14%	49	43%	4	1%
<b>Ber-KTP Kota Yogyakarta</b>						
Ya	29	7,4%	21	18,4%	8	2,9%
Tidak	362	92,6%	93	81,6%	269	97,1%

Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

Selain karakteristik responden sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penelitian ini juga mewawancarai juru parkir (jukir) sebagai salah satu respondennya. Jukir yang diwawancarai lebih diprioritaskan pada jukir utama yang namanya tercantum dalam surat tugas jukir. Survei mewawancarai 79 orang jukir yang terdiri atas jukir utama 86,1 persen dan pembantu jukir 13,9 persen. Jukir tersebut merupakan jukir roda dua/tiga di TJU

dan roda empat. Jukir roda dua sebanyak 62 persen dan roda empat sebanyak 38 persen. Rentang usia responden jukir di TJU adalah dari usia 30 tahun hingga 78 tahun dengan persebaran usia yang relatif merata. Pengelompokan usia dilakukan mulai usia kurang dari 40 tahun hingga lebih dari 55 tahun. Persentase terbanyak berada pada usia lebih dari 55 tahun (sebanyak 35,4 persen).

**Tabel 4 Karakteristik Jukir TJU**

<b>Indikator</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>
<b>Usia</b>		
<40 tahun	12	15,2
46-45 tahun	9	11,4
46-50 tahun	16	20,3
51-55 tahun	14	17,7
>56 tahun	28	35,4
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	77	97,5
Perempuan	2	2,5
<b>Pendidikan</b>		
Tidak/belum pernah sekolah	1	1,3
Tidak lulus SD	4	5,1
SD/MI/SR	21	26,6
SMP/MTs	17	21,5
SMA/MA/Sederajat	34	43,0
DI/D2/D3	2	2,5
<b>Mata pencaharian</b>		
Jasa	8	10,0
Wiraswasta	11	14,0
Karyawan Swasta	5	6,0
Petani	4	5,0
<b>Lama menjadi Jukir</b>		
< 5 tahun	8	10,1
5-10 tahun	17	21,5
11-15 tahun	16	20,3
16-20 tahun	15	19,0
> 20 tahun	23	29,1

Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

Jenis kelamin sebagian besar responden jukir adalah laki-laki (97,5 persen) dan hanya 2,5 persen yang berjenis kelamin perempuan (mereka adalah jukir utama kendaraan roda dua). Tingkat pendidikan jukir lebih banyak berpendidikan menengah ke bawah, yaitu SMP/MTs ke bawah (54,5 persen). Lebih dari separuh responden mengatakan bahwa pekerjaan sebagai juru parkir merupakan pekerjaan utama. Hal ini ditunjukkan lewat pernyataan 65 persen jukir yang tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai jukir. Kurun waktu menjadi jukir bervariasi mulai dari yang di bawah 5 tahun dan lebih dari 25 tahun. Persentase yang lebih dari 25 tahun adalah 29 persen dan antara 5-10 tahun mencapai 22 persen. Sebanyak 72,2 persen responden memiliki KTP Kota Yogyakarta. Secara detail, karakteristik jukir TJU dapat dilihat pada Tabel 4.

## **Pembahasan**

Pembahasan berikut ini memaparkan beberapa penilaian terkait dengan pelayanan perparkiran yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, nilai IKM untuk pengelolaan perparkiran di Tepi Jalan Umum (TJU), nilai IKM untuk pengelolaan perparkiran di Tempat Khusus Parkir (TKP), dan nilai IKM menurut penilaian masyarakat sekitar lokasi parkir, serta nilai komposit IKM untuk pengelolaan perparkiran secara umum. Sebelum pembahasan mengenai nilai indeks sebelumnya, akan dipaparkan penilaian terkait penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Yogyakarta. Pembahasannya akan meliputi fasilitas, pelayanan jukir, pengurusan surat tugas dan pembinaan, penilaian bendel karcis parkir, respons komplain, kepuasan pelayanan Dinas Perhubungan, serta nilai indeks kepuasan layanan perparkiran.

## **Pelayanan Pengelolaan Perparkiran Kota Yogyakarta**

Penilaian pengelolaan perparkiran terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada jukir. Fasilitas tersebut, antara lain, terdiri atas ketersediaan lahan parkir, seragam, topi, dan *stick lamp* (khusus yang *shift* malam). Hasil survei memperlihatkan ketersediaan lahan parkir dinilai telah mencukupi (92,4 persen). Sementara itu, fasilitas berikutnya, yaitu fasilitas seragam, menurut pendapat jukir dinilai telah mencukupi oleh 48,1 persen jukir dan tidak mencukupi oleh 51,9 persen jukir. Seragam hanya diberikan kepada jukir utama, sedangkan yang untuk pembantu jukir menjadi tanggung jawab jukir utama. Untuk topi, dinilai telah mencukupi (70,9 persen), sedangkan ketersediaan *stick lamp* hanya sebanyak 25,3 persen yang menilai telah mencukupi.

Apabila melihat kepadatan kendaraan yang diparkir dibandingkan dengan lahan parkir, sebanyak 26,6 persen jukir menilai tidak padat, yang menilai agak padat sebesar 46,8 persen dan yang menilai padat sebesar 26,6 persen. Hal ini berarti pengaturan kendaraan yang diparkir harus ditata dengan baik karena menurut jukir, lahan parkir dinilai telah mencukupi. Terkait dengan perebutan lahan parkir, menurut jukir, hal itu terjadi, tetapi persentasenya tidak banyak. Sebanyak 11,4 persen responden mengungkapkan perebutan itu jarang terjadi, bahkan 88,6 persen menilai tidak pernah terjadi. Apabila terjadi perebutan lahan, maka yang dilakukan jukir bervariasi, mulai dari tidak melakukan apa-apa (agar tidak terjadi konflik), bermusyawarah untuk pembagian hari kerja/jadwal parkir, melaporkan ke dinas, hingga mencari lahan parkir baru.

Penilaian lain terkait dengan aktivitas parkir dibandingkan dengan fungsi yang lain, menurut jukir, aktivitas perparkiran tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini diungkapkan oleh 91,2 persen responden, sedangkan 8,9 persen menilai agak mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini berbeda dengan yang dikemukakan pengguna layanan dan masyarakat yang mengatakan bahwa aktivitas perparkiran mengganggu aktivitas lalu lintas. Dapat dimengerti apabila jukir menilai aktivitas perparkiran tidak mengganggu aktivitas yang lain karena parkir merupakan salah satu mata pencaharian bagi mereka.

Penilaian terkait dengan pelayanan jukir menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena jukir merupakan pihak yang memberikan pelayanan langsung kepada pengguna layanan perparkiran. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan jukir di TJU adalah merespons komplain dari pengguna layanan. Komplain yang disampaikan berkaitan dengan kehilangan kendaraan, kelengkapan kendaraan (misalnya helm dan spion), barang milik pribadi, kerusakan kendaraan, serta aktivitas perparkiran. Kasus yang pernah terjadi adalah kehilangan kelengkapan kendaraan, sedangkan tidak pernah ada komplain dari pengguna layanan terkait kasus kehilangan kendaraan dan barang milik pribadi. Terkait dengan kehilangan kelengkapan kendaraan (helm, spion) pernah dialami oleh 22,8 persen jukir. Tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh jukir adalah dengan mengganti kelengkapan yang hilang, meminta maaf, dan ada pula yang tidak melakukan apapun. Respons terhadap pengaduan atau komplain ini memperlihatkan tingkat responsivitas jukir di menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sementara itu, untuk kerusakan kendaraan dan kelengkapan kendaraan, jukir yang pernah mengalaminya

hanya sebanyak 2,5 persen saja dan tindak lanjut dari jukir adalah dengan tidak melakukan tindakan apapun.

Kemiringan dalam penataan kendaraan merupakan tugas lain dari jukir dan telah tercantum dalam dokumen surat tugas jukir. Hasil survei menunjukkan dalam penataan roda dua, sebanyak 69,4 persen membentuk 90 derajat, sedangkan yang lainnya membentuk sudut 60 dan 45 derajat. Penataan kendaraan roda dua menurut pengguna layanan diketahui sebanyak 65,8 persen responden menyatakan kendaraannya selalu ditata dalam satu baris. Sementara itu, sisanya menyatakan kendaraannya sering ditata dalam satu baris mencapai 19,3 persen dan 14,9 persen menjawab tidak/jarang ditata dalam satu baris. Penataan kendaraan roda tiga maupun empat lebih banyak yang ditata sejajar maupun miring dengan arah lalu lintas. Pernyataan ini hampir sama dengan pendapat pengguna layanan yang menyatakan bahwa kendaraan roda tiga atau empat sebagian besar dibuat sejajar arah lalu lintas (62,3 persen) dan miring (36 persen), sedangkan yang lainnya tegak lurus (1,8 persen). Dalam penataan kendaraan, hal yang perlu diketahui adalah apakah penataan dalam satu baris ataukah tidak. Berdasarkan hasil survei, menurut 80 persen jukir, kendaraan roda dua ditata dalam satu baris, sedangkan menurut pengguna layanan parkir, dilakukan pada satu badan jalan (33,3 persen). Hal ini berarti yang menyatakan parkir tidak pada satu badan jalan sebanyak 66,7 persen. Penataan kendaraan ini menyesuaikan dengan lokasi parkir yang tersedia dan agar tidak mengganggu aktivitas yang lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagai jukir, didasarkan pada surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Surat tugas menjadi hal penting yang harus dimiliki seorang jukir karena menunjukkan identitas jukir, termasuk



lokasi parkir. Survei memperlihatkan bahwa dalam satu tahun terakhir, dari 69 jukir utama sebanyak 60 orang (75,9 persen) melakukan pengurusan surat tugas ke Dinas Perhubungan. Mereka melakukan pengurusan surat tugas baru (dua orang) dan surat tugas perpanjangan (58 orang). Proses pengurusan surat tugas baru dinilai mudah, kelengkapan administrasinya juga sedikit, tetapi tidak semua melakukan peninjauan lokasi/tempat parkir saat pengajuan permohonan surat tugas baru. Durasi waktu dari mulai responden mengajukan surat tugas baru hingga peninjauan lokasi memakan waktu tiga minggu. Lama waktu dari peninjauan lokasi hingga turunnya surat juga memerlukan waktu tiga minggu. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Dinas Perhubungan karena seharusnya ketika seseorang akan melakukan pengurusan surat tugas baru, ada peninjauan dari dinas mengenai lokasi parkir agar dapat ditentukan potensi parkir yang ada di lokasi tersebut. Terkait dengan lama waktu pelayanan, secara umum waktu yang dibutuhkan untuk keluarnya surat tugas baru adalah antara 6-8 minggu dan hal ini dinilai lama. Selain surat tugas baru, sebagian besar jukir melakukan pengurusan surat perpanjangan. Dalam pengurusan surat perpanjangan, secara prosedur, dapat diurus sendiri oleh jukir maupun diantar oleh petugas. Jukir yang mengurus sendiri sebanyak 23 orang (39,7 persen). Selanjutnya 81 persen proses pengurusan perpanjangan surat tugas dinilai mudah dan 19 persen menilai sangat mudah dengan persyaratan yang dinilai sedikit. Lama waktu pelayanan yang dibutuhkan juga relatif lebih cepat, yaitu antara satu hari hingga empat minggu. Menurut jukir, lama waktu pelayanan ini dinilai relatif cepat (72,4 persen) dan sangat cepat (25,9 persen), tetapi ada juga yang menilai kurang cepat (1,7 persen). Seluruh jukir

menilai jika mereka tidak pernah ditolak ketika mengajukan perpanjangan surat tugas.

Tanggung jawab Dinas Perhubungan yang harus dilakukan terhadap jukir adalah melakukan pembinaan secara rutin. Dalam satu tahun terakhir, frekuensi pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan berkisar dari satu hingga enam kali dan menurut jukir, pembinaan paling banyak dilakukan satu hingga dua kali. Frekuensi jukir dalam mengikuti pembinaan juga relatif baik, tetapi sebanyak 19,5 persen jukir tidak pernah mengikuti pembinaan. Pembinaan dilakukan dalam bentuk ceramah, pengarahan/pelatihan, dipanggil ke dinas, serta peninjauan petugas ke lokasi parkir. Dari empat jenis pembinaan kepada jukir, sebagian besar dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pembinaan dengan cara peninjauan langsung ke lokasi parkir tidak sebanyak yang dilakukan di kantor. Pembinaan dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu Dinas Perhubungan, polisi, ustaz, pemkot, dan mahasiswa. Pembinaan yang dilakukan telah dinilai tepat (96,7 persen) dan penting (89,9 persen). Pembinaan juga dinilai relatif baik karena beberapa alasan, yaitu menambah wawasan bagi jukir (70 persen), pengarahan jukir terkait tugas dan tanggung jawabnya (18 persen), serta sebagai media kritik/saran maupun komunikasi (masing-masing 6 persen).

Setelah jukir mendapatkan pembinaan dari Dinas Perhubungan, maka menjadi tanggung jawab jukir untuk memberikan pembinaan kepada pembantu jukir. Dari sekitar 68 jukir utama, sebanyak 44,1 persen memiliki pembantu jukir dan 55,9 persen tidak memiliki jukir. Jumlah pembantu jukir yang dimiliki adalah antara satu hingga sepuluh orang. Kemudian sebanyak 63,3 persen jukir utama memiliki satu pembantu jukir, 20 persen memiliki dua pembantu jukir, dan 6,7 persen memiliki dua pembantu jukir. Lainnya ada yang

memiliki delapan hingga sepuluh pembantu jukir. Salah satu konsekuensi memiliki pembantu jukir adalah melakukan pembinaan terhadap pembantu jukir dan semua jukir utama bersedia memberikan pembinaan tersebut. Pembinaan yang dilakukan oleh jukir utama bervariasi, ada yang melakukannya dalam satu tahun sebanyak satu hingga enam kali. Paling banyak jukir utama melakukan pembinaan sebanyak satu hingga dua kali.

Persoalan mengenai bendel karcis merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan. Karcis merupakan salah satu bukti pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa parkir. Karcis juga terkait dengan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Menurut jukir, cara mereka mendapatkan plafon/jumlah bendel disesuaikan dengan potensi parkir yang telah ditentukan Dinas Perhubungan. Semakin berpotensi suatu kawasan parkir akan semakin banyak jumlah bendel yang harus dibelikan, demikian pula sebaliknya. Sebanyak 77,3 persen responden juga menegaskan bahwa jumlah bendel karcis ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Jumlah bendel karcis yang ditentukan oleh dinas

dibedakan dalam satuan minggu dan bulan. Jumlah bendel karcis yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan berkisar antara 1 hingga 16 bendel dengan durasi waktu habisnya bendel yang berbeda-beda. Jumlah bendel karcis yang habis dipakai dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 memperlihatkan ada bendel yang jumlahnya dinilai kurang sesuai dengan potensi parkir yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Sebanyak sebelas responden menyatakan jumlah bendel yang ditentukan Dinas Perhubungan adalah dua bendel per bulan, tetapi yang habis dalam satu bulan hanya satu bendel. Plafon jumlah bendel yang paling banyak ditentukan dinas adalah dua bendel dan enam bendel per bulan. Sementara itu, jumlah bendel yang paling banyak habis dalam satu bulan adalah satu dan dua bendel. Hal ini perlu menjadi perhatian Dinas Perhubungan, apakah hal itu karena potensi parkir yang tidak sesuai ataukah karena karcis parkir tidak diberikan kepada pengguna layanan. Menurut jukir, mereka tidak pernah memberikan karcis bekas pakai yang pernah dipakai sebelumnya. Penuturan ini sama dengan

**Tabel 5 Perbandingan Jumlah Bendel yang Ditentukan Dinas dan Bendel Habis Terpakai**

Jumlah Bendel yang Ditentukan Dinas (bendel)	Jumlah Bendel Karcis Habis Terpakai (bendel)						Total
	1	2	3	4	8	12	
1-3	18	6	2	1	0	0	27
4-6	14	4	0	0	0	1	19
7-9	1	0	0	0	0	1	2
10-13	7	1	0	0	1	0	9
16	1	0	0	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>58</b>

Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

yang diungkapkan oleh pengguna layanan. Meskipun terdapat perbedaan jumlah bendel karcis parkir, jukir tidak merasa keberatan dengan jumlah bendel yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Hal ini karena telah sesuai dengan potensi parkir (81,1 persen), sesuai regulasi (15,1 persen), dan sesuai kesepakatan (3,8 persen).

Masih berkaitan dengan karcis parkir, jukir tidak memberikan karcis parkir karena beberapa alasan, yaitu pengguna layanan menolak diberi karcis, pengguna tidak meminta karcis, strategi menambah penghasilan, lupa tidak membawa karcis parkir, lokasi parkir aman, parkir hanya sebentar, menggunakan kartu parkir, dan tidak pernah dicek oleh dinas. Persoalan lain yang juga menarik adalah tidak semua jukir mengetahui besarnya persentase pembagian retribusi. Data survei memperlihatkan sebesar 73,4 persen tidak mengetahui besarnya pembagian retribusi sesuai dengan perda yang berlaku antara jukir dengan pemerintah kota (Dinas Perhubungan). Hanya 26,6 persen yang

mengetahui persentase pembagian retribusi tersebut. Mereka yang mengetahui besarnya persentase paling banyak menyebutkan besarnya proporsi adalah 25-75 persen adalah 9 orang dan 40-60 persen adalah tujuh orang. Dari mereka yang mengetahui besarnya pembagian retribusi, 85,7 persen menyatakan setuju dan 14,3 persennya tidak/kurang setuju.

Terlepas dari ketidaktahuan terhadap besarnya persentase pembagian retribusi, jukir tidak keberatan dengan retribusi yang harus disetor ke Dinas Perhubungan. Sebanyak 93,6 persen responden mengungkapkan ketidakberatannya dan hanya 6,4 persen yang merasa keberatan. Berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa besarnya bagi hasil juru parkir di tepi jalan umum adalah maksimal 80 persen dari potensi parkir. Selain setoran resmi, ada pula pungutan lain yang disetorkan selain ke Dinas Perhubungan. Hal ini diungkapkan oleh 3,8 persen yang menyatakan adanya setoran

**Tabel 6 Sanksi Dinas Perhubungan Kepada Juru Parkir di TJU**

<b>Sanksi</b>	<b>Terlambat memberikan setoran (persen)</b>	<b>Terlambat membeli bendel karcis (persen)</b>	<b>Tidak memenuhi target (persen)</b>
a. Mencabut surat tugas sebagai jukir	0	0	2,5
b. Menegur langsung	21,5	17,7	15,2
c. Memberikan peringatan tertulis	11,4	13,9	7,6
d. Memberikan pembinaan di kantor	2,5	1,3	0
e. Tidak ada tindakan	11,4	10,1	12,7
f. Mengakumulasi setoran yang kurang	0	0	3,8

Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

lain, yaitu ke pengurus RW, RT, dan oknum Pemda Kota Yogyakarta. Ada pungutan yang disetorkan secara rutin dan ada pula yang tidak rutin.

Hal lain yang dikaji dalam penelitian ini adalah sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan terhadap jukir. Data survei memperlihatkan tidak jarang jukir terlambat memberi setoran, tidak membeli bendel karcis, ataupun tidak memenuhi target, dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan atas hal tersebut bervariasi. Tabel 6 menampilkan bahwa sanksi yang paling banyak diberikan adalah memberikan teguran langsung. Selain menegur langsung, dinas juga memberikan peringatan tertulis serta tidak melakukan tindakan apapun. Persentasenya berturut-turut adalah 21,5 persen, 17,7 persen, dan 15,2 persen.

Salah satu aspek yang penting untuk dilihat dalam penyelenggaraan pelayanan adalah respons komplain. Data survei memperlihatkan 27,9 persen jukir pernah menyampaikan kritik/saran meskipun frekuensinya tidak sering dan hanya 1,2 persen yang sering menyampaikannya. Kritik/saran yang disampaikan adalah mengenai perbaikan pengelolaan parkir dan penyediaan fasilitas parkir. Perbaikan pengelolaan parkir meliputi penataan lahan, sistem perparkiran, alur, akses, tarif parkir, retribusi, pemilihan lokasi dan penertiban atau penambahan perlengkapan jukir (jas hujan), serta pengurangan jumlah setoran retribusi parkir.

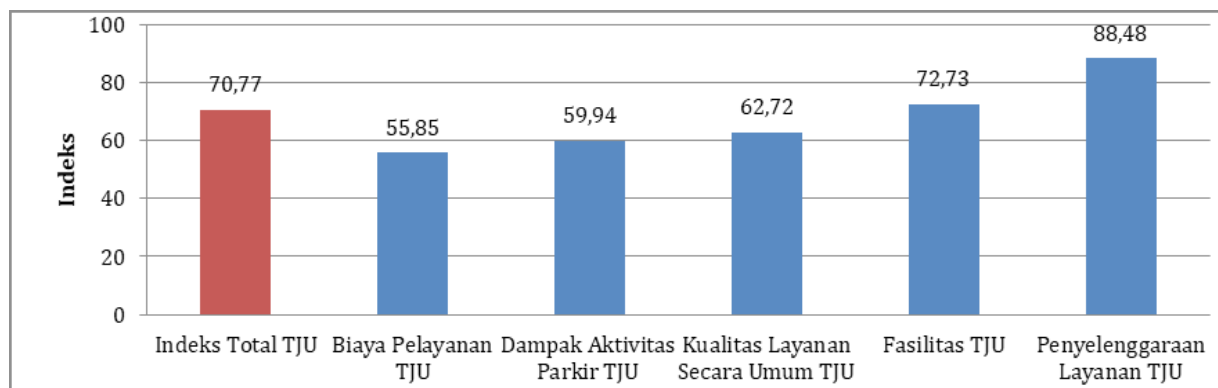
Cara menyampaikan kritik dan saran oleh jukir adalah langsung menyampaikan kepada Dinas Perhubungan (39,1 persen) dan melalui forum komunikasi pekerja parkir (17,4 persen). Menanggapi kritik dan saran dari jukir tersebut, respons yang diberikan oleh Dinas Perhubungan sangat bervariasi. Respon atau tanggapan tersebut sangat tergantung dari kritik dan saran yang disampaikan sehingga tingkat kepuasan jukir terhadap respons dan

tanggapan Dinas Perhubungan juga bervariasi, mulai dari yang memuaskan sampai dengan kurang memuaskan/tidak memuaskan. Tidak banyaknya jukir yang memberikan kritik/saran disebabkan oleh mereka yang merasa tidak mempunyai masalah dan kualitas pelayanan telah dianggap baik. Alasan yang lainnya adalah responden tidak mengetahui prosedur penyampaian kritik/saran serta pesimis terhadap respons dinas menanggapi komplain yang disampaikan. Sikap pesimis jukir terhadap respons yang akan diberikan Dinas Perhubungan menjadi hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Hal ini menjadi awal ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan.

#### *Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Tepi Jalan Umum (IKM di TJU)*

Penilaian untuk pelayanan perparkiran dibedakan untuk pelayanan di Tepi Jalan Umum (TJU) maupun di Tempat Khusus Parkir (TKP). Penilaian terhadap pelayanan di TJU berdasarkan pendapat masyarakat pengguna layanan perparkiran, pendapat juru parkir, dan masyarakat sekitar lokasi perparkiran.

Penilaian berikut ini berdasarkan penilaian responden pengguna layanan perparkiran. Nilai IKM pengelolaan perparkiran di TJU disusun dari beberapa indikator, yaitu biaya pelayanan, dampak aktivitas parkir, fasilitas TJU, dan penyelenggaraan layanan parkir. Dari semua indikator, ada beberapa indikator yang dinilai pengguna layanan perparkiran masuk dalam kategori tidak baik (nilai D), yaitu biaya pelayanan, dampak aktivitas parkir, dan kualitas layanan secara umum. Sementara itu, fasilitas layanan masuk dalam kategori kurang baik (nilai C) dan penyelenggaraan layanan TJU mendapatkan nilai sangat baik (nilai A). Detail nilai indeks dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

**Gambar 1** Nilai IKM Pengelolaan Perparkiran di TJU menurut Pengguna Layanan

Aspek biaya pelayanan (retribusi) parkir di TJU memiliki nilai terendah dibandingkan dengan nilai IKM yang lainnya untuk pelayanan perparkiran. Nilai indeks biaya pelayanan TJU terdiri atas beberapa indikator penyusun, yaitu kemahalan biaya TJU, kesesuaian biaya TJU, dan bukti pembayaran TJU. Kesesuaian biaya TJU memberikan penilaian sejauh mana biaya yang dikeluarkan pengguna layanan sesuai dengan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan.

Selanjutnya kesesuaian biaya pelayanan yang diberikan jukir dinilai kurang baik oleh pengguna layanan TJU (nilai IKM 70,83). Demikian juga dengan aspek tingkat kemahalan biaya yang memiliki nilai indeks masuk dalam kategori kurang baik (nilai IKM 69,52). Sementara itu, bukti pembayaran yang dilihat dari penggunaan karcis bekas dan pemberian karcis parkir kepada pengguna layanan memiliki nilai IKM dalam kategori tidak baik (nilai IKM 27,19). Berdasarkan hasil survei, hampir sebagian besar responden tidak mendapatkan karcis parkir dan inilah yang membuat nilai indeks bukti pembayaran masuk dalam kategori tidak baik meskipun penggunaan karcis bekas pakai telah relatif berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Terkait dengan dampak aktivitas parkir,

menurut pengguna layanan TJU, hal itu masuk dalam kategori tidak baik (nilai IKM 59,94). Dampak aktivitas parkir dilihat dari seberapa mengganggu keberadaan tempat parkir terhadap aktivitas lalu lintas dan sejauh mana penataan parkir mengganggu aktivitas lalu lintas (baik untuk kendaraan roda dua, roda empat, maupun roda tiga). Penilaian untuk kualitas layanan secara umum memiliki nilai IKM 62,72 (kategori kurang baik). Penilaian ini didasarkan pada tingkat kepuasan secara umum terhadap fasilitas, pelayanan petugas parkir (jukir), dan penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Yogyakarta. Hal tersebut masih memerlukan perhatian dari Dinas Perhubungan, terutama dalam fasilitas parkir.

Penilaian terhadap fasilitas parkir TJU menghasilkan nilai IKM sebesar 72,73 (kategori kurang baik). Beberapa indikator penyusun indeks fasilitas memiliki nilai IKM untuk akses parkir (68,42), keamanan dan kenyamanan TJU (70,18), serta kebersihan tempat parkir (70,39) masuk dalam katagori kurang baik. Sementara itu, penataan parkir TJU (78,62) masuk dalam kategori baik. Dibandingkan dengan indikator lainnya, akses terhadap parkir memiliki nilai indeks terendah. Hal ini berarti kemudahan memperoleh

tempat parkir masih menjadi persoalan bagi pengguna layanan. Beberapa badan jalan diberi tanda larangan untuk parkir, bahkan parkir hanya boleh pada satu sisi badan jalan. Hal ini yang membuat penilaian akses memiliki nilai terendah dibandingkan dengan yang lain.

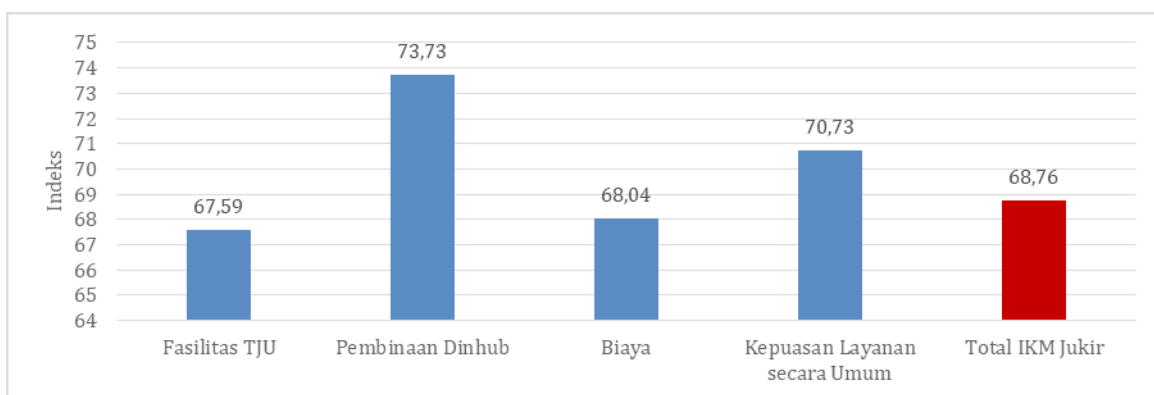
Sementara itu, secara umum, nilai IKM berdasarkan penyelenggaraan pelayanan didasarkan pada indikator penggunaan identitas petugas (seperti seragam, topi, maupun *stick lamp*), jumlah petugas, pelayanan petugas, keramahan petugas, dan pembedaan pelayanan (diskriminasi pelayanan). Nilai IKM untuk penyelenggaraan pelayanan perparkiran yang ada di TJU menunjukkan jumlah petugas dan keramahan petugas TJU masuk dalam kategori kurang baik. Pelayanan petugas TJU masuk dalam kategori baik, sedangkan penggunaan identitas petugas TJU dan diskriminasi pelayanan di TJU masuk dalam kategori sangat baik.

Nilai total IKM penyelenggaraan layanan TJU secara umum adalah 88,48 (sangat baik). Nilai IKM tertinggi untuk indikator penyelenggaraan pelayanan adalah pada

diskriminasi pelayanan (96,27) yang berarti tidak ada diskriminasi pelayanan dalam pemberian pelayanan dari jukir. Nilai IKM lainnya yang masuk dalam kategori sangat baik adalah penggunaan identitas (89,04) dan pelayanan petugas di TJU (84,43). Dilihat dari aspek penyelenggaraan pelayanan perparkiran di TJU, nilai yang didapatkan relatif baik. Hal ini perlu dipertahankan, bahkan justru ditingkatkan kembali pelayanannya.

Penilaian berikutnya terkait dengan pelayanan perparkiran berasal dari responden jukir. Penilaian jukir berdasarkan pada pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan. Penilaian itu terdiri atas aspek fasilitas (baik berupa seragam, topi, *stick lamp*, dan ketersediaan lahan), pembinaan dari Dinas Perhubungan, serta biaya (penilaian terhadap bendel karcis dan sebesar retribusi yang disetorkan ke Dinas Perhubungan). Penilaian nilai IKM jukir adalah 68,76 (kategori baik). Apabila dilihat dari indikator penyusun untuk IKM jukir, nilai indeks pada semua indikator penyusun masuk dalam kategori baik.

Nilai IKM pada indikator pembinaan dari Dinas Perhubungan memiliki nilai tertinggi



Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

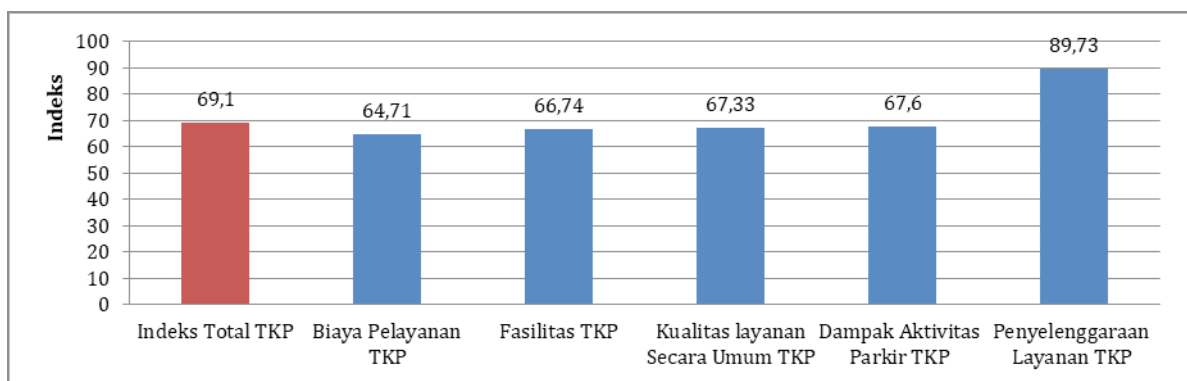
**Gambar 2** Nilai IKM Pengelolaan Perparkiran di TJU menurut Juru Parkir

dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu 73,73 (kategori baik). Hal ini menunjukkan pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan relatif telah baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Frekuensi pelaksanaan pembinaan telah rutin dilakukan, sedangkan materi yang disampaikan juga relatif sesuai dengan kebutuhan. Penilaian terkait dengan biaya menyangkut meskipun telah relatif baik, masih membutuhkan perhatian dari Dinas Perhubungan karena masih ada jukir yang tidak mengetahui secara pasti besarnya retribusi yang harus disetorkan ke Dinas Perhubungan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, secara umum, jukir juga tidak keberatan dengan penentuan bendel karcis dan besarnya retribusi yang harus disetorkan ke dinas. Hal yang perlu dilakukan Dinas Perhubungan, salah satunya, adalah dengan memberikan pembinaan yang membahas, di antaranya, tentang hak dan kewajiban sebagai jukir. Dengan demikian, diharapkan jukir juga mengetahui secara pasti mengenai hak dan kewajiban mereka sehingga nantinya diharapkan jukir akan dapat memberikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan lebih baik lagi.

*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Tempat Khusus Parkir (IKM di TKP)*

Nilai IKM TKP disusun berdasarkan pendapat dari pengguna layanan TKP. Penilaian IKM parkir di TKP meliputi aspek biaya pelayanan, fasilitas, dampak aktivitas parkir, dan penyelenggaraan layanan parkir. Nilai total IKM TKP sebesar 69,10 (kategori kurang baik). Gambar 3 memperlihatkan seluruh nilai IKM TKP dalam kategori tidak baik, kurang baik, dan sangat baik. Nilai IKM TKP yang masuk dalam kategori tidak baik adalah biaya pelayanan (64,71). Fasilitas memiliki nilai indeks 66,74 dan dampak aktivitas parkir 67,60 yang masuk dalam kategori kurang baik. Sementara itu, yang masuk dalam kategori sangat baik adalah penyelenggaraan layanan perparkiran di TKP (89,73). Dari semua indikator penyusun nilai IKM TKP, maka aspek biaya pelayanan TKP memiliki nilai terendah dibandingkan dengan indikator yang lainnya.

Terkait dengan indikator biaya pelayanan, hal yang masih memerlukan perhatian adalah kemahalan biaya dan kesesuaian biaya (kategori tidak baik). Nilai IKM kemahalan



Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

**Gambar 3** Nilai IKM Pengelolaan Perparkiran di TKP menurut Pengguna Layanan

biaya TKP sebesar 56 persen (kategori tidak baik). Biaya yang dikeluarkan untuk parkir di TKP didasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. untuk sedan/*jeep/pickup/station wagon/box*/ kendaraan roda tiga sebesar Rp2.000,00; untuk bus sedang sebesar Rp10.000,00 dan Rp15.000,00; seerta untuk bus besar sebesar Rp20.000,00 dan Rp15.000,00. Tarif ini berlaku untuk dua jam pertama parkir dan untuk setiap jam selebihnya, dikenakan 50 persen dari tarif. Sebagian besar pengguna layanan membayar biaya sebesar Rp50.000,00, bahkan ada yang membayar hingga Rp120.000,00 untuk bus besar. Adanya tarif progresif ini memengaruhi penilaian kemahalan biaya parkir di TKP khususnya bagi bus besar.

Apabila dikaitkan dengan kesesuaian biaya (IKM 62,27), pelayanan jukir TKP masih dirasa kurang karena biaya yang dikeluarkan pengguna layanan TKP dinilai tidak/kurang sesuai dengan pelayanan yang mereka terima. Hal ini memengaruhi nilai indeks kesesuaian biaya. Sementara itu, untuk bukti pembayaran, sebagian besar pengguna layanan mendapatkan bukti pembayaran retribusi. Dengan demikian, penilaian terhadap bukti pembayaran (75,45) mempunyai nilai tertinggi dibandingkan dengan indikator yang lain dan masuk dalam kategori kurang baik.

Terkait dengan persoalan fasilitas di TKP, nilai IKM fasilitas TKP sebesar 66,74 (kategori tidak baik). Indikator penyusun untuk IKM fasilitas menunjukkan penilaian yang tidak baik pada indikator akses parkir (62,45). Hal ini karena pengguna layanan merasakan kesulitan mengakses tempat parkir di TKP. Salah satu sebab kesulitan mengakses lahan parkir TKP adalah karena keterbatasan daya tampung parkir, selain juga karena prioritas parkir lebih bagi

kendaraan yang besar (bus) dibandingkan dengan mobil maupun sepeda motor. Penilaian terhadap ketersediaan fasilitas, kebersihan, dan kondisi, meskipun nilainya telah baik, masih memerlukan perhatian dari pemerintah. Kemudian fasilitas yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut adalah kamar mandi/WC, fasilitas kebersihan, lokasi/gedung, dan tempat ibadah.

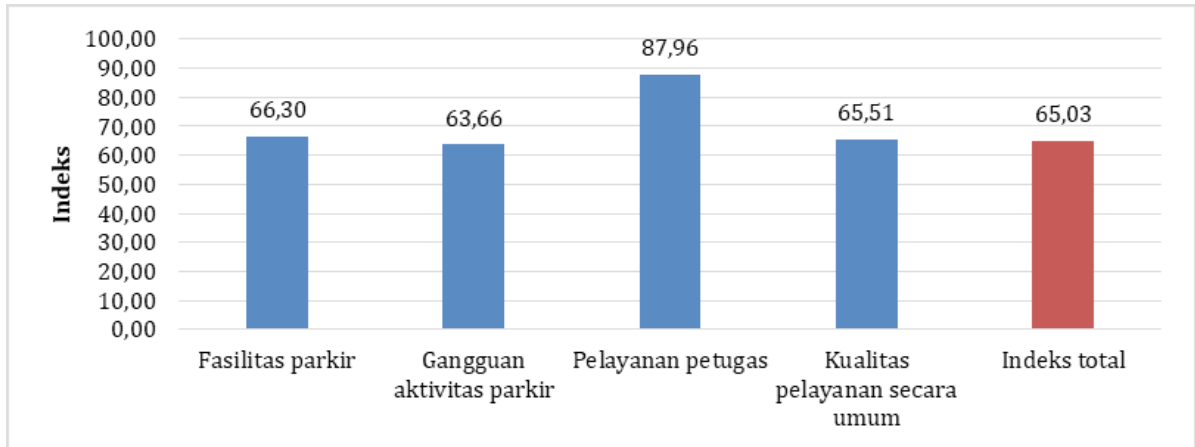
Penilaian lainnya dalam IKM TKP adalah dampak aktivitas parkir dan penilaian kualitas layanan secara umum. Dampak aktivitas parkir dinilai berdasarkan pendapat mengenai sejauh mana keberadaan parkir tersebut mengganggu atau tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Nilai IKM untuk dampak aktivitas parkir adalah 67,6 (kategori kurang baik). Hal ini karena aktivitas perparkiran dinilai agak mengganggu aktivitas lalu lintas. Penilaian terhadap kualitas pelayanan secara umum memiliki nilai indeks sebesar 67,3 (kategori kurang baik). Penilaian kurang baik ini disebabkan oleh rendahnya pelayanan jukir, kepuasan terhadap fasilitas, dan kepuasan pengelolaan perparkiran.

Penilaian terkait dengan penyelenggaraan layanan di TKP memiliki nilai indeks sebesar 89,73 (kategori sangat baik). Penilaian terhadap pelayanan petugas dan diskriminasi pelayanan mempunyai nilai berturut-turut sebesar 94,49 dan 95,67 (kategori sangat baik), sedangkan nilai untuk keramahan petugas adalah 74,28 (kategori kurang baik). Hal ini menunjukkan pelayanan petugas secara umum di TKP relatif baik.

#### *Indeks Kepuasan menurut Masyarakat Sekitar Lokasi*

Penilaian terhadap pengelolaan perparkiran juga diambil berdasarkan pendapat masyarakat sekitar lokasi parkir. Hal





Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

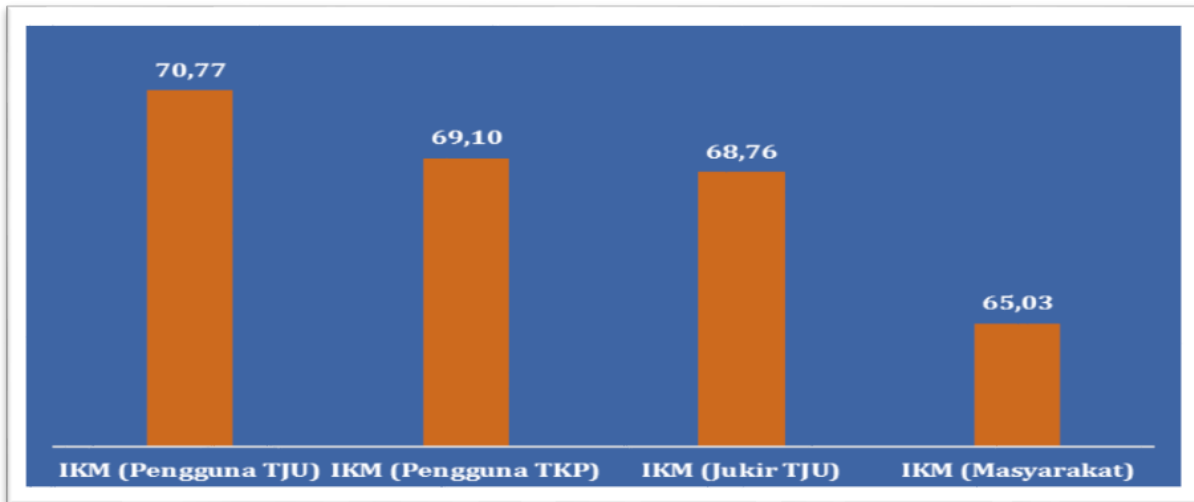
**Gambar 4** Nilai IKM menurut Masyarakat Sekitar Lokasi

ini perlu dilakukan agar aktivitas perparkiran dapat diidentifikasi mengganggu aktivitas masyarakat atau tidak. Penilaian nilai indeks menurut masyarakat meliputi fasilitas parkir, gangguan adanya aktivitas parkir, dan pelayanan petugas.

Gambar 4 menunjukkan nilai total IKM menurut masyarakat sekitar lokasi parkir adalah 65,03 (kategori kurang baik). Indikator yang lain juga menunjukkan nilai dalam kategori kurang baik dan baik. Sementara itu, indikator yang dinilai baik adalah fasilitas parkir (66,30) dan gangguan aktivitas parkir (63,66), sedangkan pelayanan petugas (87,96) masuk dalam kategori baik. Meskipun semua nilai dinilai telah relatif baik, aspek yang dinilai paling rendah adalah gangguan aktivitas parkir. Hal ini menunjukkan aktivitas perparkiran masih dinilai mengganggu aktivitas lalu lintas dan masyarakat, serta menimbulkan kebisingan. Namun, secara umum, masyarakat tidak keberatan dengan keberadaan aktivitas perparkiran di sekitar mereka. Dinas Perhubungan bertanggung jawab mencari solusi terhadap persoalan yang muncul akibat keberadaan aktivitas perparkiran bagi masyarakat sekitar.

#### *Indeks Komposit Kepuasan terhadap Pengelolaan Perparkiran*

Bagian ini memperlihatkan nilai indeks komposit kepuasan pengelolaan perparkiran secara umum baik di TJU maupun di TKP (Gambar 5). Selain itu, nilai indeks juga dibedakan menurut pendapat dari pengguna layanan, masyarakat sekitar, dan Jukir. Nilai IKM jukir hanya didasarkan pada pendapat jukir di TJU sehingga nilai IKM TKP hanya diambil dari pendapat pengguna layanan TKP. Variabel penyusun indeks parkir di TJU adalah variabel biaya pelayanan TJU, dampak aktivitas parkir TJU, kualitas layanan secara umum TJU, fasilitas TJU, dan penyelenggaraan layanan TJU. Sementara itu, indeks pengelolaan parkir di TKP disusun dari variabel biaya pelayanan TKP, fasilitas TKP, kualitas pelayanan secara umum, dampak aktivitas parkir TKP, dan penyelenggaraan layanan TKP. Kemudian IKM juru parkir terdiri atas variabel fasilitas TJU, pembinaan Dinas Perhubungan, biaya, dan kepuasan layanan secara umum. Yang terakhir adalah indeks masyarakat sekitar lokasi parkir yang terdiri atas variabel fasilitas parkir, gangguan aktivitas parkir, pelayanan petugas, dan kualitas pelayanan secara umum.



Sumber: Survei IKM Utilitas, PSKK UGM, 2016

**Gambar 5** Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan

Data menunjukkan bahwa secara keseluruhan, nilai IKM pengelolaan perparkiran umumnya masuk dalam kategori kurang baik. Nilai IKM pengelolaan parkir tertinggi berdasarkan pendapat pengguna layanan TJU adalah 70,77 (kategori kurang baik). Nilai terendah IKM berdasarkan pendapat masyarakat sekitar lokasi parkir adalah 65,03 (kategori kurang baik). Keempat nilai IKM masuk dalam kategori kurang baik sehingga perlu menjadi perhatian tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanannya (lihat Gambar 5).

### Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan terhadap pengelolaan perparkiran yang dikelola Dinas Perhubungan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Fasilitas yang ada di TJU maupun TKP masih dinilai kurang baik. Hal ini karena beberapa fasilitas, seperti tanda parkir di TJU, dinilai masih

kurang. Sementara itu, akses parkir ke TKP dinilai relatif sulit karena prioritas parkir diberikan kepada bus sedang maupun besar dibandingkan dengan mobil dan motor yang tarifnya relatif lebih murah. Selain itu, penyediaan fasilitas di TKP yang dinilai masih kurang adalah kamar mandi, fasilitas kebersihan, dan tempat ibadah.

2. Nilai IKM untuk biaya pelayanan di TJU dinilai tidak baik karena hampir sebagian besar pengguna layanan tidak mendapatkan bukti pembayaran retribusi. Hal ini yang menyebabkan nilai IKM biaya pelayanan di TJU tidak baik meskipun besarnya biaya parkir di TJU secara umum dinilai relatif murah.
3. Biaya pelayanan di TKP memiliki nilai indeks yang kurang baik karena biaya yang dikeluarkan pengguna layanan TKP dinilai relatif mahal. Selain itu, kesesuaian besarnya biaya yang dikeluarkan pengguna layanan dan

pelayanan yang mereka terima dinilai tidak sesuai.

4. Dampak aktivitas parkir di TJU dan TKP dinilai mengganggu oleh masyarakat sekitar lokasi parkir. Aktivitas parkir dinilai mengganggu aktivitas lalu lintas, aktivitas masyarakat, dan menimbulkan kebisingan. Namun, masyarakat sekitar tidak keberatan dengan adanya aktivitas perparkiran tersebut. Keberadaan jukir juga dinilai dapat membantu mengurangi aktivitas parkir yang mengganggu aktivitas lalu lintas tersebut.
5. Nilai IKM jukir menunjukkan dari sisi fasilitas parkir yang dinilai kurang adalah seragam parkir. Aspek pembinaan yang diberikan Dinas Perhubungan dinilai telah relatif baik, yang dilihat dari sisi frekuensi maupun materi yang disampaikan. Sementara itu, terkait dengan aspek biaya pelayanan, terutama retribusi yang disetor ke dinas, banyak jukir yang tidak mengetahui persentasenya antara jukir dan dinas. Secara umum, mereka tidak keberatan dengan besarnya retribusi maupun bendel karcis yang telah ditentukan oleh dinas.

Berdasarkan hasil studi terhadap pengelolaan perparkiran, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dinas Perhubungan perlu lebih mengintensifkan lagi pembinaan kepada jukir, baik dari sisi frekuensi maupun topik pembinaan. Penekanan lebih pada hak dan kewajiban sebagai jukir agar semua jukir memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Secara khusus, topik pembinaan, misalnya, terkait

dengan penggunaan karcis parkir, regulasi mengenai setoran ke dinas, aspek keamanan, responsivitas terhadap keluhan/masukan dari pengguna layanan, dan kebersihan lokasi parkir.

2. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi mengenai *punishment* bagi jukir yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan, misalnya dengan penunda keluarnya surat tugas parkir. Selama ini *punishment* tidak diberlakukan kepada jukir yang terlambat memberikan setoran, tidak memenuhi target, maupun terlambat membeli bendel karcis.
3. Fasilitas penunjang, baik di TJU maupun di TKP, perlu ditambah, misalnya tanda-tanda boleh parkir dan seragam. Sementara itu, fasilitas di TKP yang perlu ditambah adalah fasilitas kebersihan, kamar mandi maupun tempat ibadah.
4. Agar aktivitas parkir tidak mengganggu masyarakat sekitar, pemerintah perlu membuat regulasi untuk mewajibkan pertokoan maupun aktivitas ekonomi lainnya, seperti hotel, untuk menyediakan lahan parkir. Regulasi ini dapat menjadi salah satu persyaratan keluarnya perizinan bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi tersebut.
5. Masih dijumpai beberapa jukir yang tidak mengenakan seragam parkir, tetapi mengatur aktivitas parkir, bahkan mengatur lalu lintas parkir saat ramai pengunjung. Hal ini memerlukan adanya pelarangan secara tegas terhadap aktivitas tersebut atau jika diperlukan, maka dinas maupun pihak kepolisian perlu melakukan pembinaan.

## Daftar Pustaka

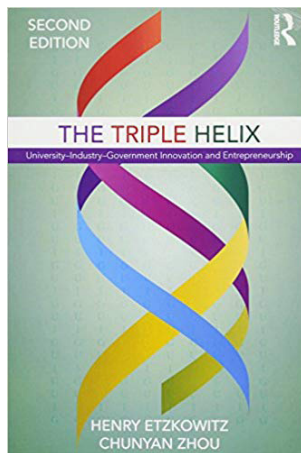
- Obsborne, David dan Ted Gaebler. 2008. *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Jakarta: Teruna Gravika.
- Carino, Ledivina V. 1994. *Bureucrcy for Democracy, the Dynamics of Executibe Bureucrcy Interaction During Governmental Transition*. College of Public Administration, University of Philipphines.
- Marschall, Melissa J. 2004. Citizen Participation and the Neighborhood Context: A New Look at the Coproduction of Local Publi. *Political Research Quarterly*; Jun 2004; 57, 2; ProQuest Research Library pg. 231.
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler. 2006. *Business Research Methods, 9 th Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Evans, J.R. and Lindsay. W.M, 2005. *The Management and Control of Quality*. Sixth Edition. Singapore: Thomson South Western.
- Goetsch, David L. and Staanley B. Davis, 2002. *Quality Management, Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services*. New Jersey: Prentice Hall.
- Heller, K., Price, R., Reinharz, S., Riger, S., & Wandersman, A. 1984. *Psychology and Community Change: Challenges of the Future*. Homewood, IL: Dorsey.
- Sampara, Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: Penerbit STIA LAN Press.
- Park, Chung-Hoon, and Young-Gul Kim. 2006. The Effect of Information Satisfaction and Relational Benefit on Consumers Online Site Commitmennts. *Journal of Electronic Commerce in Organizations*, Vol. 4, No. 1, Page 70 – 90.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. 2016. *Laporan Penelitian Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Lingkungan Kota Yogyakarta*.
- Komarudin, 2011. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. *Jurnal Sekretariat Negara RI No. 20 Tahun 2011*.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2009. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan*. Jakarta.
- Wang, Xiaohu. 2001. Assessing Public Participation in U.S. Cities. *Public Performance & Management Review*, Vol. 24, No. 4. (Jun., 2001), pp. 322-336. M.E. Sharpe, Inc.

## Resensi Buku Sinergi untuk Inovasi

Muhadjir Darwin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Muhadjir Darwin (e-mail: d\_muhadjir@yahoo.com)



Judul	: The Triple Helix: University-Industry- Government Innovation and Entrepreneurship
Penulis	: Henry Etzkowitz & Chunyan Zhou
Penerbit	: Roudledge
Cetakan	: Kedua, 2018
Tebal	: 328 halaman

Buku yang terbit pertama kali pada 2008 dan terbit ulang pada 2018 ini dapat menjadi rujukan penting bagi para peneliti dan praktisi inovasi. Sebelum menjadi buku seperti ini, Henry Etzkowitz telah menulis artikel tentang hal yang sama bersama Loet Leydesdorff yang berjudul “*The Triple Helix – University – Industry – Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development*” dan dimuat di *EASST Review*, Vol.14, No.1 yang terbit pada 1995. Etzkowitz kemudian dikenal sebagai penemu dari konsep *Triple Helix*. Ketokohan Etzkowitz dalam pengembangan konsep ini tampak dari posisinya sekarang sebagai presiden dari International Triple Helix Institute (ITHI). Sementara itu, penulis kedua, Chunyan Zhou, juga telah lama berkecimpung dalam isu *triple helix*, banyak menulis buku dan artikel

tentang tema ini, serta menjadi *co-founder* dan direktur dari ITHI.

Metafora *Triple Helix* muncul melalui diskusi di *workshop* yang diselenggarakan di Amsterdam pada 1994, yang bertema “Evolutionary Economics and Chaos Theory: New Directions in Technology Studies”. Di *workshop* tersebut, Etzkowitz & Leydesdorff menguraikan tiga hubungan antara universitas, industri, dan pemerintah dalam proses inovasi. Seiring waktu, model ini telah berevolusi, telah ditafsirkan ulang, dan dikritik (misalnya, Shinn, 2002; Carayannis & Campbell, 2009; Cooke & Leydesdorff, 2006; Lawton Smith & Ho, 2006).

*Triple Helix* adalah konsep yang mengaitkan universitas dengan pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan penerapan inovasi, baik pada tingkat nasional atau

regional. Konsep ini telah banyak diterapkan di berbagai negara dan diinisiasi oleh elemen-elemen dari *triple helix*, yaitu universitas, pemerintah, atau kalangan dunia usaha. Penerapan dari konsep ini telah mendorong tumbuhnya industri kreatif, tumbuhnya *co-working space*, berkembangnya konsep *innovation governance*, juga berkembangnya gagasan bahwa pemerintah adalah *gardener* bagi tumbuhnya inovasi, dan berkembangnya hubungan kolaboratif (*co-creation*) dalam pengembangan inovasi di masyarakat.

Buku ini merupakan buku pengantar tentang model kerja sama sinergis antara tiga pihak yang dapat berperan penting dalam *inventing* (menemukan), *adopting* (mengadopsi), dan *diffusing* (menyebarkan) gagasan, model atau cara-cara baru. Ketiga pihak itu adalah akademisi atau universitas, pemerintah, dan dunia usaha atau bisnis. Setiap pihak itu memiliki keunggulan yang jika disinergikan, akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Negara memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan dan memiliki sumber daya untuk menggerakkan inovasi di masyarakat. Universitas yang merupakan produsen ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dapat menjadi inisiator dan partner dunia usaha dalam pengembangan inovasi di dunia usaha. Sementara itu, sektor bisnis atau industri adalah pengguna hasil-hasil temuan untuk diterapkan dalam praktik bisnis dan industri.

Buku ini terdiri atas empat bagian. Bagian pertama dari buku ini mengantarkan pembaca kepada konsep dasar *triple helix* dan bagaimana setiap sisi dari segitiga tersebut, yaitu universitas yang berkarakter wirausaha, dunia usaha, dan pemerintah, dapat memainkan peranan strategis mereka dalam pengembangan hubungan jejaring di antara mereka. Di bagian kedua, pembahasan berkisar pada elaborasi lebih

jauh berbagai model pengembangan *triple helix*, seperti model yang menekankan pada pengembangan inovasi melalui pengembangan kawasan, inkubator, teknopolis, dan *venture capital*. Bagian ketiga mengetengahkan sejumlah kasus penerapan *triple helix*, seperti yang dikembangkan di Silicon Valley, pengembangan kewirausahaan StartX di Universitas Stanford, dan pengajaran kewirausahaan warga di universitas Oregon. Sementara itu, di bagian kesimpulan diketengahkan tesis utama dari buku ini yang dijadikan judul dari bab penutup ini, yaitu *Innovation in Innovation: An endless transition toward the triple helix*. *Triple helix* adalah inovasi dalam inovasi; sebuah inovasi dalam pengembangan kolaborasi antara tiga elemen utama, yaitu universitas-industri-pemerintah. Inovasi kelembagaan ini dapat menjadi basis bagi berkembangnya proses inovasi dan tumbuhnya produk-produk inovatif di masyarakat.

Model *triple helix* ini terus-menerus mengalami pembaruan atau inovasi. Misalnya, peran dari setiap satuan dari *triple helix* tidaklah eksklusif. Universitas tidak hanya berperan sebagai penemu (*inventor*), tetapi dapat juga sebagai pengguna (*user*), misalnya dalam hal inovasi pendidikan. Demikian halnya, perusahaan bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga penemu. Misalnya, perusahaan dapat memiliki unit R&D (*research and development*) yang tugasnya adalah untuk menemukan produk-produk baru yang dapat unggul di pasar. Sementara itu, pemerintah bukan hanya sebagai fasilitator bagi universitas dan industri dalam proses inovasi, tetapi juga sebagai penemu dan pengguna sekaligus. Selain itu, hubungan sinergis terdiri atas tiga satuan, yaitu universitas, industri, dan pemerintah. Ada pihak lain yang dapat mengambil peran strategis sebagai penghubung untuk

mengintensifkan arus informasi antara ketiga satuan tersebut di atas. Pihak penghubung tersebut adalah media. Dengan berjalannya fungsi media, proses inovasi, adopsi, dan difusi inovasi dapat berlangsung lebih efektif. Dengan diperhitungkannya peran media dalam hubungan sinergis tersebut, maka muncul istilah baru untuk menggantikan istilah lama *triple helix*, yaitu *quadruple helix*.

Model *triple helix* merupakan model yang populer di dunia inovasi, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan. Misalnya, muncul kritik bahwa model tersebut bias barat. Model seperti ini belum tentu dapat diaplikasikan di negara-negara berkembang karena belum adanya kesiapan dari universitas, sektor bisnis, atau pemerintah untuk mengembangkan hubungan sinergis seperti itu. Di negara-negara berkembang perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan terlebih dulu sehingga setiap pihak dari *triple* atau *quadruple helix* dapat berperan aktif bagi terbangunnya kolaborasi yang produktif antarpihak.





## Pedoman untuk Penulis

Populasi adalah jurnal penelitian dan analisis kritis masalah-masalah terkait tema besar kependudukan dan kebijakan. Redaksi menerima naskah artikel hasil penelitian, baik kepublikan maupun lapangan, dan resensi buku dalam lingkup tema tersebut. Naskah yang diajukan harus orisinal, belum pernah dipublikasikan atau sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan oleh media lain, dan tidak mengandung unsur plagiarisme (dinyatakan dengan pernyataan tertulis).

### Pengiriman Naskah

- *Populasi* menggunakan *Open Journal System* (OJS) dan menganjurkan para penulis melakukan register terlebih dahulu kemudian mengunggah naskah secara *online* di <http://jurnal.ugm.ac.id/populasi>. OJS mempermudah dewan redaksi, editor, *peer review*, dan penulis dapat memantau proses naskah, secara *online*.
- Naskah dalam bentuk MS-Word dikirim via *e-mail* ke [jurnalpopulasi@ugm.ac.id](mailto:jurnalpopulasi@ugm.ac.id) atau [jurnalpopulasi@gmail.com](mailto:jurnalpopulasi@gmail.com).
- Soft file boleh juga diserahkan langsung ke sekretariat Pengelola Populasi, di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Gedung Masri Singarimbun, Lt. 2. Jl. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Tlp. 0274-6491153, 547867.

### Ketentuan Naskah

- Mohon perhatikan instruksi di bawah ini dengan cermat. Penyunting berhak mengembalikan atau menolak naskah yang tidak sesuai dengan butir-butir instruksi di bawah ini.
- Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, berformat MS-Word, huruf Times New Roman, 1 spasi, tidak melebihi 10.000 kata.
- Judul dan subjudul: Judul harus spesifik dan efektif sehingga sekali baca dapat ditangkap maksudnya. Judul terdiri sebanyak-banyaknya 14 kata pada naskah berbahasa Indonesia atau 10 kata pada naskah berbahasa Inggris. Subjudul di dalam teks harus singkat dan jelas. Hindari terlalu banyak subjudul dan hindari penggunaan nomor. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai judul dalam bahasa Inggris.
- Penulis: nama (-nama) penulis ditulis di bawah judul tanpa mencantumkan gelar akademik atau jabatan apa pun. Deskripsi singkat tentang penulis, meliputi institusi asal penulis dan *e-mail* korespondensi ditulis di bawah nama penulis.
- Catatan kaki: Gunakan catatan kaki dari pada catatan akhir.
- Abstrak (*abstract*) dan kata kunci (*keywords*): disusun dalam satu paragraf 100-200 kata, yang menjelaskan secara gamblang, utuh, dan lengkap keseluruhan isi tulisan. Intisari berisi ide-ide pokok tentang latar belakang, masalah dan tujuan, kerangka berpikir, metode, pembahasan, dan kesimpulan, serta ditulis dengan

bahasa yang tidak sama dengan bahasa naskah. Abstrak disertai dengan kata kunci yang mencerminkan konsep-konsep paling penting yang dikandung naskah. Kata kunci terdiri sekurang-kurangnya 2 kata dan sebanyak-banyaknya 4 kata. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.

- Tabel, grafik, gambar, ditulis dalam ukuran huruf yang sama, atau relatif sama, dengan ukuran huruf pada naskah. Judul tabel atau gambar ditulis dengan lay-out sebagai berikut:

- **Tabel 1 Kepemilikan Aset Berdasarkan Status Ekonomi**

- **Gambar 1** Skema Penyaluran Bansos

- Setiap tabel atau gambar harus menyertakan sumber atau catatan di bawahnya.
- Pendahuluan: menguraikan secara ringkas tentang latar belakang dan formulasi masalah penelitian, tujuan penelitian, serta kajian teoretis yang relevan dan jika memungkinkan, menyebutkan hipotesis.
- Metode: menguraikan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk di dalamnya pemaparan tentang desain penelitian, sasaran penelitian, instrumen dan teknik/prosedur pengumpulan data, serta analisis data.
- Pembahasan: menyajikan secara naratif pokok-pokok hasil penelitian dengan didukung sajian tabel, grafik atau diagram, serta menjawab permasalahan penelitian dengan cara menafsirkan temuan dan mengaitkannya dengan struktur pengetahuan yang telah mapan.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.
- Daftar Pustaka: memuat semua kepustakaan yang dirujuk dalam naskah dan tidak memuat kepustakaan yang tidak dirujuk. Yang menjadi pertimbangan kepustakaan adalah sebagai berikut. Derajat kemutakhiran kepustakaan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan 10 tahun terakhir. Semakin banyak kepustakaan primer diacu, semakin naskah bermutu.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.
- Resensi buku. Naskah resensi buku harus menyertakan informasi mengenai judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman buku yang dirensi. Isi resensi buku memuat informasi dan pemahaman mengenai apa yang diungkapkan di dalam buku tersebut, serta penilaian dan pertimbangan kepada pembaca akan pentingnya buku tersebut. Naskah resensi buku berkisar antara 1.500-2.000 kata.

## Penulisan Referensi

### Dalam Naskah

- Karya yang dikutip dalam teks menggunakan format: (Gray, 2008: 501).
- Pengutipan dalam kelompok ditulis secara alfabetis menggunakan titik koma sebagai pemisah: (Brown, 2008; Gray & Gani, 1998; Stuart, 2002).
- Gunakan 'et.al.' atau 'dkk' ketika mengutip satu karya yang ditulis oleh lebih dari dua penulis, tetapi tulis semua pengarang di dalam Daftar Pustaka.
- Untuk membedakan karya yang berbeda oleh penulis yang sama dalam tahun yang sama,

gunakan huruf a, b, c, dst., seperti Arifin (2002a, 2002b).

- Tidak ada penulisan menggunakan garis bawah atau *underline* baik di dalam naskah, catatan kaki maupun daftar pustaka.

#### Dalam Daftar Pustaka

- Penulisan karya dalam daftar pustaka ditulis dalam urutan alfabetis dan kronologis.
- Buku dengan satu penulis: Singarimbun, Masri. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku dengan lebih dari satu penulis: Baumert, Kevin; Ruchi Bhandari and Nancy Kete. 1999. *What Might a Developing Country Climate Commitment Look Like?* Washington, D.C.: World Resources Institute.
- Penulis berbentuk korporasi atau lembaga: Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. 2006. "Penelitian Peningkatan Efektivitas Program Raskin Melalui Pendampingan Lembaga Perguruan Tinggi". (Laporan akhir). Yogyakarta: Bekerja sama dengan Perum Bulog.
- Artikel majalah atau jurnal: Listyaningsih, Umi dan Eddy Kiswanto. 2008. "Bantuan Langsung Tunai: mengatasi Masalah dengan Masalah". *Populasi*, 19 (1), 13-26.
- Artikel dari surat kabar: Darwin, Muhadjir. 2008. "Strategi dan Pencapaian MDGs". *Kedaulatan Rakyat*, 15 Oktober, hlm. 9.
- Karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain): Asmi, Handria. 2010. "Manajemen Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Agam: Studi Penyaluran Bantuan Korban Gempa Bumi Tanggal 30 September 2008". (Tesis). Yogyakarta: Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Makalah seminar: Milla, Mirra Noor. 2008. "Profil Psikologis Teroris di Indonesia: Dasar Bagi Penerapan Metode Counter-Terrorism". *Makalah Seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 10 September*.
- Artikel dari internet: Abimanyu, Anggito. 2006. "Kebijakan Publik Dalam Praktek". <http://www/paue.ugm.ac.id/seminar/update2007/anggito-1.ppt>, diakses 2 Juni 2008, pukul 10.00 WIB.
- Buku terjemahan: Jellinek, Lea. 1994. *The Wheel of Fortune: the History of a Poor in Jakarta*. Diterjemahkan oleh Eddy Zainuri dengan judul *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta: LP3ES.
- Pustaka tidak diketahui penulisnya: Anonim. 2007. *Kiat Sukses Modal Kepercayaan*. Yogyakarta: Sokolimo Press.

Kepastian naskah yang dimuat akan diberitahukan melalui *e-mail* korespondensi atau pos. Selagi penulis belum memperoleh kepastian tersebut, tidak boleh mengirimkan naskah untuk diterbitkan di tempat lain.



**FORMULIR BERLANGGANAN**

Nama (Instansi/Perorangan) : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....  
.....  
.

Harap dicatat sebagai pelanggan Jurnal POPULASI, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bersama ini saya kirimkan pembayaran melalui rekening Bank Mandiri No. 137-00-0624454-1, atas nama YP3K-UGM sebesar Rp .....

untuk ..... edisi, mulai nomor/bulan .....

dengan harga per eksemplar Rp40.000.

....., ..... 201....  
Pelanggan,

.....

